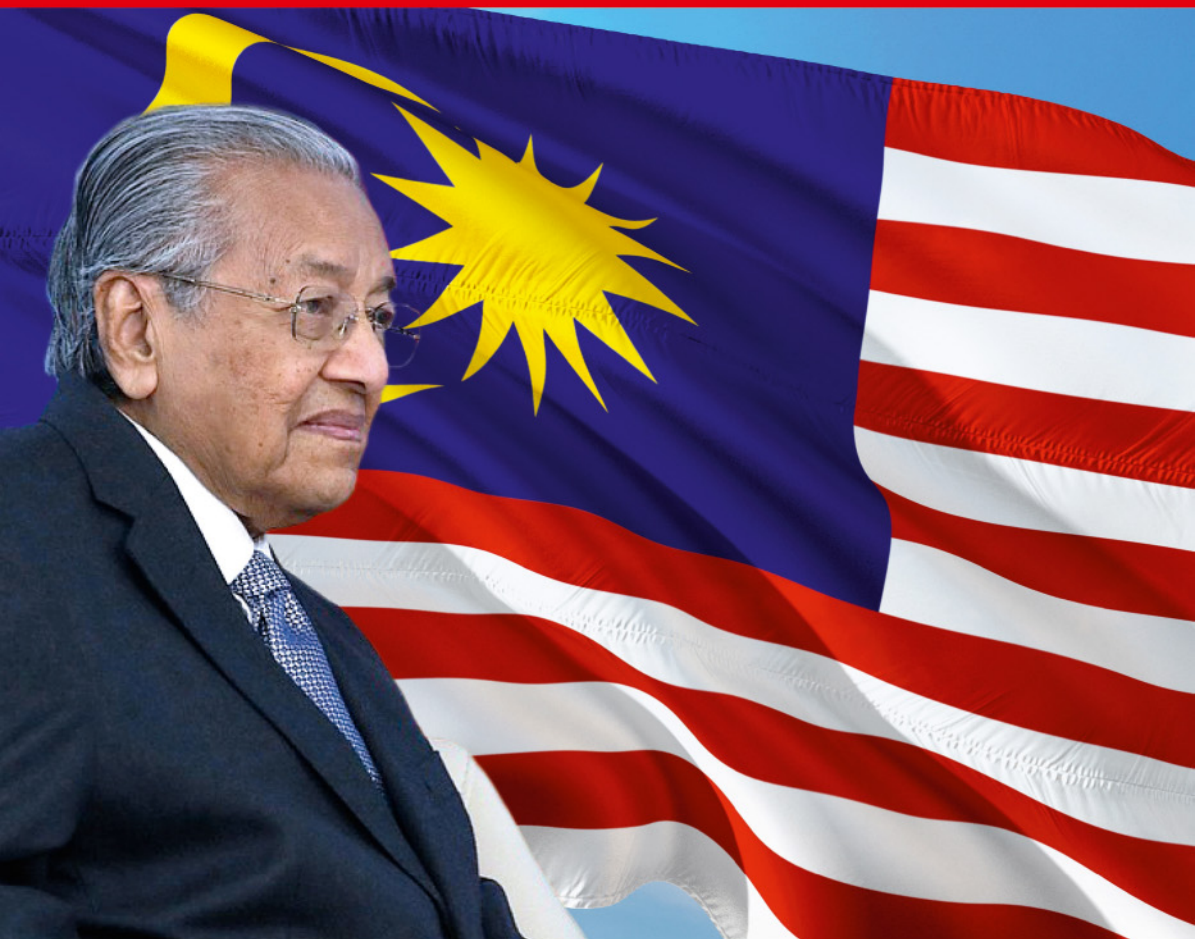




Membincang Malaysia *bersama*

Tun Dr. Mahathir Mohamad:

POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT TAHUN 2010 DAN 2019



MOHD AZIZUDDIN MOHD SANI
AZAHAR KASIM
UMMU ATIYAH AHMAD ZAKUAN

EDITOR
SUPARTO WIJOYO
BAGUS OKTAFIAN ABRIANTO

Membincang Malaysia *bersama*

Tun Dr. Mahathir Mohamad:

POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT TAHUN 2010 DAN 2019

Membincang Malaysia *bersama*

Tun Dr. Mahathir Mohamad:

POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT TAHUN 2010 DAN 2019

MOHD AZIZUDDIN MOHD SANI
AZAHAR KASIM
UMMU ATIYAH AHMAD ZAKUAN

Editor

SUPARTO WIJOYO
BAGUS OKTAFIAN ABRIANTO



Airlangga
University
Press

■ Pusat Penerbitan dan Percetakan
Universitas Airlangga

MEMBINCANG MALAYSIA BERSAMA
Tun Dr. MAHATHIR MOHAMAD
Politik, Ekonomi, dan Masyarakat Tahun 2010 dan 2019

Mohd Azizuddin Mohd Sani, Azahar Kasim, Ummu Atiyah Ahmad Zakuan
Editor: Suparto Wijoyo, Bagus Oktafian Abrianto

e-ISBN 978-602-473-587-6

© Penerbit **Airlangga University Press** 2020

Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Layout (Akhmad Riyanto)
Cover (Erie Febrianto)
Digitalisasi (Tim Ebook AUP)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis
dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

DAFTAR ISI

Prakata.....	vii
BAGIAN 1	
PENDAHULUAN	1
Pengantar	1
Perdebatan tentang Mahathirisme	1
Demokrasi di Malaysia	4
Pensiun Semu untuk Mahathir	5
Mahathir dalam “ <i>New Malaysia</i> ”	7
BAGIAN 2	
WAWANCARA 1: BAB 2010	14
Hak asasi Manusia	14
Nilai-nilai Asia	18
Kebebasan Berbicara dan Kebebasan Media	20
Tajuk Menuju Sistem Dua Partai	21
Reformasi Hukum dan Keamanan Nasional	22
Sosial-ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP)	25
1 Malaysia, Pendidikan dan Persatuan Nasional	32
BAGIAN 3	
WAWANCARA 3: BAB 2019	35
Perdana Menteri untuk Kedua Kalinya	35
Pegawai Negeri Sipil	37
Tentang Mahathirisme	37
Nilai-Nilai Asia	38
Reformasi Pendidikan	40
Pendanaan Politik	45
Hak asasi Manusia	47
Terorisme vis-à-vis Rasisme	49
Kebijakan tentang Perempuan	51

TABLE OF CONTENTS

Acknowledgement.....	Avii
----------------------	------

CHAPTER 1

INTRODUCTION	A1
Introduction	A1
Debates on Mahathirism	A1
Democracy in Malaysia	A3
Pseudo-Retirement for Mahathir	A4
Mahathir in “New Malaysia”	A7

CHAPTER 2

INTERVIEW 1: THE 2010 CHAPTER.....	A13
Human Rights.....	A13
Asian Values	A17
Freedom of Speech and Freedom of the Media.....	A19
Heading Towards Two Parties System.....	A20
Reforms the Law and National Security	A21
Socio-economy and the New Economic Policy (NEP)	A23
1 Malaysia, Education and National Unity	A29

CHAPTER 3

INTERVIEW 2: THE 2019 CHAPTER.....	A32
Prime Minister for the Second Time	A32
The Civil Servants	A34
On Mahathirism.....	A34
Asian Values	A35
Educational Reforms.....	A36
Political Financing.....	A41
Human Rights.....	A42
Terrorism vis-à-vis Racism	A44
Policy on Women.....	A46
Index.....	B1

PRAKATA

Buku ini disusun berdasarkan dua wawancara bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2010 dan 2019. Kedua wawancara tersebut sangatlah penting dalam konteks politik dan sosial bagi masyarakat Malaysia.

Pertama, wawancara ini merupakan pengamatan Mahathir mengenai politik dan masyarakat Malaysia, ketika ia pensiun dari dunia politik pada tahun 2010, dan ketika kembali terjun sebagai Perdana Menteri pada tahun 2019. Seperti kita ketahui bahwa Mahathir adalah Perdana Menteri Malaysia dari tahun 1981 hingga 2003. Wawancara pertama berlangsung di The Tower 1, Kuala Lumpur City Center (Menara Petronas), Kuala Lumpur pada tanggal 26 Januari 2010, sedangkan wawancara kedua diadakan di Kantor Perdana Menteri, Putrajaya pada 11 Maret 2019.

Kedua, wawancara pertama dilakukan kurang dari satu tahun setelah Perdana Menteri ketujuh Najib Tun Razak menjabat pada tahun 2009. Sementara itu, wawancara kedua diadakan kurang dari satu tahun setelah Najib kehilangan kekuasaannya dalam pemilihan umum yang demokratis dan bersejarah pada tahun 2018. Dalam Pemilihan Umum ke-14 pada 9 Mei 2018, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kami, Barisan Nasional (BN, atau sebelumnya dikenal sebagai Perikatan), yang memerintah Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957, dikalahkan oleh Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin oleh Mahathir sendiri.

Ketiga, dua wawancara ini bukanlah percakapan biasa dengan Mahathir. Sebaliknya, ini adalah percakapan intelektual dan pelik antara pewawancara dengan Mahathir, menjawab banyak masalah sulit/kritis yang berkaitan dengan politik dan masyarakat Malaysia. Kedua wawancara tersebut menghasilkan penjelasan terperinci tentang Malaysia di masa lalu, terutama selama masa jabatan Perdana Menteri Mahathir yang pertama dan pendekatan pemerintah PH saat ini dan agenda kebijakan di masa jabatan ke-dua.

Projek buku ini disponsori oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE). Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada MOE atas dukungan keuangan melalui dua hibah, yaitu *Fundamental Research Grant Scheme* (FRGS) dan Pusat Manajemen Penelitian dan Inovasi (RIMC) Universiti Utara Malaysia yang telah memfasilitasi pengelolaan penelitian. Kami sangat berterang budi kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bersedia diwawancarai untuk penelitian dan dipersembahkan sebagai penulisan buku ini. Terima kasih banyak kepada Kantor Perdana Menteri dan *Leadership Foundation* serta Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad's Thoughts (IPDM)-UUM untuk mengoordinasikan dan mengatur wawancara dengan Mahathir. Terakhir, terima kasih kepada kolega dan asisten riset kami, Nor Azura A. Rahman, Muhammad Aiman Hamdi Abdul Rashid, dan Farah Izzati Ridua'an. Kami juga berterima kasih atas persahabatan yang membuat karya ini lebih menyenangkan. Kami ingin menyapa dan berterima kasih kepada keluarga kami dengan cinta atas dukungan apa pun yang kami lakukan. Kami merasa bersyukur memiliki teman-teman dari Universitas Airlangga, yakni Pak Herlambang dan Pak Suparto yang membantu kami dalam penerbitan buku ini. Terima kasih khusus juga kepada Airlangga University Press atas kemurahan hati untuk menerbitkan buku ini, kami sangat menghargainya. Terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan, saudara Suparto Wijoyo yang telah memberikan dorongan agar dapat dilakukan penerbitan bersama sekaligus menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia bersama saudara Bagus Oktafian Abrianto. Kami akan selalu merasa bersyukur untuk semua itu.

Mohd Azizuddin Mohd Sani

Azahar Kasim

Ummu Atiyah Ahmad Zakuan

Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah

ACKNOWLEDGEMENT

This book is based on two interviews with Tun Dr. Mahathir Mohamad in 2010 and 2019. These interviews were so significant in the context of Malaysian politics and society.

First, these interviews were about Mahathir's observation on the Malaysian politics and society, when he retired from politics in 2010, and made a comeback as Prime Minister in 2019. As we all know that Mahathir was the Malaysia's Prime Minister from 1981 until 2003. The first interview took place at The Tower 1, Kuala Lumpur City Centre (Petronas Tower), Kuala Lumpur on 26 January 2010, while the second interview was held at the Prime Minister's Office, Putrajaya on 11 March 2019.

Second, the first interview was conducted less than 1 year after the seventh Prime Minister Najib Tun Razak took office in 2009. Meanwhile, the second interview was held less than one year after Najib lost his power in a democratic and historic general election in 2018. In the 14th General Election on 9 May 2018, for the first time in our national history, Barisan Nasional (BN, or previously known as Perikatan), which ruled Malaysia since independence in 1957, was defeated by Pakatan Harapan (PH) led by Mahathir himself.

Third, these two interviews were not the normal conversations with Mahathir. Instead, these were hard and intellectual conversations between the interviewers with Mahathir answering many hard/critical issues relating to Malaysian politics and society. Both interviews produced detailed explanation about Malaysia in the past, particularly during Mahathir's first premiership and current PH government's approaches and policy agenda in his second premiership.

This book project was sponsored by the Ministry of Education Malaysia (MOE). Therefore, we wish to express our gratitude to MOE for the financial support through two Fundamental Research Grant Scheme

(FRGS) grants and to the Research and Innovation Management Centre (RIMC), Universiti Utara Malaysia for facilitating the management of the research. We are greatly indebted to Tun Dr. Mahathir Mohamad who was willing to be interviewed for these researches and book. Many thanks to Prime Minister's Office and the Perdana Leadership Foundation and Institute of Tun Dr. Mahathir Mohamad's Thoughts (IPDM), UUM for coordinating and arranging the Mahathir's interviews. Lastly, thanks to our colleagues and research assistants, Nor Azura A. Rahman, Muhammad Aiman Hamdi Abdul Rashid and Farah Izzati Ridua'an. We also thank for the friendship which make works are more enjoyable. We would like to acknowledge and thank our families with love for supporting whatever we do. We feel grateful to have friends from Universitas Airlangga such Pak Herlambang and Pak Suparto who assisted us in the publication of this book. Special thanks also to the Universitas Airlangga Press for the generosity to publish this book, we appreciate it so much. We will always feel grateful for all that.

Prof. Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani

Azahar Kasim

Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakuan

Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

PENGANTAR

Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memerintah Malaysia untuk pertama kalinya lebih dari dua dekade, yaitu dari 1981 sampai 2003. Periode ini dikenal oleh banyak cendekiawan sebagai periode Mahathirisme. Namun, sejak Pemilihan Umum ke-14 pada 9 Mei 2018, Mahathir memimpin partai koalisi yang dikenal sebagai Pakatan Harapan (PH) yang berhasil mengalahkan Barisan Nasional (BN) yang sangat kuat. Dengan kemenangan itu, Mahathir, diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya pada usia 92 tahun. Singkatnya, Mahathir dikenal sebagai pemimpin tangguh yang pada masa lalu, memandang bahwa masyarakat multikultural, multiras, multiagama, dan multibahasa di Malaysia sebagai konteks yang tidak tepat untuk mengorganisir debat politik terbuka dan diskusi tentang hak asasi manusia. Seperti yang dikatakan Mahathir dalam *Far Eastern Economic Review* pada 28 Oktober 1996, "Ancamannya dari dalam ... Jadi kita harus dipersenjatai, dan harus bicara. Bukan dengan senjata api, tetapi dengan hukum yang diperlukan untuk memastikan negara tetap stabil." Dia menyiratkan bahwa konflik rasial dan ketidakstabilan politik tidak dapat dihindari dalam masyarakat multiras kecuali jika dilindungi oleh beberapa undang-undang yang diperlukan. Konflik rasial bagaikan bom waktu baginya dan penyalahgunaan ras dan masalah agama untuk tujuan politik untuk mengeksploitasi sentimen rasial dapat memicu konflik rasial.

PERDEBATAN TENTANG MAHATHIRISME

Gagasan Mahathirisme muncul melalui keunikan kepemimpinan, filosofi, dan manajemen negara Mahathir yang mendukung upaya Malaysia untuk mencapai visinya tentang status negara maju pada

tahun 2020. Menurut dua pakar politik, R.S. Milne dan Diane K. Mauzy, “Mahathirisme bukan panduan bagi pikiran atau tindakan Mahathir. Sebaliknya, pikiran dan tindakan Mahathir adalah panduan untuk membangun Mahathirisme. Mahathirisme adalah pelaksanaan mengalokasikan pemikiran ke dalam kategori logis dengan tujuan mencapai kepuasan dan pemahaman intelektual.” Lebih lanjut, almarhum Ahmad Fawzi Basri, mantan Wakil Rektor Universiti Utara Malaysia (UUM), berpendapat bahwa Mahathirisme dapat diterjemahkan ke dalam tiga konteks berikut.

1. Kebijakan publik dibuat oleh Mahathir bagi pemerintah untuk mengimplementasikan agenda baru dalam membangun negara yang maju dan stabil.
2. Strategi politik Mahathir di seluruh kepemimpinannya dalam pemerintahan dan partai.
3. Gaya kepemimpinan dalam mengelola partai dan pemerintahan.

Di sisi lain, Khoo Boo Teik, ahli politik lain, mengemukakan bahwa koherensi pandangan Mahathir benar-benar terletak pada jumlah total dari paradoks, ambiguitas, dan ketidakkonsistennya. Mahathir sebenarnya telah membangun begitu banyak gagasan berkenaan dengan nasionalisme, kapitalisme, Islam, dan demokrasi, tetapi gagasan-gagasan ini tidak berkembang dengan baik dan Mahathirisme hanyalah ideologi yang koheren untuk konteks Malaysia. Oleh karena itu, Mahathirisme dapat dirujuk ke semua pandangan Mahathir tentang politik, ekonomi, sosial, dan kebijakan luar negeri dalam membimbing Malaysia menjadi negara yang makmur dan berkembang dengan baik.

Di Malaysia, gagasan dan pemikiran “nilai-nilai Asia” juga dikembangkan oleh Mahathir Mohamad, ketika ia menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk pertama kalinya. Pada dasarnya, Mahathir memprioritaskan stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Mahathir menguraikan sudut pandang ini sebagai berikut:

Bagi orang Asia, komunitas, mayoritas adalah yang utama. Individu dan minoritas harus memiliki hak mereka tetapi tidak dengan biaya yang tidak masuk akal dari mayoritas. Individu dan mayoritas harus berbaur dengan adat istiadat masyarakat. Sedikit penyimpangan mungkin

diperbolehkan tetapi pengungkapan kebebasan pribadi yang tidak terkendali yang mengganggu perdamaian atau mengancam melemahkan masyarakat bukanlah yang diharapkan orang Asia dari demokrasi.

Tidak mengherankan, Mahathir mempertahankan catatan Malaysia tentang isu-isu yang terkait dengan praktik demokrasi—kebebasan individu, kebebasan sipil dan hak asasi manusia—bukan dengan menggunakan seluk-beluk filsafat politik, tetapi dengan artikulasi pragmatis dari dua untaian argumen yang masuk akal: penolakan terhadap kebebasan pribadi yang absolut dan penegasan kewajiban pemerintah terpilih. Kebebasan, kemerdekaan dan hak, dalam pandangan Mahathir, hanya dapat dilaksanakan atau dinikmati jika dikendalikan oleh rasa tanggung jawab pribadi, penghormatan individu terhadap pertimbangan komunal, dan penghormatan terhadap stabilitas, hukum dan ketertiban. Menurut Mahathir, penindasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan individu adalah “*check and balances* (periksa dan seimbangkan) ... dipertahankan sebagai antara hak individu dan barang publik” dengan “pemerintah saat ini menentukan apa yang merupakan barang publik”. Dengan demikian, “sementara seorang warga negara bebas ... masyarakat harus memiliki hak untuk menolak individu yang menyinggung kepekaan masyarakat”. Kebebasan berbicara dilindungi tetapi pelaksanaannya tidak dapat terwujud dalam pers yang tidak diregulasi dan tidak bertanggung jawab hanya untuk “taipan media ... yang ingin mengendalikan media di seluruh dunia”, atau “editor dan subeditor, atau wartawan atau kadang-kadang pengiklan besar, yang memiliki pandangan dan agenda politik mereka sendiri”. Adalah fungsi pers untuk melaporkan, untuk menginformasikan, bahkan untuk mengkritik, tetapi penting untuk menyadari bahwa “prinsip demokrasi tentang kebutuhan untuk mengetahui”, “kebutuhan akan transparansi”, dan “hak atas informasi” bisa jadi juga merupakan “penemuan mereka yang ingin menghasilkan uang untuk industri informasi”. Mahathir juga mencatat bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul meskipun dihormati, tidak boleh meluas ke provokasi rasial, hasutan untuk melakukan kekerasan, dan penggunaan pemogokan industri “sebagai senjata politik, yang sangat tidak berhubungan dengan hak dan kesejahteraan pekerja untuk

mendapatkan kekuatan”, atau gerakan-gerakan “terutama oleh orang asing dan organisasi non-pemerintah lainnya” untuk “mengagitasi dan mengancam Pemerintah dengan kecaman”.

DEMOKRASI DI MALAYSIA

Tidak mengherankan, Mahathir mempertahankan catatannya pada malam penampilan terakhirnya di Parlemen pada Oktober 2003 sehubungan dengan demokrasi. Dia menegaskan kembali pendapatnya bahwa kebebasan yang berlebihan dapat mengarah pada anarki dan penghancuran masyarakat multiras Malaysia. Langkah-langkah seperti penahanan tanpa pengadilan terhadap tersangka teroris dan pelarangan partai Komunis untuk berpartisipasi dalam pemilu telah ditunjukkan sebagai hal yang penting dalam menjaga demokrasi dan harmoni di negara ini. Bagi Mahathir, prioritas utama adalah memastikan bahwa sentimen rasial di negara itu tidak akan meradang. Dia menguraikan argumennya sebagai berikut:

Jika seseorang atau kelompok kecil mencoba menghasut kerusuhan (ras) mereka sebenarnya menolak demokrasi dan hak mayoritas ... Itulah sebabnya tindakan yang tampaknya tidak demokratis terhadap individu atau minoritas perlu diambil untuk melindungi demokrasi yang sebenarnya ... Anarki dapat terjadi karena obsesi terhadap demokrasi.

Shad Saleem Faruqi, seorang ahli konstitusi yang mengakui bahwa Malaysia telah mencapai tingkat toleransi yang tinggi melalui kebijakan ketat memprioritaskan stabilitas nasional, berpendapat bahwa Malaysia adalah contoh sempurna toleransi agama dan budaya. Khususnya, komunitas migran Cina dan India diberikan hak kewarganegaraan pada saat kemerdekaan. Mereka diizinkan untuk melestarikan budaya, bahasa dan agama mereka, dan kebencian terhadap kelompok minoritas sama sekali tidak diketahui. Intinya, Malaysia telah menciptakan “*a melting pot*” yang terjalin dalam mosaik budaya yang kaya. Hal ini telah menghasilkan kemunculan masyarakat yang luar biasa beragam dengan gaya hidup majemuk. Pelestarian keharmonisan antar ras tampaknya menjadi faktor legitimasi untuk menopang argumen yang mendukung

dominasi kekuasaan elite pemerintah, yang memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa organisasi politik harus menyetujui misi program yang lebih besar yakni negara yang mewakili bangsa.

PENSIUN SEMU UNTUK MAHATHIR

Sejak Mahathir pensiun dari jabatan perdana menteri pada tahun 2003, ada banyak publikasi yang mencoba melacak dan menyoroti peristiwa dan kebijakan penting dan kontroversial terutama di masa pra dan selama pemerintahan Mahathir, dan gagasannya yang mengubah masyarakat dan panggung politik di Malaysia. Tiga buku paling terkenal adalah "*A Doctor in the House: The Memoirs of Tun Dr. Mahathir Mohamad*" (2011) oleh Mahathir sendiri,

"*Doctor M: Operation Malaysia*" (2010) oleh Tom Plate, dan "*Malaysia Maverick: Mahathir Mohamad in Turbulent Times*" (2010) oleh Barry Wain. Di antara ketiga buku ini, buku Wain adalah buku yang paling kontroversial dan hampir dilarang oleh pihak berwenang Malaysia. *Doctor in the House*, yang lebih dari 800 halaman, memiliki gaya yang bervariasi. Bervariasi dalam kedalamannya juga, dengan beberapa subjek dipelajari lebih panjang dan lebih rinci daripada yang lain. Buku ini membawa pembaca ke dalam perjalanan yang sangat sedikit diketahui oleh orang di luar keluarga Mahathir: dari kenangan masa kecilnya yang paling awal; melalui peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan Malaya semasa kolonialisme Inggris, Perang Dunia, dan Kemerdekaan; hingga hidupnya sebagai dokter; perjuangan tanpa henti sebagai politisi untuk memperbaiki nasib warga negaranya; perjuangan tulus akan tujuan negaranya; ketakutan terbesarnya; dan harapannya yang paling berharga. Mahathir juga menjelaskan pandangannya mengenai masalah seperti pemecatan dan pemenjaraan Anwar Ibrahim, penangkapan Internal Security Act (ISA) di bawah Operasi Lalang, dan pandangan pribadi terhadap hukuman mati.

Sementara itu di "*Doctor M: Operation Malaysia*" (2010) oleh Tom Plate didasarkan pada serangkaian percakapan antara penulis dan Mahathir. Plate sengaja menyusun bab-bab sesuai dengan judul film

James Bond, seperti “*Dr No’ Became Dr Yes*”, “*Thunderball!*”, “*Moonraker*”, dan “*For Your Eyes Only*”. Dalam buku ini, Mahathir mengungkapkan pandangannya tentang memerintah Islam, Yahudi, Barat, dan Malaysia. Tidak banyak diskusi tentang hak asasi manusia dalam buku ini. Tetapi Mahathir tampak sangat konsisten dalam pandangannya tentang hak-hak individu dan kelompok, dengan alasan bahwa “Pikirkan dulu hak-hak dan keamanan kelompok sebelum hak-hak individu”. Dia juga berbicara tentang kebebasan beragama yang harus dipraktikkan secara bertanggung jawab ketika dia merujuk seperti dalam masalah-masalah agama Islam yang tidak memiliki toleransi formal terhadap homoseksualitas dan penistaan melalui kartun anti-Allah di surat kabar Denmark. Dia juga skeptis terhadap gagasan demokrasi dengan berpendapat bahwa: “Demokrasi adalah sistem yang baik, tetapi memiliki kelemahannya.... Anda tahu, ada batasan, dan beberapa orang tampaknya berpikir bahwa jika Anda berperang dan menjadikan negara ini-dan-itu menjadi negara yang demokratis (AS di Irak), Anda akan menyelesaikan semua masalah mereka. Itu hal yang salah untuk dilakukan. Orang harus memahami demokrasi sebelum mereka menerima demokrasi, karena kebebasan ada batasnya. Tidak ada kebebasan absolut untuk siapa pun.” Dia juga membahas banyak masalah yang sama pentingnya, seperti Rencana Ekonomi Baru (NEP), masalah *Bumiputera*, Anwar Ibrahim, Krisis Keuangan Asia, dan Amerikanisasi.

Salah satu buku paling kontroversial yang ditulis tentang Mahathir berjudul *Maverick Malaysia: Mahathir Mohamad in Turbulent Times* (2010) yang ditulis oleh Barry Wain. Dalam biografi Mahathir ini, Perdana Menteri terlama dan paling terkenal di Malaysia, menunjukkan bahwa rezim Mahathir menganut strategi pasar berorientasi ekspor, mendorong Malaysia ke dalam 20 negara dagang teratas dunia dan secara dramatis meningkatkan standar hidup rakyatnya. Selain itu, Mahathir menciptakan warisan tidak hanya berupa pertumbuhan ekonomi tetapi juga otoritarianisme, kroniisme, dan politik uang. Malaysia di bawah Mahathir bergerak dengan tegas ke arah apa yang disebut Fareed Zakaria sebagai “demokrasi iliberal” atau “semi-demokratis”, dengan patriarki atau sistem satu partai yang membuat pemilihan mereka meratifikasi

kekuasaan daripada sekedar kontes murni. Wain tidak mengatakan bahwa Mahathir secara pribadi mendapat manfaat besar dari model kapitalisme kroni yang ia biarkan berkembang. Tetapi anak-anaknya dan rekan-rekannya juga mendapat manfaat. Wain berpendapat bahwa, Mahathir secara sistematis merongrong lembaga-lembaga demokrasi untuk memastikan kekuatan politiknya yang luas tidak tertandingi. Seperti yang dikatakan Wain, ia memiliki “corak otoriter”. Mahathir menutup koran dan mengontrol dengan ketat lisensi media cetak dan penyiaran. Wain bahkan diduga mengklaim bahwa Mahathir telah menyebabkan kerugian atau menyia-nyaiakan RM100 miliar (US40 miliar pada saat itu) melalui mismanajemen, korupsi, dan skandal keuangan dengan proporsi raksasa, tuduhan yang kemudian dibantah oleh Mahathir.

Laporan Wain tentang penangkapan dan penuntutan terhadap mantan wakil Mahathir, Anwar Ibrahim, untuk kasus korupsi dan sodomi digambarkan sebagai upaya sinis Mahathir untuk menyisihkan dan mempermalukan lawan potensial politik. Dia bersedia merusak integritas sistem peradilan secara sistematis, serta secara terbuka mempermalukan mantan sekutunya, menyebabkan opini publik bergeser melawan Mahathir untuk pertama kalinya. Bagi Wain, episode ini mengungkap sifat otoriter pemerintahan Mahathir dan kebusukan institusional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di pucuk pimpinan. Dalam kasus ini, Mahathir jelas mengabaikan hak asasi manusia dalam insiden mata hitam Anwar dan perlakuan buruk selama penahanan.

MAHATHIR DALAM “NEW MALAYSIA”

Tidak dapat dipungkiri bahwa Mahathir juga berperan dalam menjatuhkan kekuasaan Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2009, pasca Pemilihan Umum ke-12 pada tahun 2008. Dia bertanggung jawab mempromosikan Najib Tun Razak dalam kekuasaan menggantikan Abdullah. Tidak lama setelah kinerja buruk partai BN dalam pemilihan umum, Abdullah menghadapi gempuran kritik, yang paling menonjol adalah mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan putranya Mukhriz Mahathir, yang secara terbuka meminta Abdullah untuk

mundur, tidak hanya sebagai perdana menteri tetapi juga sebagai presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Seruan ini dibuat untuk menyebabkan salah satu bencana pemilihan terburuk untuk BN sejak kemerdekaan Malaysia. Mahathir diikuti oleh istri dan putranya yang lain Mokhzani meninggalkan UMNO untuk memprotes penolakan Badawi untuk melepaskan posisinya di pemerintahan dan partai. Selain Mahathir, ada juga suara-suara lain di antara para pemimpin dan anggota UMNO di Sabah, Perak, Kedah, Penang, Selangor, dan Johor yang menyatakan ketidaksenangan mereka terhadap Badawi dan memintanya untuk segera mengundurkan diri atau menetapkan waktu untuk menyerahkan jabatan perdana menteri kepada wakilnya, Najib Tun Razak, yang telah ditunjuk Badawi sebagai penerusnya. Setelah tekanan terus-menerus dari pihak-pihak BN serta para pemimpin dan orang-orang UMNO, Abdullah akhirnya mengundurkan diri pada 2 April 2009 sebagai Perdana Menteri Malaysia dan Presiden UMNO dan menyerahkan kekuasaan kepada Najib.

Pola serupa terjadi ketika Najib tampil buruk dalam Pemilihan Umum ke-13 pada 2013. Mahathir, seperti dalam kasus Abdullah sebelumnya, meminta Najib untuk mundur segera setelah pemilihan umum. Alih-alih mengikuti langkah Abdullah untuk mundur, Najib menantang Mahathir yang menyebabkannya keluar lagi dari UMNO pada 29 Februari 2016. Najib juga memecat Wakilnya Muhyiddin Yassin dan putra Mahathir, Mukhriz pada 2016 setelah keduanya mengkritik Najib dalam skandal One Malaysia Development Berhad (1MDB). Keadaan ini membuat Mahathir tidak punya pilihan selain bergabung dengan oposisi melawan BN yang sangat kuat. Malaysia mengadakan pemilihan umum ke-14 (GE14) pada 9 Mei 2018 sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Malaysia. Ini adalah pertama kalinya tiga partai koalisi, yaitu Barisan Nasional (BN), Pakatan Harapan (PH), dan Gagasan Sejahtera (GS) bersaing satu sama lain untuk memerintah Malaysia selama lima tahun ke depan. Perdana Menteri Najib Razak yang memimpin BN, mengincar mandat kedua sejak 2009. Namun, ia ditantang oleh mantan mentornya dan juga Perdana Menteri terlama selama 22 tahun di Malaysia, Mahathir Mohamad. Di tengah-tengah skandal Najib, seperti

masalah 1MDB, Mahathir membentuk PH dan bekerja sama dengan mantan musuh politiknya, Anwar Ibrahim, untuk melawan Najib. Itu adalah saat Mahathir kembali dari pensiunnya pada tahun 2003. Partai politik Mahathir, PH, sebelumnya bernama Pakatan Rakyat (PR) ketika bergabung dengan Partai Islam (PAS). Namun PAS memutuskan untuk meninggalkan koalisi dan membentuk koalisi lain dengan partai-partai kecil dan sejumlah organisasi non-pemerintah karena ketidaksepakatan kebijakan tentang hukum Syariah dan persatuan Melayu. Koalisi yang dipimpin PAS bernama Gagasan Sejahtera (GS).

Hasil GE14, aliansi oposisi yang dipimpin oleh mantan penguasa Malaysia Mahathir Mohamad, yang berusia 92 tahun, memenangkan mayoritas parlemen, kemenangan mengejutkan yang mengakhiri cengkeraman kekuasaan 60 tahun koalisi BN. PH memenangkan 113 kursi—lebih satu kursi dari yang dibutuhkan untuk mayoritas sederhana—sedangkan BN mendapat 79 dari 222 anggota di parlemen. Bridget Welsh, seorang pakar Asia Tenggara di Universitas John Cabot di Roma, mengaitkan perolehan mengejutkan oposisi dengan Mahathir. Welsh berpendapat bahwa:

Orang yang membuat hal ini terjadi adalah Mahathir. Dia telah menjadi pengubah permainan yang signifikan. Dia membuat orang merasa bahwa transisi kekuasaan adalah hal yang mungkin ... Ini adalah penolakan terhadap pemerintah Najib dari semua lapisan masyarakat dari negara-negara bagian yang sangat terpencil ke pantai selatan yang lebih industrialis.

Pihak oposisi juga memenangkan pemilihan negara bagian, termasuk Johor tempat di mana dominan partai Melayu di dalam BN didirikan. Kekalahan BN dimungkinkan oleh “tsunami Malaysia”, di mana semua kelompok etnis besar memilih untuk menentang koalisi yang berkuasa, katanya. John Sifton, direktur advokasi Human Rights Watch Asia mengatakan di Aljazeera bahwa: “Tidak kurang dari gempa politik bersejarah sedang berlangsung di Malaysia saat ini.” PH yang baru telah berjanji untuk menegakkan kebebasan berbicara politik di Malaysia.

Mahathir dengan jelas mengirim sinyal bahwa ia akan menegakkan kebebasan berbicara di “Malaysia Baru” di bawah pemerintah PH.

Misalnya, Mahathir menginstruksikan polisi untuk tidak menuntut seorang pria yang menghina setelah polisi di Langkawi menangkap seorang pria dengan tuduhan menghina Perdana Menteri (Ramzy, 2018). Selama masa kampanye, PH merilis sebuah manifesto yang berjanji untuk meninjau dan berpotensi menghapus peraturan yang merusak kebebasan berbicara. Ini termasuk Sediton Act 1948, Prevention of Crime Act 1959, Prevention of Terrorism Act 2015, Communications and Multimedia Act 1998, dan Anti-Fake News Act 2018. Wakil Menteri Hanipa Maidin, di Departemen Perdana Menteri, menegaskan kembali komitmen PH untuk mencabut undangundang represif tetapi meminta kita untuk bersabar sementara pemerintah mempersiapkan reformasi yang lebih luas dalam birokrasi.

Niat pemerintah adalah untuk menghapus undang-undang kontroversial seperti Undang-Undang Anti Berita Palsu, UU Universitas dan Perguruan Tinggi (UUCA), dan Undang-Undang Tindakan Khusus Pelanggaran Keamanan (SOSMA). Tommy Thomas, yang ditunjuk sebagai jaksa agung baru Malaysia, mengatakan bahwa membatalkan “hukum yang menindas” adalah salah satu prioritas hukum pertama pemerintah. Dia secara spesifik menyebutkan hukum berita palsu dan pajak barang dan jasa nasional, menambahkan bahwa “daftar undang-undang semacam itu cukup panjang.” Thomas juga menyatakan dukungannya untuk kebebasan berbicara dengan mengatakan bahwa: “Saya senang semua orang mengkritik saya; itu bagian dari kebebasan berbicara Sebenarnya, saya lebih suka mendengarkan kritik daripada pujian.”

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah menggunakan kekuasaan untuk memblokir situs web yang melaporkan skandal korupsi 1MDB, termasuk Sarawak Report yang berbasis di Inggris dan outlet berita regional The Asia Sentinel. MCMC memutuskan untuk membuka blokir Sarawak Report and The Medium pada 17 Mei 2018. Dalam pidatonya baru-baru ini kepada Majelis Umum PBB yang ke-73 pada 28 September 2018, Mahathir telah berjanji bahwa Putrajaya akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Namun, Putrajaya tidak akan melayani hak-hak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT),

serta pernikahan sesama jenis. Mahathir mengatakan bahwa hak-hak LGBT dan pernikahan sesama jenis tetap tidak akan diterima oleh orang Malaysia, meskipun mereka diterima di tempat lain. Pada saat yang sama, pemerintah mengutuk serangan berbahaya atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok ini.

Mahathir memberikan pernyataan setelah kerusuhan di sekitar Seafield Sri Maha Mariamman Temple di USJ 25, dekat Subang Jaya, pada hari Senin 26 November 2018 dan Selasa 27 November 2018. Dia mengatakan bahwa “Tidak ada yang bisa bertindak sebagaimana orang yang suka melanggar hukum dan menyebabkan kecemasan dan kekacauan di negara ini. “ Bukan niat pemerintah untuk menghukum siapa pun secara membabi buta, tetapi demokrasi memiliki batasnya dan semua orang harus memahami batasan demokrasi ini. Mahathir menekankan lagi bahwa insiden itu tidak bersifat rasial atau agama tetapi tindakan kriminal yang tidak boleh diberikan ruang untuk merusak hubungan antar-ras di negara ini. Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap upaya provokatif serta terhadap mereka yang mencoba untuk menantang hukum negara. Mahathir mengatakan bahwa pemerintahnya telah berjanji untuk tidak membuat hambatan terhadap pelaporan berita dan komunikasi tetapi kebebasan ini harus digunakan dengan tanggung jawab penuh dan tidak untuk mengeksploitasi keadaan yang dapat menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan antar ras. Kerusuhan hari Senin pagi dan hari Selasa di dekat kuil mengakibatkan seorang pemadam kebakaran, Muhammad Adib Mohd Kassim, terbunuh, beberapa orang lain juga terluka, 23 mobil dibakar, dan harta benda publik dan pribadi rusak. Polisi telah menangkap 30 orang sejauh ini untuk membantu penyelidikan kerusuhan. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran akan ujaran kebencian dan bagaimana Malaysia bisa memiliki hukum yang tegas untuk menghilangkan ujaran kebencian.

Pada bulan Juli 2018, seorang Menteri di Departemen Perdana Menteri, Mujahid Yusof Rawa mengusulkan tiga undang-undang baru untuk mengkriminalisasi ujaran kebencian—Undang-Undang Anti-Diskriminasi, Undang-Undang Komisi Harmoni dan Rekonsiliasi Nasional, serta Undang-Undang Kebencian Agama dan Ras. Sejauh ini, belum ada

perkembangan baru untuk proposal tersebut. Pada bulan September 2018, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo menyatakan bahwa ada kebutuhan yang mendorong adanya undang-undang tentang ujaran kebencian. Dia mengatakan undang-undang seperti itu harus memiliki “jangkauan ekstra-teritorial” untuk memfasilitasi penuntutan orang yang tinggal di luar negeri. Gobind mengacu pada “komentar serban” oleh seorang blogger yang berbasis di London terhadap perwira senior Bukit Aman, Datuk Seri Amar Singh, yang ia anggap sebagai serangan terhadap, tidak hanya perwira itu, tetapi juga seluruh komunitas Sikh (Salleh, 2019).

Mahathir menyatakan bahwa media bebas untuk melaporkan bahkan jika kontennya tidak ramah kepada pemerintah. Mengamati pelaporan media sejak GE14, pers Malaysia jelas lebih terbuka sekarang daripada sebelumnya. Liputan telah diberikan kepada semua partai yang berkuasa dan oposisi meskipun media memprioritaskan pernyataan dan pesan resmi pemerintah di ruang publik. Pemerintah PH telah berjanji untuk melindungi kebebasan media di Malaysia. Sebelumnya dikenal sebagai pertarungan politis dari BN, media mainstream seperti TV3, RTM, dan New Straits Times sekarang bebas untuk melaporkan berita berimbang di seluruh spektrum politik. Sebagai contoh, Astro Awani, memiliki kebebasan untuk mengabdikan waktu tayangnya untuk menyiarkan kedua sisi ekstrem spektrum politik Malaysia, para pemimpin PH dan para pemimpin oposisi BN. Faktanya, untuk pertama kalinya, debat presiden UMNO disiarkan langsung pada Juli 2018. Jelas bahwa media *mainstream*, cetak, maupun penyiaran menjadi lebih terbuka, tidak seperti sebelumnya; kebebasan mereka dibatasi, meliput pemerintah dengan lebih baik dan meliput oposisi pada saat itu, PH, secara terbatas dan negatif.

Pemerintah PH mendesak media untuk memainkan peran kunci dalam menyediakan *check and balance*. Oleh karena itu, media dapat mempraktikkan jurnalisme investigasi untuk menangani masalah-masalah dan bebas mengungkapkan kelemahan untuk memastikan bahwa mereka yang berkuasa tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Bahkan, pemerintah PH telah berjanji untuk

menerapkan kebebasan/hak berekspresi yang mencakup perlindungan terhadap pelapor dan kebebasan untuk memberikan informasi untuk melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai penjaga kepentingan publik, pertanggungjawaban dan integritas dikedepankan demi kebaikan rakyat. Jelas bahwa kebebasan media penting di “Malaysia Baru”. Anwar Ibrahim, Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) mengatakan bahwa salah satu tantangan bagi pemerintah PH baru adalah untuk memastikan bahwa ada kebebasan media di negara ini. Anwar dalam pidatonya di Grand Dorsett Hotel pada tanggal 2 Juni 2018 menjelaskan bahwa, media harus bebas untuk menulis tentang masalah yang memengaruhi negara sehingga warga Malaysia dapat memahami langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikannya.

Dengan latar belakang singkat dari beberapa peristiwa penting dalam politik Malaysia di atas, bagian selanjutnya menyajikan dua wawancara dengan Mahathir pada tahun 2010 dan 2019. Wawancara-wawancara ini akan melacak pendapat Mahathir tentang banyak masalah terutama dalam pra dan pasca “Malaysia Baru” dimulai dengan tahun 2018. Wawancara yang pelik dan eksklusif dengan Mahathir menjadikan buku ini sangat relevan dalam memahami pemikiran Mahathir tentang masalah-masalah seperti nilai-nilai, kepemimpinan, sosial ekonomi, hak asasi manusia, agama, dan sebagainya. Kita dapat dengan jelas memahami Malaysia dari kacamata Mahathir sebagai pemimpin terlama tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di dunia.

BAGIAN 2

WAWANCARA 1: BAB 2010

Tanggal :	26 Januari 2010
Tempat :	The Tower 1, Kuala Lumpur City Center (Petronas Menara), Kuala Lumpur, Malaysia

HAK ASASI MANUSIA

Penulis: Pertanyaan pertama saya kepada Tun, apakah hak asasi manusia dalam pandangan Anda?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Hak asasi manusia tentu saja merupakan konsep baru karena masyarakat telah melewati berabad-abad di mana mereka yang berkuasa menganggap diri mereka berwenang untuk melakukan apa saja yang mereka suka kepada warga negara dan rakyat, tentu saja membunuh mereka atau memenjarakan mereka tanpa alasan yang jelas. Jadi karena itu, konsep HAM sebenarnya diredam oleh Eropa. Terutama (sebenarnya) orang-orang Yahudi dituntut di Eropa. Jadi ketika mereka dituntut tentu saja kita dipaksa untuk melakukan ini (menerima standar hak asasi manusia). Orang tidak menghormati hak asasi manusia tetapi begitu mereka menghormati hak asasi manusia maka mereka tidak bisa menuntut orang tanpa alasan. Orang-orang Yahudi dulu berada di ghetto. Mereka dulu dibantai oleh orang Eropa bukan oleh orang Asia, tetapi orang Eropa, dan karena itu para pemikir Yahudi bersama-sama dengan beberapa orang non-Yahudi mulai berpikir bahwa itu tidak benar dan ada hak-hak tertentu yang harus dimiliki setiap manusia (seperti) kebebasan dari tuntutan, kebebasan dari ketidakadilan dan hal-hal lain dan yang dianggap sebagai hak asasi manusia. Pemikiran barat adalah bahwa itu berlaku bahkan untuk individu. Namun, di Barat ketika mereka memberikan hak asasi manusia kepada individu, mereka melupakan hak masyarakat. Terkadang dalam pelaksanaan hak asasi manusia, mereka meniadakan (dan) mereka menghancurkan hak-hak masyarakat. Jadi bagi mereka individu selalu benar apa pun yang dilakukannya, itu dianggap

sebagai hak asasi manusia. Bagi kami masyarakat juga memiliki hak, karena masyarakat terdiri dari manusia yang semuanya memiliki hak, jadi bahkan jika Anda ingin menggunakan hak-hak individu Anda, itu tidak boleh mengambil hak-hak masyarakat. Pandangan kita orang-orang Asia, itulah sebabnya kita tidak bisa mendukung 100 persen konsep Barat tentang hak asasi manusia. Kita peduli pada individu, kita memiliki hak individu tetapi tidak menggunakannya terlalu jauh hingga menyangkal hak orang lain.

***Penulis:** Jadi saya pikir ada argumen terutama saat ini bahwa 'hak asasi manusia' adalah universal sehingga kemudian Anda muncul dengan ide nilai-nilai Asia, saya pikir Anda memopulerkan konsep itu, jadi menurut Anda apakah kedua ide ini kompatibel; hak asasi manusia universal dan nilai-nilai Asia secara bersamaan?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, itu adalah persepsi mereka tentang hak asasi manusia bahwa hak individu lebih unggul dari semua hak lainnya. Kita tidak bisa menerima hal itu karena masyarakat juga terdiri dari individu-individu, masyarakat juga memiliki hak-haknya. Seperti halnya masyarakat mayoritas tidak boleh merampas hak asasi individu, individu juga tidak boleh merampas hak-hak masyarakat. Di sini saya memberi Anda sebuah contoh. Di Amerika, ada orang-orang tertentu yang sangat konservatif yang tinggal di daerah pinggiran kota. Tentu saja, mereka mempertahankan standar moral yang tinggi yang juga merupakan hak mereka. Untuk mempertahankan standar moral yang tinggi itu adalah hak mereka. Sekarang, individu datang dan memasang bioskop yang menunjukkan gambar-gambar porno. Sekarang ini merusak moral anak-anak dari orang-orang ini. Mereka memiliki hak untuk menolak perusakan yang disengaja atas hak-hak mereka oleh orang-orang ini, tetapi ketika mereka pergi ke pengadilan, pengadilan memutuskan bahwa hak-hak orang-orang ini lebih tinggi daripada hak-hak masyarakat sehingga memutuskan bahwa hak masyarakat tidak penting. Yang penting adalah individu-individu ini berhak untuk benar-benar merusak moralitas anak-anak di komunitas ini.

***Penulis:** Jadi kembali ke poin yang Anda sebutkan tentang moralitas, mungkin karena kita Muslim, moralitas kita didasarkan pada Islam. Hak asasi manusia melihat moralitas berdasarkan pada rasionalitas. Mungkin cara berpikir kita tentang hak asasi manusia sedikit berbeda, jadi menurut Anda apakah Islam atau budaya memainkan peran penting dalam definisi kita tentang hak asasi manusia?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, jika setiap orang memiliki hak, maka umat Islam juga memiliki hak. Mereka memiliki hak untuk hidup seperti seorang Muslim. Dan tentu saja umat Islam telah memiliki aturan yang sangat ketat tentang kesopanan. (Seperti) Anda tidak boleh berpakaian terbuka karena itu standar moral kita mengharuskan wanita untuk berpakaian dengan benar. Pria juga harus berpakaian dengan benar, wanita harus berpakaian dengan benar, kita (wanita) harus memakai 'tudung' (kerudung), kita (wanita) harus memakai 'baju kurung' untuk menutupi seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Itulah hak mereka untuk menjalankan standar moral mereka sendiri. Tapi barangkali orang Eropa mengatakan tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda harus mengizinkan wanita untuk berjalan-jalan dengan hampir tanpa pakaian, atau dengan celana renang mereka. Bahkan di beberapa masyarakat Barat mereka berjalan telanjang. Kemudian Anda juga melihat dalam masyarakat Barat mereka telah menerima bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang diharuskan bagi semua orang. Bahwa jika Anda tidak ingin menikah tetapi Anda ingin hidup bersama, tidak apa-apa. Mereka juga telah memutuskan bahwa keluarga itu tidak terdiri dari pria dan wanita yang menikah, menikah secara resmi. Anda dapat memiliki keluarga meskipun Anda belum menikah. Anda berhubungan dengan seseorang kemudian memiliki bayi itulah keluarga, dan kadang-kadang pria hidup dengan pria, wanita hidup dengan wanita. Ini adalah hak mereka tetapi itu menyinggung hak-hak Muslim. Jadi, Anda harus menghormati hak-hak kaum Muslim untuk memiliki kode moral mereka sendiri. Jika Anda mengatakan tidak (bahwa) Anda tidak harus memiliki kode moral ini, Anda menyangkal Muslim memiliki hak untuk mempertahankan standar moral mereka sendiri. Jika Anda tidak mengizinkannya, Anda telah mengambil haknya.

Penulis: *Jadi saya pikir ada banyak orang Barat menuduh Anda sebagai anti-imperialis. Apakah Anda melihat bahwa konsep HAM digunakan oleh Barat untuk memajukan agenda imperialisme?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Orang harus bebas untuk hidup, bebas dari penindasan dan penaklukan oleh kekuatan lain. Itu adalah hak mereka. Jadi kita menemukan satu ras mengambil alih tanah ras lain, Anda menyangkal ras itu hak mereka. Jadi imperialisme tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Jika Anda percaya pada hak asasi manusia, Anda harus membiarkan mereka bebas. Setelah itu, hak mereka untuk memilih apa yang ingin mereka lakukan. Anda tidak bisa berkata oke, meskipun kamu bebas, kamu harus mematuhi ini dan itu, maka itu bukan kebebasan. Seperti yang sekarang mereka katakan baik kamu harus menerima globalisasi bahkan jika itu merusak ekonomimu, "kamu harus!" berarti Anda menyangkal haknya untuk menentukan apa yang dia inginkan. Itu melanggar hak asasi manusia.

Penulis: *Jadi secara keseluruhan, bagaimana kondisi HAM di Malaysia saat ini? Apakah lebih baik?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Saya pikir kita sudah sangat adil sejak awal. Tepat pada hari ketika Tunku Abdul Rahman memutuskan bahwa meskipun kediaman non-Melayu di negara ini tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum untuk menjadi warga negara (karena Anda diperintahkan berbahasa Melayu dan sebagainya, dia membuangnya, dan mengatakan kami memberikan kewarganegaraan kepada satu juta orang non-Melayu terlepas dari kualifikasi mereka. Anda lihat sekarang itu melampaui hak asasi manusia. Anda mengabaikan hukum Anda sendiri untuk mendukung orang Cina. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan orang Melayu menyangkal hak orang lain, Anda tahu. Orang-orang ini datang ke sini bukan karena kami mengundang mereka, Inggris mengundang mereka untuk datang ke sini. Orang India itu sama karena Inggris membawa mereka ke sini. Ini adalah tanah kami Tanah Melayu tetapi kami dengan senang hati memberi mereka satu juta kewarganegaraan. Dalam prosesnya kami mengurangi mayoritas kami dari 80% menjadi kurang dari 60%,

Anda tahu. “Siapa yang nak buat macam tu?” (Siapa yang mau melakukan ini)? Dan kemudian Anda mengatakan bahwa kami menyangkal hak asasi mereka. Di bidang lain, mereka menyangkal hak kami dalam bisnis, di universitas, di setiap bidang mereka menyangkal hak kami, Anda tahu. Namun, orang-orang Melayu tidak dapat mengatakan ini tidak adil. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi pada orang Melayu, mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka dapatkan dan apa yang orang lain dapatkan, Anda tahu.

NILAI-NILAI ASIA

Penulis: Saya ingin kembali ke ide Anda tentang nilai-nilai Asia, Apa itu “Nilai-nilai Asia” dalam pandangan Anda?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: “Nilai-nilai Asia” sedikit berbeda. Kami menerima hak asasi manusia, tetapi kami maksudkan hak asasi manusia untuk semua orang, bukan hanya satu orang. Jika satu individu ingin mengacaukan seluruh negara dengan meledakkan bom, yang menghilangkan hak-hak mayoritas, mereka ingin hidup dalam damai dan individu ingin menggunakan bom untuk menghancurkan masyarakat, itu tidak dapat diterima. Namun, Barat tampaknya berpikir bahwa siapa pun, apa pun yang dilakukan manusia adalah benar, tetapi jika masyarakat keberatan maka itu salah karena ketika orang itu melakukan sesuatu yang menyangkal hak-hak masyarakat, maka tentu saja itu juga merupakan penolakan hak asasi manusia.

Penulis: Apakah menurut Anda nilai Asia masih relevan karena saya pikir tidak ada pemimpin lain di Malaysia yang berbicara tentang nilai-nilai Asia lagi sekarang?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, saya bukan satu-satunya (*tertawa*), tidak, Lee Kuan Yew juga berbicara tentang nilai-nilai Asia. Kami memiliki nilai-nilai tertentu sehingga kami harus menahan diri, Anda tahu hanya karena Anda bebas, kita memiliki kebebasan pers misalnya, Anda tidak dapat mengatakan pada pers hal-hal buruk tentang orang

lain, berbohong di pers. Itu tidak benar karena Anda menyangkal hak orang lain. Dia mungkin tidak dapat menjawab karena dia mungkin tidak memiliki akses ke pers atau ke media. Jadi itu adalah penolakan hak asasi orang lain. Meskipun kita memiliki kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama dan lain-lain, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Begitu juga dengan Anda. Maksud saya seandainya Anda mengatakan saya berhak jika ingin berjalan ke gereja telanjang. Maka Anda telah menyinggung, mengambil hak-hak aturan gereja. Itu salah, itu adalah nilai-nilai Asia. Hormati bukan hanya satu hak manusia tetapi juga hak setiap manusia.

***Penulis:** Oke, kembali ke nilai-nilai Asia, saya pikir ada argumen atau perdebatan di mana Anda cenderung mengutamakan hak-hak tertentu daripada hak-hak yang lain. Anda memprioritaskan hak ekonomi, sosial dan budaya daripada hak sipil & politik.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Kami memprioritaskan karena hal ini digunakan untuk memberi manfaat langsung kepada orang-orang tetapi ketika Anda memiliki masyarakat sipil di mana orang-orang seperti LSM merusak hak-hak orang lain, itu yang tidak kami izinkan. Pahami, Anda dapat memiliki hak-hak Anda, Anda ingin mengambil tindakan, Anda bisa pergi ke suatu tempat yang tidak berdampak pada orang lain. Itu adalah hak Anda, tetapi Anda tidak memiliki hak untuk merongrong hak orang lain. Itulah sebabnya Anda menginginkan perdamaian dan stabilitas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan banyak orang. Ini hak mereka, Anda tahu, tetapi beberapa orang meledakkan bom seperti yang kadang-kadang Anda lihat di TV, mereka memiliki pembom bunuh diri. Maksud saya mereka melakukan hal itu dan mereka menyangkal hak-hak komunitas untuk hidup dalam damai dan melakukan bisnis untuk diri mereka sendiri, Anda tahu. Ingat, orang-orang ini juga mungkin sangat miskin ketika Anda meledakkan bom di suatu tempat tidak ada lagi orang yang datang ke tempat itu untuk membeli barang-barang dari orang-orang yang menderita ini.

Penulis: Kembali lagi ke nilai-nilai Asia, salah satu prinsip yang Anda perdebatkan adalah sebagai masyarakat multikultural seperti Malaysia, kita perlu memiliki pemerintahan yang kuat tetapi bagi kaum liberal, mereka berpendapat bahwa pemerintah harus dibatasi, jadi apa pendapat Anda tentang kedua prinsip hak asasi manusia ini?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Harus ada keseimbangan. Kami tidak menginginkan pemerintahan yang kuat, sangat kuat sehingga ia bisa melakukan apa saja yang ia suka. Dengan kata lain, dia bisa menyangkal aturan hukum. Bukan itu yang kita inginkan. Di sisi lain jika kita memiliki pemerintahan yang kuat yang karena itu terbangun masyarakat yang jauh lebih stabil, itu bagus, tetapi jika kita memiliki pemerintahan yang lemah dan banyak orang mulai membuat tuntutan-tuntutan dan berunjuk rasa dan melanggar hukum dan tidak memperhatikan aturan hukum maka tentu saja pemerintah yang lemah tidak dapat menangani situasi. Dan ketika pemerintah yang lemah tidak dapat menangani situasi ini, ia menyangkal hak asasi setiap orang karena sekarang mereka tidak dapat hidup dalam damai. Ada ketegangan. Mereka tidak dapat melakukan bisnis. Mereka tidak dapat bepergian dan terkena semua jenis risiko keamanan dan itulah yang terjadi ketika ada pemerintah yang lemah.

KEBEBASAN BERBICARA DAN KEBEBASAN MEDIA

Penulis: Oke, kembali ke pertanyaan tentang kebebasan berbicara dan kebebasan media yang baru saja Anda sentuh. Sekarang kita beralih ke blogger. Jadi, apakah Anda pikir kita masih akan mempertahankan kebebasan di dunia maya saat ini. Anda tahu, ada banyak persepsi saat ini terutama dari pemerintah bahwa blogger cenderung memanipulasi banyak hal dan segala hal? Jadi apa pendapat Anda?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, di sini, apa yang terjadi dengan blogger adalah bahwa mereka tidak memiliki akses ke media *mainstream*. Itu adalah penolakan hak-hak mereka. Jadi beralih ke Internet di mana mereka bisa mengekspresikan diri. Meskipun mereka dapat mengekspresikan diri mereka sendiri, mereka tidak harus berbohong

untuk merusak keamanan negara. Anda tahu seandainya orang itu menulis; kami memiliki informasi bahwa seseorang akan meledakkan bom di pasar. Itu adalah penolakan hak asasi orang lain karena itu tidak benar, jadi Anda tidak dapat menyalahgunakan hak Anda. Kita memiliki hak untuk mengatakan yang sebenarnya untuk memperdebatkan kasus ini. Anda tidak memiliki hak untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar untuk membuat masalah karena jika kita memiliki masalah maka orang lain kehilangan haknya. Bahkan hak untuk berunjuk rasa misalnya, Anda memiliki hak untuk melakukan demonstrasi tetapi Anda juga harus ingat bahwa ketika Anda berunjuk rasa orang lain menderita. Masyarakat awam menderita. Banyak dari mereka berbisnis jalanan kemudian Anda melakukan demonstrasi setiap hari. Anda mengambil hak orang-orang yang melakukan bisnis ini. Sekarang mereka tidak dapat melakukan bisnis sehingga hak siapa yang lebih penting? Anda ingin melakukan demonstrasi, Anda pergi ke lapangan dan berdemonstrasi di sana maka Anda tidak mengambil hak orang lain. Tetapi ketika Anda berdemonstrasi di jalan-jalan terutama ketika Anda melakukan kekerasan maka tentu saja Anda menyangkal hak-hak orang lain yang berusaha mencari nafkah di jalan.

Penulis: *Tetapi mereka bisa berdebat bahwa mereka tidak mendapatkan izin untuk mengadakan demonstrasi seperti itu sehingga mereka pergi ke jalan-jalan?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Jika Anda tidak mendapatkan izin, hal yang harus dilakukan dalam demokrasi adalah Anda berkampanye, Anda dapat berkampanye tidak hanya dengan demonstrasi, berkampanye dengan cara lain dan mencoba menjatuhkan pemerintah, mengubahnya dan membuat pemerintah yang lain.

TAJUK MENUJU SISTEM DUA PARTAI

Penulis: *Jadi sekarang saya pikir sejak pemilihan umum 2008, ada kecenderungan di antara orang-orang untuk menuntut lebih banyak hak-hak sipil dan politik, bahkan beberapa berpendapat mungkin kita sedang*

menuju sistem dua partai. Jadi apa pendapat Anda tentang masa depan atau bahkan Malaysia saat ini?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Memang benar mereka berhak untuk menuntut tetapi efeknya bagi pihak lain juga untuk membuat tuntutan dan itu menimbulkan ketegangan. Ketika Anda menciptakan ketegangan tentu saja stabilitas negara menjadi kacau dan ketika stabilitas negara kacau, semua orang menderita. Anda kehilangan hak untuk hidup dalam damai. Jadi, jika Anda memiliki tuntutan, Anda harus bernegosiasi dengan damai dan tidak mulai membuat tuduhan yang tidak bertanggung jawab. Sebagai akibatnya, beberapa tanggapan balasan oleh pihak lain yang kemudian menimbulkan konfrontasi, ketegangan dan bahkan kekerasan. Maksud saya, yang pada tahap itu tentu saja Anda merusak seluruh negara dan orang-orang tidak dapat hidup dalam damai dan mereka tidak dapat melakukan bisnis mereka sendiri dan mencari nafkah. Sampai tahap itu, kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki hak untuk merusak seluruh negara.

Penulis: Jadi, apakah menurut Anda kita sedang menuju ke sistem dua partai?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Saya tidak tahu apakah ini sistem dua partai karena sistem partai ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Anda tahu, hanya karena kita memiliki sistem dua partai, tidak berarti bahwa akan ada hak asasi manusia. Kita telah melihat negara-negara yang menggunakan sistem dua partai tidak mengizinkan hak asasi manusia di banyak bidang. Bukan sistem dua partai yang akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, melainkan kualitas kepemimpinan yang kita pilih.

REFORMASI HUKUM DAN KEAMANAN NASIONAL

Penulis: Jadi hal-hal lain yang diperdebatkan oleh banyak aktivis hak asasi manusia adalah bahwa selama kita memiliki undang-undang seperti Internal Security Act (ISA), Official Secret Act (OSA), the Printing Presses

and Publications Act (PPPA) dan sebagainya, kita masih belum memiliki hak asasi manusia di Malaysia. Jadi, apakah menurut Anda mungkin kita perlu menghapus, mencabut, atau mengubah hukum?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Kita memiliki undang-undang, jadi ketika pemerintah menggunakan hukum, berarti itu masih merupakan aturan hukum. Undang-undang mengizinkan pemerintah untuk menahan seseorang sebelum dia melakukan kejahatan karena setelah dia melakukan kejahatan, dia telah menyebabkan banyak masalah. Menghentikannya sudah tidak berguna lagi meskipun mungkin memakan biaya tetapi kejahatannya sudah dilakukan. Itulah Malaysia. Sekarang bandingkan dengan Inggris dan Amerika, mereka tidak memiliki hukum seperti itu, tidak ada ISA, tetapi ketika mereka diserang oleh teroris atau setidaknya mereka mengaku diserang oleh teroris, mereka menahan lebih banyak orang tanpa manfaat hukum. Mereka tidak dapat melihat kami menahan Anda karena hukum mengizinkan kami untuk menahan Anda. Mereka hanya menahan orang tanpa manfaat hukum. Oleh karena itu, mereka tidak berkuasa sesuai dengan hukum, namun mereka telah melakukan ini. Dan karena itu mereka lebih buruk dari kita. Kami (pemerintah) memerintah menurut hukum kami. Mereka (pemerintah Barat) belum memiliki hukum namun mereka menahan, bukan satu, dua, tetapi ribuan orang. Dan tidak hanya itu Kongres mereka, Kongres Amerika, sebenarnya mengesahkan untuk memungkinkan penyiksaan terhadap para tahanan yang telah ditahan. Penyiksaan jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Kita tidak bisa menyiksa orang. Kita bisa menahan orang tetapi tidak bisa menyiksa mereka. Jadi mereka (orang Amerika) lebih buruk dari kita. Kita memiliki undang-undang dan jika Anda tidak menginginkan undang-undang maka ada parlemen. Parlemen bisa mengatakan kita tidak menginginkan ini. Tetapi selama parlemen tidak menghapuskan hukum, hukum tetap ada sehingga kami bertindak sesuai dengan hukum. Kita harus lebih baik daripada Inggris atau AS karena mereka bertindak sebelum mereka memiliki undang-undang untuk mengizinkan mereka menahan orang. Jadi mereka melanggar, tetapi tidak benar-benar melanggar hukum karena tidak ada hukum. Mereka melanggar prinsip-prinsip aturan hukum.

Penulis: Jadi saya bawa kembali ke ISA. Argumennya adalah mengapa ketentuan yang memungkinkan untuk penahanan tanpa pengadilan melanggar HAM. Apakah itu sepenuhnya dapat diterima dalam konteks hak asasi manusia universal. Selain itu, ada juga masalah kekuatan menteri dalam negeri untuk ditahan, jadi menurut Anda apakah ini harus dipertahankan atau harus ditinjau atau tidak?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ini adalah hukum preventif. Hukum pencegahan berarti bahwa Anda mengambil tindakan sebelum kejahatan dilakukan. Sekarang Anda melihat seorang pria akan menusuk pria lain tetapi dia belum menusuk tetapi Anda tahu dia akan menusuknya. Apakah Anda mengatakan tunggu, saya hanya akan bertindak terhadap Anda, setelah Anda menikam saya. Jadi sungguh (dengan) tindakan pria itu mati, tapi itu tidak cukup. Segera Anda harus dapat bertindak ketika dia mencoba membunuh seseorang. Dia jelas akan membunuh orang itu sekarang ini kasus kita. Kita menahan orang karena kita pikir mereka akan membuat kerusuhan di negara ini. Mereka menciptakan masalah keamanan di negara ini. Itulah pandangan kita. Sekarang dalam kasus Amerika, Amerika ingin menyerang suatu negara sebagai tindakan *pre-emptive* yaitu sebelum ada serangan terhadap Amerika. Amerika akan menyerang karena mereka berpikir (bahwa) mungkin ada serangan. Itu yang terburuk (karena) mereka siap untuk membunuh orang karena mereka berpikir bahwa mungkin orang ini akan menyerang. Dan mereka telah melakukan ini pada ratusan ribu orang. Jadi perang *pre-emptive* adalah jenis tindakan *pre-emptive* terburuk yang bisa diambil. Dalam kasus kita, kita memiliki hukum *pre-emptive* yang mencoba mencegah kejahatan terjadi karena ada tanda-tanda bahwa kejahatan ini akan dilakukan. Bahwa mereka akan merusak stabilitas negara ini. Jadi kita punya hak untuk menyerang mereka, untuk menahan mereka. Beberapa kasus seperti distribusi narkoba. Sulit menemukan bukti yang cukup untuk menghukum orang tersebut. Jadi jika Anda pergi ke pengadilan, pengadilan mengatakan bahwa kami tidak memiliki banyak bukti tetapi kami tahu bahwa pria ini terlibat dalam distribusi narkoba. Dan kita harus menghentikannya sehingga mereka ditahan di bawah ISA sebagai tindakan pencegahan. Jadi itu cukup dibenarkan. Sebelum dia melakukan

kejahatan atau jika Anda tahu dia melakukan kejahatan itu Anda tidak dapat menemukan bukti untuk membuktikannya tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah orang-orang yang telah mendistribusikan obat-obatan. Tidak ada yang maju untuk menjadi saksi karena mereka takut. Anda tahu jika Anda menjadi saksi Anda mungkin akan dibunuh Jadi dalam keadaan seperti itu, kita menggunakan hukum pencegahan. Kita bertindak sebelum atau tanpa cukup bukti untuk membawanya ke pengadilan. Jadi ini adalah beberapa tahanan di Malaysia, mereka bukan tahanan politik. Mereka adalah risiko keamanan sehingga mereka harus ditahan. Tapi dalam kasus Barat, hanya karena mereka membayangkan sebuah negara kecil, negara yang sangat lemah dan akan menyerang Amerika, yang itu tidak masuk akal, mereka segera bertindak dan membunuh orang, untuk menghentikan perang yang belum terjadi.

***Penulis:** Mungkin alasan untuk mempertahankan hukum seperti ISA adalah untuk melindungi keamanan nasional kita. Saya pikir SUHAKAM mengeluarkan satu laporan mungkin tahun 2002 atau 2003, menyebutkan bahwa kita benar-benar mendukung atau memberikan lebih banyak perhatian pada keamanan nasional daripada hak asasi manusia. Kemudian SUHAKAM berpendapat bahwa kita perlu menyeimbangkan antara keduanya. Jadi, apakah Anda tahu bagaimana menyeimbangkannya?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Keamanan nasional adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Anda tahu, orang-orang ini akan melakukan sesuatu yang kejam yang merupakan serangan terhadap keamanan. Ketika kita memastikan ada keamanan kita melindungi banyak orang lain dari kehilangan, kehidupan dan hak mereka untuk hidup dalam situasi aman, untuk hidup damai karena orang-orang ini mengancam untuk bertindak dengan kekerasan. Jadi seperti biasa kita memprioritaskan hak-hak mayoritas daripada hak-hak satu individu.

SOSIAL-EKONOMI DAN KEBIJAKAN EKONOMI BARU (NEP)

***Penulis:** Baiklah, sekarang kita beralih ke masalah yang sedikit berbeda yaitu tentang hak atas pembangunan. Jadi saya pikir kita sudah tahu*

bahwa Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) mungkin adalah kebijakan yang mencoba untuk memberantas kemiskinan dan untuk memperbaiki atau merestrukturisasi masyarakat kita. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa misalnya dengan demonstrasi HINDRAF mengklaim orang India telah terpinggirkan. Beberapa juga berpendapat bahwa ada indikasi bahwa, NEP tidak mendistribusikan kekayaan bangsa di antara ras secara merata.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Anda lihat ini dulu. Anda menyebutkan HINDRAF tadi. Anda tahu mereka ditolak haknya karena mereka dipinggirkan. Bagaimana situasi sebelum NEP, orang-orang Melayu (dan) penduduk asli terpinggirkan. Anda ingin masuk ke bisnis Anda harus berurusan dengan Cina. Orang Cina punya jaringan sendiri dan mereka tidak akan membantu Anda. Kita lihat bagaimana orang-orang bisnis Cina memperlakukan kontraktor Melayu. Andaikata mereka ingin membangun sebuah gedung, cenderung bangunan 50 lantai, orang Melayu tidak akan pernah mendapatkan apa pun dari itu. Orang Cina bisa. Jadi pemerintah harus memperbaiki ketidakseimbangan dengan memberi orang Melayu kesempatan, jadi kelihatannya pemerintah lebih menyukai orang Melayu tetapi itu karena orang Cina tidak memberi kesempatan kepada orang Melayu. Jadi kita harus membuat koreksi bahwa perkembangan mereka tidak terpaut begitu jauh. Hari ini jika Anda melakukan survei, Anda membuat total audit kekayaan, Anda akan menemukan bahwa orang Cina jauh lebih kaya daripada orang Melayu. Anda tahu, jadi kita perlu memiliki pemerintah untuk membantu orang Melayu mengejar ketertinggalan dari orang Cina. Tetapi jika orang Cina mau mempekerjakan orang Melayu sebagai manajer mereka, berikan kontrak kepada orang Melayu dan tidak dianggap sebagai (apa yang telah mereka praktikkan) sekarang. Mereka bahkan beriklan di koran, Anda harus berbahasa Mandarin agar mereka mempekerjakan Anda. Itu diskriminasi terhadap orang Melayu, jadi bagaimana Anda memperbaiki diskriminasi itu. Ini adalah diskriminasi terang-terangan namun Anda tidak membicarakannya. Anda lihat ini karena diskriminasi oleh Cina terhadap Melayu. Pemerintah harus mendiskriminasi demi orang Melayu. Jika pemerintah tidak membedakan orang Melayu, mereka tidak memberi kesempatan pada orang Melayu. (Jika) Sektor swasta tidak memberi kesempatan pada orang

Melayu, mereka akan jatuh sepenuhnya. Andaikata mereka mengambil beasiswa, nah banyak orang Melayu yang mendapat pendidikan karena beasiswa. Andaikata kita pergi sepenuhnya berdasarkan prestasi, sebagian besar orang Melayu memenuhi syarat untuk kuliah, mereka memiliki kualifikasi minimum bahkan lebih dari kualifikasi minimum tetapi mereka bukan siswa terbaik. Kami hanya mengambil siswa terbaik dan orang Melayu tidak akan pernah terpilih. Jadi kami melakukan diskriminasi karena kami ingin mengurangi kesenjangan dalam kekayaan orang Melayu dan Cina karena jika kita terus bersikeras pada apa yang pantas, misalnya, ketika Anda terus bersikeras, tentu saja perbedaan itu merupakan penolakan akan hak asasi manusia.

***Penulis:** Argumennya adalah bahwa bahkan jika kita memiliki pembangunan di Malaysia, kelompok sasaran yang seharusnya kita dukung seperti orang miskin dari daerah pedesaan, tidak menerima pembangunan yang dijanjikan pemerintah. Sebenarnya, perkembangannya tidak terjadi. Kekayaan bangsa didominasi oleh beberapa orang yang memiliki hubungan dekat dengan para elite. Hanya sejumlah kecil orang yang mendapat manfaat dari NEP?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Itu adalah sesuatu yang dimasukkan ke pikiranmu oleh orang lain. Jika Anda perhatikan dengan cermat, orang miskin diuntungkan oleh NEP. Jika Anda pergi ke suatu Kampong di Malaysia, Anda akan melihat jalan, jalan aspal. Anda melihat persediaan air. Sebelum ini, (tidak ada) persediaan air. Anda melihat listrik di mana sebelumnya tidak ada listrik di desa-desa. Dan Anda melihat anak-anak orang kampung dapat pergi ke universitas bahkan universitas di AS juga. Anda membuat studi (bahwa) sebagian besar orang-orang yang mendapatkan beasiswa adalah anak-anak dari Kampong, orang-orang Kampong. Berapa banyak kroni yang didapat dari (beasiswa) pemerintah? Tidak banyak, tetapi jumlah anak yang mendapat beasiswa mencapai ribuan setiap tahun dan kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin. Jika Anda melihat latar belakang dari banyak orang Melayu yang berpendidikan, Anda akan menemukan bahwa mereka berasal dari keluarga miskin dan belum terhubung dengan perdana menteri mana pun. Dan ini adalah sesuatu yang telah Anda pikirkan karena tanpa berpikir

telah mengatakan hal yang sama. Dan bahkan melihat jumlah orang Melayu yang telah berhasil dalam bisnis. Semua orang tahu bahwa kami memberikan banyak kontrak, banyak lisensi, banyak AP untuk banyak orang, tetapi beberapa orang ini tidak melakukan bisnis. Mereka berjualan, jadi kita harus berhenti memberi mereka. Tetapi kami memberikan kepada mereka (yang) benar-benar menggunakan kontrak mereka, AP, lisensi mereka dan benar-benar menggunakan lisensi mereka dan semua itu untuk melakukan bisnis. Jadi mereka menjadi kaya. Yang lain tidak. Mereka tidak menjadi kaya karena menjual semua yang Anda berikan kepada mereka dan Anda ingin mengatakan ini kroni? Yah, pertama-tama orang-orang ini, mereka pantas menjadi kaya karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya, untuk memanfaatkannya. Kedua, dalam komunitas kecil di tengah-tengah orang Melayu hampir semua dari mereka mengenal seseorang di pemerintahan. Orang-orang yang juga tidak berhasil. Mereka banyak yang mengenal menteri dan perdana menteri tetapi tidak berhasil. Tapi Anda tidak melihat mereka karena Anda fokus pada beberapa orang yang berhasil dan mengatakan ini adalah kroni pemerintah. Dengan kata lain, untuk dituduh bahwa Anda hanya membantu kroni Anda, Anda harus memastikan setiap orang Melayu gagal. Ketika setiap orang Melayu gagal, orang mengatakan ini sangat baik karena mereka bukan kroni pemerintah, tetapi bagaimana Anda melihat NEP menjadi sukses jika orang Melayu hanya berada di dalam (kelompok) berpenghasilan rendah dan orang kaya semuanya orang Cina, jadi Disparitas ada di sana. Jadi sekarang NEP ingin meratakan bukan hanya dengan yang miskin tetapi juga yang kaya. Jika orang Cina memiliki miliarder, orang Melayu juga harus memiliki miliarder, jika orang Cina adalah pemilik toko, maka orang Melayu juga harus menjadi pemilik toko. Anda melihat itu baik bagi mereka untuk menjadi pemilik toko, atau menjadi pegawai di sekolah. Dia tidak boleh muncul. (Jika) Dia muncul, dia pasti kroni. Anda lihat, itu tuduhannya. Saya tidak tahu sebagian besar orang yang telah berhasil. Saya tidak tahu sama sekali. Tentu saja setelah mereka berhasil saya mengenal mereka. Saya juga tidak mengenal orang Cina (taipan bisnis) karena mereka berhasil sehingga mereka menjadi Tan Sri. Dan apa yang Anda lihat, sehingga orang-orang Melayu ini begitu mudah menerima kesan bahwa mereka adalah kroni

para menteri, bukan begitu. Dalam keluarga saya, anak-anak saya sendiri tidak pernah memiliki kesempatan ketika saya menjadi Perdana Menteri. Hanya setelah saya mengundurkan diri, mereka mendapat kesempatan untuk terjun ke dunia politik atau berbisnis, sebelumnya mereka tidak mau berbisnis. Tetapi (mereka) tidak (berbisnis) dengan pemerintah. Bahkan sekarang mereka tidak melakukan bisnis di pemerintahan. Tetapi orang-orang masih akan melihat, dia mendukung anak-anaknya. Tapi apa yang sebenarnya. Jika saya pernah dipromosikan, saya bisa mempromosikan putra saya untuk menjadi seorang menteri tetapi tidak saya lakukan, jangankan (menjadi) menteri, bahkan wakil menteri atau sekretaris parlemen. Anda lihat, jadi Anda telah dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin menuduh NEP tidak adil, itu tidak mencapai tujuannya karena hanya kroni. Tetapi ribuan orang Melayu, dokter, pengacara, dan insinyur, apakah semuanya berasal dari keluarga kaya?

Penulis: *Saya sebenarnya adalah salah satu produk NEP.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Di mana ayahmu bekerja?

Penulis: *Ayah saya adalah seorang guru.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Guru, apakah dia kenal perdana menteri?

Penulis: *Ya.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Hah? Ayahmu kenal dengan Perdana Menteri. Apakah itu sebabnya Anda mendapat beasiswa?

Penulis: *Tidak.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Nah! Itu artinya Anda memiliki kemampuan. Anda lihat dalam pemeriksaan beberapa orang mendapatkan nilai bagus, beberapa orang akan gagal, beberapa orang akan lulus tetapi tidak di nilai teratas. Kita harus membantu orang-orang ini juga, jika tidak, kita berikan begitu saja ke yang teratas. Orang-orang ini tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk naik, dan kemudian kita tidak akan

membaik karena orang-orang ini. Oh ya, NEP itu baik, artinya membantu orang Melayu tetapi itu hanya terjadi pada kroni. Jadi ketika Anda melihat orang Melayu berhasil, maka itu adalah kroni, tidak masalah apakah dia dikenal oleh perdana menteri atau tidak. Dia berhasil, jadi dia adalah kroni, tetapi ketika orang Cina berhasil yang merupakan teman perdana menteri yang bukan kroni karena dia orang Cina. Anda lihat, tetapi saya punya teman, Tan Sri Vincent Tan, Tan Sri Teh Hong Piow dan mereka semua, mereka semua berhasil karena mereka memiliki kapasitas untuk berhasil. Dan tentu saja jika mereka dapat melakukan sesuatu, kami tidak dapat menyangkal. Jika kita dapat melakukan sesuatu yang orang Melayu tidak bisa lakukan, mereka dapat melihat semua karena mereka bukan orang Melayu, itu salah. Tetapi kita harus membantu memperbaiki ketidakseimbangan (seperti) di universitas. Pada awal peran saya sebagai Perdana Menteri, tidak ada universitas swasta, hanya universitas pemerintah. Dan tentu saja kami ingin memperbaiki ketidakseimbangan, kami harus memberikan lebih banyak beasiswa kepada orang Melayu tetapi mereka (orang Cina) juga mendapatkan beasiswa. Mereka tidak ditolak tetapi hari ini kami memiliki 30 universitas negeri, 30 universitas swasta. Pernahkah Anda memeriksa universitas swasta?

Penulis: *Tidak.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Anda harus memeriksa 90 persen siswanya bukan Melayu.

Penulis: *Ya, itu benar.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Itulah kenyataannya, mengapa Anda tidak mengeluh, mengapa Anda memiliki 90 persen orang non-Melayu? Anda harus mengurangnya dan memberikan beberapa tempat kepada orang Melayu. Mengapa 'di sini dah banyak, di sini kita ada pun dia ambil' (di sana, di universitas swasta, mereka, yang bukan Melayu, punya banyak tempat, tetapi, di sini mereka juga menginginkan tempat kita, di universitas negeri). Jadi apa yang kita dapat? Apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Itu sama dalam bisnis. Kami memberikan kontrak kepada

kontraktor Melayu dari pemerintah sehingga di sektor swasta kontraktor Melayu tidak bisa mendapatkan apa-apa, tidak bisa mendapatkan sama sekali. Untuk memasok semen (dalam konstruksi) 'pun dia tak bagi Melayu, dia bagi Cina' (juga diberikan kepada orang Cina, bukan Melayu). 'Dia takda' (Tidak ada) transparansi, mereka tidak mempertanyakan. Apakah Anda tahu berapa banyak Hong Leong memberikan kontraknya? Apakah Anda tahu berapa banyak Vincent Tan memberikan kontraknya, bagaimana dia melakukannya? Apakah ada tender? Tidak, bahkan jika ada tender, mereka mendukung rakyat mereka sendiri tetapi mengapa kita tidak pernah mempertanyakan itu. Anda tahu mengapa kita tidak mempertanyakan itu. Mengapa mereka melakukan diskriminasi terhadap orang Melayu. Kamu ingin tahu. Di sini mereka akan mengatakan (bahwa mereka) tidak membeda-bedakan kami, orang Melayu. Tidak mampu itu adalah hal yang berbeda tetapi kenyataannya adalah bahwa orang Melayu bahkan tidak mengganggu tender untuk proyek Cina karena mereka tidak akan mendapatkannya. Mengapa itu tidak disorot? Apa yang pemerintah coba untuk koreksi adalah apa yang terjadi di sektor swasta. 'Kalau pemerintah pun tak mau di sini pun tak bisa apa jadi' (Jika pemerintah tidak memberi kepada orang Melayu, lalu apa yang akan terjadi)? Saya minta maaf harus mengatakan ini, tetapi orang Melayu 'bila dia' (ketika mereka) fokus pada pemerintah, tak ya, jangan sapa, kita dapat 60% '(tidak adil untuk mendapatkan 60%)'. Maksud saya, kita menghasilkan 60% dari populasi, kita telah memutuskan bahwa hanya 30% dari kekayaan atau kekayaan korporasi yang harus dimiliki orang Melayu. Kami hanya meminta setengah, mereka (Cina) sekarang sudah hampir (mendapatkan) 50%. Mereka 30% pada awalnya, sekarang, mereka (mendapatkan) 50% dari kekayaan perusahaan. Jadi 'kita dah tinggal ke belakang' (kami telah meninggalkannya), namun ada orang Melayu mengatakan 'tak cewek kita buat niaya kat Cina' (kita tidak boleh mendiskriminasi orang Cina). 'Okelah, kamu tidak usah ambil lah' (Oke, kamu tidak harus mendapatkan kontrak atau kekayaan). Orang-orang, yang mengatakan itu, adalah orang-orang yang telah menerima beasiswa. Anda harus menyerahkan beasiswa Anda. Anda harus memberikan kembali '*sijil*' Anda (sertifikat atau gelar) dan mengatakan bahwa maaf

saya tidak ingin memiliki ini karena tidak adil untuk memberikan ini kepada saya dalam pendidikan ini. Saya ingin kembali menjadi buruh seperti ayah saya. Anda ingin mengatakan itu.

1 MALAYSIA, PENDIDIKAN DAN PERSATUAN NASIONAL

Penulis: Jadi sekarang Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengeluarkan konsep 1Malaysia. Jadi, apakah Anda pikir dia bisa meratifikasi beberapa hal yang Anda sebutkan?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, hal pertama yang harus diperbaiki adalah (kita) hanya memiliki satu sekolah.

Penulis: 'Sekolah Wawasan' (sekolah visi)?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: (Ya) karena kami ingin menyatukan masyarakat. Setelah Anda memiliki tiga sekolah (bahasa daerah), Anda tidak dapat menyatukan orang. Setelah Anda mengizinkan tiga bahasa berbeda sebagai media pengajaran, maka Anda tidak dapat berbicara satu bahasa nasional. Di setiap negara di dunia termasuk negara maju hanya ada satu sistem sekolah. Di dunia berbahasa Inggris mereka memiliki penutur bahasa Inggris dan jika itu dalam bahasa Jerman maka itu adalah bahasa Jerman sebagai media pengajaran. Di Amerika, bahasa Inggris adalah media pengajaran. Pemerintah (Amerika) tidak membayar sekolah yang mengajar dalam bahasa lain. Jika Anda orang Cina di sana, Anda berkata baik Anda harus mendirikan sekolah bagi saya untuk mengajar dalam bahasa Mandarin (tidak mungkin itu terjadi). Tapi di Malaysia kita sangat dermawan. Kita tidak hanya mengizinkan bahasa Cina dan India sebagai bahasa pengantar, kami benar-benar membayar mereka untuk mendirikan sekolah. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan kami menyangkal hak asasi manusia? Anda lihat kami memberi melebihi apa yang orang lain berikan. Anda tahu di Indonesia? Tidak mungkin mereka memiliki sekolah Cina, bahkan di Thailand tidak ada sekolah Cina, Filipina tidak ada sekolah Cina. Namun Indonesia memiliki lebih banyak orang Cina, dalam hal jumlah, dalam hal persentase rendah, dan

dalam hal jumlah mereka memiliki lebih dari kita. Sama halnya dengan Filipina, sama halnya dengan Thailand. Thaksin (Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand) adalah orang Tionghoa tetapi dia tidak dapat membuka sekolah Tiongkok, tetapi dia adalah orang Thailand, ia berbicara bahasa Thailand.

***Penulis:** Jadi mungkin konsep 1Malaysia itu, apakah menurut Anda konsep ini mirip dengan konsep atau slogan lain yang dulu kita miliki seperti Malaysia Boleh (Malaysia Bisa) dan juga konsep ini bisa membawa kemakmuran ke Malaysia?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya bisa, jika bisa diimplementasikan seperti yang saya katakan, tetapi tidak bisa diimplementasikan. Itu adalah tujuan atau target mungkin sepuluh tahun dari sekarang (atau) lima puluh tahun dari sekarang Anda mungkin menjadi 1 Malaysia. Itulah target kita sekarang. (Namun) Anda mengizinkan sekolah-sekolah Cina mengajar dalam bahasa Cina, Anda mengizinkan sekolah Tamil dan tentu saja anak-anak dari orang-orang yang memutuskan bahwa Anda harus memiliki tiga bahasa ini, tidak mengirim anak-anak mereka ke 'Sekolah Kebangsaan' (Sekolah Nasional).

***Penulis:** Tetapi mereka juga berpendapat bahwa itu adalah hak mereka untuk memiliki sekolah mereka sendiri, sekolah Cina dan India?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Mengapa mereka memiliki hak? Ketika orang Tionghoa di Indonesia, warga negara Indonesia, tidak memiliki hak, orang Tionghoa di Filipina tidak memiliki hak, orang Tionghoa di Australia tidak memiliki hak orang Tionghoa di Selandia Baru tidak memiliki hak. Setelah Anda menjadi orang Australia, Anda berbicara bahasa Inggris, segera Anda akan melupakan bahasa ibu Anda sendiri. Dan Anda pergi ke sekolah bahasa Inggris, Anda tidak mempertanyakan mengapa Anda mengajar saya dalam bahasa Inggris, saya orang Cina, ajar saya dalam bahasa Mandarin. Pernahkah Anda mendengar mereka memprotes? Di Amerika, apakah Anda pernah mendengar mereka memprotes mengapa mandarin tidak digunakan di sekolah, sekolah

negeri? Bahkan bukan sebagai bahasa kedua. Anda tahu Anda tidak dapat memiliki hak. Anda tidak memiliki guru untuk mengajar Anda bahasa Mandarin, 'takda' (Anda tidak). Jadi mengapa Anda mengatakan itu adalah hak mereka karena mereka ada di sini?

***Penulis:** Jadi begitu. Terima kasih banyak Tun untuk wawancara ini.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Terima kasih kembali.

WAWANCARA 3: BAB 2019

Tanggal :	11 Maret 2019
Tempat :	Kantor Perdana Menteri, Putrajaya, Malaysia.

PERDANA MENTERI UNTUK KEDUA KALINYA

***Penulis:** Tun, kami memiliki tiga jenis pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Anda. Satu adalah pertanyaan umum, kedua lebih spesifik untuk pendidikan dan kemudian beberapa pertanyaan tambahan yang ingin kami tanyakan kepada Anda. Pertanyaan pertama yang terkait dengan Anda sebagai Perdana Menteri, jadi sekarang Anda menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya. Anda telah menjadi Perdana Menteri sebelumnya. Jadi, meskipun tidak adil bagi kami untuk bertanya kepada Anda seberapa berbeda antara yang pertama dan kedua, tetapi tentu saja kami perlu Tun untuk menjawab bagaimana perasaan Anda mengelola negara di kedua kalinya dibandingkan dengan yang pertama, dalam hal tantangan dan lainnya?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Pertama kali ketika saya menjadi Perdana Menteri, saya berasal dari pemerintah saat itu. Saya seorang *trainee*, saya sudah di pemerintahan sebagai wakil dan sebelum itu sebagai Menteri. Administrasi negara tidak memiliki banyak masalah. Jadi, cukup mudah bagi saya untuk mengemban jabatan, kemudian mempromosikan ide-ide tertentu yang saya miliki dan memberitahukan kepada kabinet, kabinet setuju dan kemudian diimplementasikan. Tidak ada masalah. Semuanya berada di tempatnya. Tidak ada halangan besar tetapi kali ini sangat berbeda. Saya berasal dari partai oposisi dan saya mengganti pemerintahan yang ada saat itu dan pemerintahan itu sudah ada selama 60 tahun. Segera Anda memiliki masalah perubahan struktur kekuasaan di negara ini. Kami menemukan bahwa pegawai negeri sipil terbiasa dengan pemerintahan sebelumnya dan merasa sulit untuk menerima

(pergantian pemerintah). Orang-orang yang menentang pemerintah sebelumnya juga menentang pegawai negeri. Jadi kerja sama mereka menjadi masalah yang harus kita menangkan. Tentu saja beberapa dari kita harus mengambil tindakan terhadap siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang merugikan bangsa, untuk menyingkirkan mereka. Jadi pertama-tama kami menemukan bahwa mesin-mesin penggerak pemerintah tidak terlalu maju dalam mendukung pemerintah. Mesin pemerintah telah mendukung pemerintah sebelumnya selama enam puluh tahun. Sekarang mereka akan mendukung pemerintah yang berasal dari oposisi. Meskipun menurut demokrasi, pegawai negeri harus tetap netral, harus menerima kebijakan dan tindakan pemerintah saat ini. Tetapi bagaimanapun juga itu tidak mudah bagi mereka dan kadangkadangkang tentu saja kami menemukan kesulitan untuk melaksanakan tujuan kami. (Berdasarkan itu) Tentu saja, kali ini seluruh negeri dalam kondisi yang sangat buruk. Terutama karena pemerintah sebelumnya telah meminjam sejumlah besar uang. Tetapi setelah meminjam, jika uang diinvestasikan, kita tahu di mana uang itu berada. Tetapi uang itu juga dicuri. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kembali uang yang hilang oleh pemerintah sebelumnya. Itu berarti utang yang sangat besar. Masalahnya keuangan pemerintah sangat lemah dan kami merasa kesulitan untuk mengimplementasikan proyek dan sebagainya. Dan ketiga kami menemukan bahwa pemerintah sebelumnya telah melakukan banyak tindakan yang bersifat kriminal. Dan kami harus mengambil tindakan terhadap itu, tetapi dalam mengambil tindakan terkadang orang yang tidak bersalah menjadi terpengaruh. Misalnya jika sebuah proyek diberikan kepada kontraktor, dengan harga selangit dan sejumlah uang dicuri. Tetapi ketika kita ingin menghentikan proyek itu, ribuan pekerja menderita. Bukan niat kami untuk membuat mereka menderita karena kesalahan itu bukan dilakukan oleh mereka tetapi oleh pemerintah. Tetapi, tak dapat dipungkiri jika Anda menunda proyek atau membatalkan proyek, mereka menderita. Dan terkadang kontraknya sangat besar sehingga kami ingin menghentikan kontraknya. Tetapi untuk menghentikan kontrak secara sepihak mengakibatkan kami harus membayar banyak kompensasi. Namun jika kita tidak menghentikan

proyek, kita tidak punya uang untuk melanjutkan. Jadi ini adalah masalah yang sulit dan kali ini tentu saja saya tidak akan ada untuk waktu yang lama. Saya harus melakukan sesuatu dengan cepat. Jadi sekarang saya harus bekerja ekstra keras untuk mengelola semua masalah ini.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

***Penulis:** Sebenarnya saya lebih tertarik untuk memahami ketika sampai pada poin pertama Anda, pegawai negeri. Jadi mereka, Anda tahu apa yang mereka yakini dalam pemerintahan dan partai. Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara pemerintah dan partai. Ketika ada perubahan pemerintahan, mereka masih memegang kesetiaan mereka kepada partai-partai sebelumnya. Jadi, apakah Anda punya rencana untuk mengatasi masalah ini, mengubah pola pikir pegawai negeri sipil dan sebagainya?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Kita harus mengambil tindakan karena saya kira mereka yang sebenarnya melakukan kesalahan. Tetapi di sisi lain, sebelum mereka dapat berkomitmen untuk mendukung pemerintah ini, mereka ingin tahu juga apakah pemerintah ini akan melakukan hal-hal yang baik untuk negara. Terkadang kesetiaan mereka kepada pemerintah sebelumnya membuat mereka kritis terhadap pemerintah saat ini. Jadi yang kami lakukan adalah mencoba menjelaskan kepada mereka, mengapa kami melakukan hal-hal tertentu yang disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya. Di sisi lain, ketika kami mencoba menghentikan layanan kontrak dengan harga yang tidak adil, banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Jadi kita punya dilema di sini. Jika kita tidak berhenti maka pemerintah kehilangan uang mereka. Jika kita berhenti maka orang akan menderita.

TENTANG MAHATHIRISME

***Penulis:** Saya ingin melanjutkan pertanyaan sehubungan dengan Mahathirisme. Anda telah dikenal (bahwa) Anda memiliki tipe atau gaya kepemimpinan Anda sendiri (selama) pertama kali Anda menjadi Perdana*

Menteri. Jadi sekarang kami ingin tahu sebenarnya, langsung dari Anda, apakah Anda percaya pada Mahathirisme atau tidak.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Tidak, saya tidak pernah memberikan nama itu untuk apa yang saya lakukan. Saya melakukan apa yang saya anggap benar, itu baik untuk negara. Saya melihat ketika saya menjadi Perdana Menteri, negara itu masih sangat bergantung pada karet, minyak kelapa sawit, timah, tetapi banyak orang yang menganggur. Jadi kami harus menghentikan masalah dan untuk itu kami harus masuk ke industri karena industri mempekerjakan lebih banyak orang. Jadi dalam prosesnya tentu saja, kita menemukan bahwa kita adalah negara (yang) lebih kaya. Dan ketika negara lebih kaya, kita harus memperhatikan infrastruktur. Jadi yang saya lakukan adalah apa yang normal, tidak ada yang aneh. Saya tidak tahu mengapa orang harus menyebutnya Mahathirisme. Masalahnya adalah saya, saya percaya pada perhatian terhadap detail. Jika saya membuat keputusan, saya ingin mengikuti keputusan itu sampai diimplementasikan. Jadi saya berkeliling untuk melihat bahkan kawasan-kawasan konstruksi. Saya meminta semua proyek harus dilaporkan kepada saya, laporan kemajuan melalui gambar, gambar yang dilengkapi tanggal sehingga saya tahu bahwa, apa yang kami putuskan, sedang dilakukan. Tentu saja saya tidak menoleransi orang yang ceroboh dalam melakukan sesuatu. Mereka harus menerapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Itu saja bedanya, saya suka menerapkan *micromanage* pemerintahan dan tentu saja dalam urusan luar negeri, jika saya merasa ada kesalahan, saya tidak peduli siapa yang melakukan—siapa yang melakukan hal yang salah, saya akan menyuarakan pendapat.

NILAI-NILAI ASIA

Penulis: *Dan pertanyaan lain dalam hal nilai, saya pikir Anda juga menyebarkan nilai positif untuk memperkuat masyarakat. Selama periode pertama Anda sebagai Perdana Menteri, Anda menyebarkan Nilai-Nilai Asia. Jadi, apakah Anda berpikir bahwa Nilai-Nilai Asia masih relevan hari ini karena saya pikir baru-baru ini Pak Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden*

Indonesia bahkan meminta Indonesia untuk kembali, dengan gagasan nilai-nilai Asia. Anda tahu bahwa nilai-nilai Asia tidak hanya disebarakan oleh Anda. Lee Kuan Yew (dan) Suharto (juga menyebarkan nilai-nilai Asia) sebelumnya. Jadi apa yang Anda pikirkan di masa depan, apakah kita masih perlu menjunjung tinggi gagasan Nilai-Nilai Asia ini?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Apa yang kita lihat adalah bahwa orang Asia suka meniru Barat. Mereka meniru bahkan hal-hal yang salah. Moralitas Barat misalnya, ketika moralitas mereka memburuk, kita mengikuti, kita menerima, apa yang mereka lihat sebagai hal yang harus dilakukan. Tetapi saya menemukan bahwa Nilai-Nilai Asia itu sendiri sangat baik untuk kesejahteraan seseorang, komunitas, bangsa. Misalnya, Nilai-Nilai Asia percaya bahwa Anda harus loyal kepada negara. Meskipun Anda mungkin mengkritik, Anda harus loyal. Tentu saja terkadang kesetiaan melibatkan kesetiaan kepada pemerintahan yang buruk dan itu buruk. Tetapi masih bagus untuk memiliki negara yang lebih stabil daripada memiliki negara yang kacau balau dengan banyak tindakan yang diambil untuk mengganggu stabilitas negara. Jadi, dibandingkan dengan nilai-nilai Barat, saya pikir orang-orang Asia sangat baik. Saya akan memberi Anda satu contoh, kita semua mengenakan pakaian, kita semua berpakaian. Kita suka mengenakan pakaian normal tetapi Barat memutuskan bahwa sangat modern untuk mengenakan pakaian sobek—‘baju koyak’ lho. Jadi mereka merobek celana dan lainnya dan mereka mengenakannya dan mereka pikir ini bagus. Kita (berpikir), itu bukan Asia, itu Barat. Kita orang Asia sangat memperhatikan perilaku kita, merasa malu melakukan hal-hal tertentu. Tetapi hari ini kita melihat di Barat, ide-ide seperti LGBT di mana kebebasan diterjemahkan ke dalam membuang semua nilai-nilai moral. Lihat Barat, saya perhatikan ini selama bertahun-tahun. Pertama di Barat, orang biasa memakai gaun yang mencapai lantai yang menutupi kaki dan kemudian menjadi lebih pendek dan lebih pendek sampai sekarang hampir tidak memakai pakaian apa pun. Tapi orang Asia suka mengikuti itu. Mereka seharusnya tidak. Nilai kita adalah nilai kita. Kita masih percaya pada pernikahan misalnya. Pernikahan itu suci bagi kita. Bagi mereka (orang Barat) tidak lagi. Maksud saya Anda ingin hidup dengan seseorang, Anda hidup dengan

seseorang dan kemudian Anda ingin berpisah, Anda berpisah karena Anda harus bebas. Namun nilai-nilai orang Asia masih percaya pada institusi pernikahan. Sebuah keluarga adalah pasangan yang menikah dengan anak-anak tetapi sekarang di Barat, orang memiliki anak tanpa menikah dan tanpa memiliki keluarga. Terkadang pria dan pria menikah dan kemudian mereka mengadopsi anak dan mereka menyebutnya keluarga. Jadi, nilai-nilai Asia dalam banyak hal lebih unggul dari nilai-nilai Barat. Jadi, itulah mengapa saya merasa bahwa kita harus bangga dengan nilai-nilai kita. Mengapa kita ingin memakai pakaian yang sobek? Saya tidak bisa memahaminya sama sekali tetapi saya menemukan para muda melakukan itu. Saya khawatir cucu-cucu saya melakukan itu.

REFORMASI PENDIDIKAN

***Penulis:** Oke Tun, sekarang kami berikan Anda pertanyaan yang lebih terkait dengan pendidikan. Seperti yang kita semua tahu bahwa niat Anda pada awalnya adalah untuk memegang portofolio pendidikan - sebagai menteri pendidikan - setelah Anda memenangkan pemilihan. Karena manifesto melarang Anda untuk memegang posisi itu, jadi, yang ingin kami ketahui apa sebenarnya yang Anda pikirkan ketika menginginkan posisi itu. Reformasi apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan untuk pendidikan. Kita tahu bahwa sekarang kementerian (pendidikan) mencoba melakukan banyak hal. Tapi sebenarnya kami ingin tahu, apa ide Anda (tentang reformasi). Bisakah Anda menjelaskannya secara spesifik?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Pendidikan adalah tentang memberikan pengetahuan kepada orang-orang, sehingga mereka lebih berkualitas untuk menangani masalah yang mereka hadapi ketika mereka tumbuh dewasa. Ketika mereka bertambah tua tentu saja mereka harus memiliki penghasilan. Dengan pendidikan, ada kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang baik. Jika mereka sama sekali tidak berpendidikan, pendapatan akan sangat kecil, karena kemampuannya sangat kurang. Jadi saya percaya bahwa jika Anda memberi orang pendidikan yang tepat maka mereka akan berhasil dalam hidup. Dan ketika seseorang berhasil dalam kehidupan, maka seluruh komunitas

akan berhasil, seluruh bangsa akan berhasil. Jadi jika Anda ingin meningkatkan dan menumbuhkan negara, Anda harus memiliki pendidikan yang baik yang relevan dengan tuntutan masyarakat. Jika masyarakat menuntut agar ada lebih banyak insinyur maka kita harus melatih insinyur. Tetapi kadang-kadang orang berkata, well, pendidikan adalah tentang seni. Anda harus tahu tentang sejarah dan geografi dan sastra. Namun terkadang pengetahuan itu tidak berguna bagi Anda di kehidupan selanjutnya. Jadi pendidikan telah berubah dari sekadar bisa membaca dan menulis. Di masa lalu tidak banyak orang bisa membaca dan menulis sebagian karena mereka ingin memahami agama. Tetapi hari ini pendidikan adalah tentang mempersiapkan seseorang sehingga pengetahuannya dapat membantunya mencapai kehidupan yang lebih baik. Dia dapat bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak akan dapat dia lakukan tanpa pendidikan.

***Penulis:** Jadi, dengan melihat situasi kebijakan pendidikan kita, apa sebenarnya reformasi yang Anda rencanakan untuk dilakukan untuk pendidikan?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Hari ini kita memiliki kemajuan yang dibuat oleh sains. Kemajuan yang mengarah pada teknologi baru, teknologi baru ini sangat fantastis. Apa yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya bisa kita lakukan sekarang. Saya selalu menunjukkan bahwa di masa lalu Anda memiliki rumah besar dan luas untuk stasiun penyiaran untuk menyiarkan semua berita dan apa pun. Tapi hari ini rumah siaran itu, lengkap dengan peralatan penyiaran, ada di saku Anda. Dengan telepon Anda, Anda dapat menyiarkan ke seluruh dunia. Semua orang dapat mendengar Anda, semua orang bahkan dapat melihat Anda. Jadi, jika kita masih berbicara tentang cara membuat keranjang, maka tentu saja orang tersebut tidak akan bisa memperbaiki hidupnya. Tetapi pendidikan saat ini harus dikonsentrasikan pada ilmu pengetahuan karena penelitian ilmiah lah yang memungkinkan kita untuk melakukan, mengidentifikasi kemampuan elektronik, kemampuan radio, dan lain-lain. Dan ini juga berarti bahwa, Anda siap dipekerjakan karena Anda memiliki pengetahuan ini. Jadi hari ini pendidikan harus fokus pada

pengetahuan baru, teknologi baru, ilmu-ilmu baru dan penelitian baru yang harus dilakukan, untuk terus menghasilkan ide-ide baru dan produk baru, yang akan membuat hidup lebih mudah bagi kita.

***Penulis:** Gagasan Anda tentang bertualang ke teknologi baru saya pikir memerlukan dana. Sebagai contoh di universitas, masalah bagi kita selalu tentang pendanaan dan universitas terlalu bergantung pada pemerintah. Sangat sedikit industri yang memberikan dukungan. Jadi peran Anda sebagai Perdana Menteri, bagaimana Anda benar-benar dapat mendorong atau bahkan untuk memastikan universitas misalnya, didanai dengan baik dan menerima bantuan dari industri termasuk dana abadi. Jadi bagaimana Anda dapat memainkan peran Anda dalam membantu hal ini?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, tidak akan pernah cukup uang untuk penelitian. Anda selalu menginginkan lebih karena uang akan membiayai peralatan yang harus Anda gunakan, jumlah orang dan sebagainya, dan para peneliti yang sangat terlatih, semuanya membutuhkan biaya. Tetapi kami sangat takut jika Anda membiarkan universitas masuk ke bisnis, maka mereka akan mengabaikan bagian akademis dari pekerjaan mereka. Tetapi di banyak negara sekarang hasil penelitian oleh universitas, dapat dimasukkan ke dalam Kekayaan Intelektual IP dan terdaftar, dan itu dapat dijual, universitas akan mendapatkan uang dan uang itu dapat digunakan lagi untuk penelitian. Hal tersebut sudah dilakukan di banyak negara tetapi di sini (di Malaysia) belum dilakukan dengan benar. Perlu dipastikan hasil penelitian dan para peneliti, departemen dan universitas, mendapat manfaat finansial dari hasil penelitian mereka. Kemudian akan ada kontrak penelitian, bahwa universitas dan lembaga penelitian lainnya harus menerima kontrak untuk melakukan penelitian di bidang-bidang tertentu seperti yang dipersyaratkan oleh sektor swasta atau oleh industri. Dengan begitu kami (percaya) pembiayaan untuk penelitian akan lebih mudah, dan lebih banyak uang akan tersedia. Tetapi selama Anda melakukan penelitian hanya untuk memperoleh pengetahuan, tanpa berfokus pada aplikasi, maka tentu saja tidak akan pernah cukup uang.

Penulis: *Jadi, bagaimana dengan universitas-universitas di Malaysia, misalnya universitas negeri, menurut Anda apakah kinerjanya saat ini sudah sangat baik dibandingkan dengan universitas lain di dunia, universitas terbaik?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Sebagian besar universitas di Malaysia tidak cukup membiayai penelitian yang berkualitas, tetapi saya pikir seiring waktu gagasan bahwa penelitian itu penting akan diterima. Sudah merupakan tugas pemerintah dan masyarakat untuk membiayai penelitian. Ketika Anda memiliki pola pikir seperti itu di masyarakat maka lebih banyak uang akan disalurkan untuk penelitian. Dan kita akan memperkaya diri kita karena penemuan transistor yang serupa. Pertama, Anda memiliki katup, dan itu memungkinkan kita untuk memiliki radio dan sejenisnya. Dan kemudian kita menemukan transistor, karena di dalamnya kita menemukan bahwa transistor juga dapat dibuat menjadi ukuran kecil hingga ribuan transistor dapat dicetak pada chip kecil. Semua ini adalah hasil penelitian. Tanpa penelitian, kita tidak dapat melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Kita dapat misalnya, merasakan, apa yang ada di sekitar kita. Mobil dapat merasakan ada beberapa penghalang, garis di jalan. Mobil dapat melihat dan memberi tahu pengemudi ada garis pembatas di jalan. Anda baru saja melewati batas. Anda sekarang berada di jalur yang berbeda. Semua ini adalah hasil penelitian dan juga penelitian tentang aplikasi; kekuatan *microchip* sangat bagus. Tetapi hanya dengan melihat *microchip*, Anda tidak akan tahu apa yang bisa dilakukan, tetapi jika Anda memahami apa yang bisa dilakukan *microchip* maka Anda menggunakan pengetahuan itu untuk melamar jenis pekerjaan tertentu. Mungkin untuk mengenali wajah. Sekarang pengenalan wajah adalah salah satu cara identifikasi dan sekarang ada mobil tanpa pengemudi. Lihat? Hanya dengan membaca apa yang ada di sekitarnya. Jika ada halangan, mobil dapat melambat atau berhenti dengan sendirinya. Jadi ini adalah hasil penelitian. Dan begitu Anda membuat penelitian, menemukan sesuatu, Anda sekarang harus memikirkan aplikasi tersebut. Anda memiliki laser misalnya. Ya, laser bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu tetapi sekarang laser bisa

digunakan untuk memandu rudal. Jadi, semua itu datang ketika Anda memahami kekuatan dari penemuan yang Anda buat.

***Penulis:** Tun, Anda tahu bahwa kami dari Universiti Utara Malaysia dan Anda adalah orang yang mendirikan universitas—pendiri universitas. Jadi, bagaimana Anda melihat UUM sejauh ini? Apakah sudah dikelola dengan baik sekarang? Atau seperti yang Anda tahu bahwa kami adalah universitas manajemen. Baru saja Anda berbicara banyak tentang teknologi, jadi bagaimana Anda dapat melihat UUM di masa depan sebagai universitas manajemen?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, semuanya bisa dicapai jika Anda tahu cara mengelola. Manajemen adalah hal yang paling penting dalam mencapai proyek apa pun, rencana apa pun, atau bisnis industri apa pun. Apakah Anda berada di pemerintahan atau di sektor swasta cara Anda mengelola lah yang menciptakan hasilnya. Semua orang tahu, yah, mungkin mesin mobil adalah komponen internal, tetapi bagaimana Anda mengatur (untuk memproduksi mesin) pembuatan? Untuk mengurangi biaya dan segalanya, bagaimana Anda memasarkannya, bagaimana Anda mempromosikannya, bagaimana Anda menjualnya, bagaimana Anda memastikan bahwa biayanya tidak terlalu tinggi, nilainya ditingkatkan, semua hal ini memerlukan penelitian. Teknologi beragam. Jadi Anda harus mengatur milik Anda, bukan riset, maksud saya manajemen. Anda harus mengatur sistem manajemen, harus memiliki kepala, Anda harus memiliki staf pendukung, Anda harus memiliki staf darat, semua ini memerlukan kemampuan untuk menempatkan (manajemen) di tempatnya. Menempatkan orang yang benar untuk melakukan sesuatu. Sehingga yang Anda ingin mereka lakukan adalah mencapai. Jadi itu adalah manajemen baik di pemerintahan atau di sektor swasta. Apa yang kami lihat adalah jenis manajemen yang sangat prediktif yang Anda lihat orang coba. Mereka melihat misalnya, seseorang yang melakukan uji tuntas. Anda pergi ke penjualan semangka. Anda tidak tahu harganya. Anda tidak tahu berapa harga seharusnya. Berapa seharusnya untuk persediaan? Berapa biaya transportasi? Dan semua hal ini harus disatukan dan dikelola sebelum Anda mendapatkan hasilnya.

PENDANAAN POLITIK

Penulis: *Oke Tun, sekarang kita beralih ke beberapa pertanyaan tambahan. Kami ingin bertanya kepada Anda terkait dengan penelitian kami yang lain. Pertama adalah tentang pembiayaan politik. Seperti yang Anda ketahui, Malaysia tidak memiliki undang-undang yang menangani masalah pendanaan politik. Sebenarnya, kami sebenarnya ingin memperkenalkan undang-undang baru tentang ini. Jadi bagaimana Anda melihat, jenis hukum pembiayaan politik apa yang ingin kami perkenalkan. Ada banyak model yang kami amati dipraktikkan di seluruh dunia. Kami mengamati bahwa model Jerman mungkin adalah model yang ingin diikuti Malaysia. Jadi model Malaysia seperti apa yang harus kita hasilkan dalam reformasi keuangan politik?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ini sangat kompleks. Kami memulai tanpa bimbingan khusus tentang bagaimana politik harus dibiayai. Saya ingat ketika saya bertarung pada tahun 1964, partai memberi saya RM10.000. Saya harus membagi RM10.000 menjadi RM4,000 untuk saya sebagai anggota parlemen dan masing-masing RM3.000 untuk dua anggota majelis negara bagian (di bawah konstituensi saya). Sejumlah kecil tapi itu sepenuhnya dan cukup memadai untuk kita gunakan. Tapi sekarang mencapai jutaan (ringgit) karena orang lebih canggih. Kami harus membalas serangan-serangan. Kami harus mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang, mengatur pasukan *cyber*, semua hal harus dilakukan, untuk mempromosikan diri kami sendiri. Kami (dengan demikian) membutuhkan banyak uang. Kadang mencapai jutaan, tetapi bagaimana kita mendapatkan uang? Kita bergantung pada pendukung. Orang akan mendukung kita. Orang akan menyumbangkan uang karena mereka percaya pada perjuangan kita. Mereka percaya pada hal-hal yang benar yang kita lakukan sehingga mereka memberi kita uang. Sekarang ketika mereka memberi kita uang, itu memengaruhi pemikiran kita ketika kemudian sumbangan itu menjadi suap. Anda lihat, nanti (ketika) Anda membentuk pemerintahan, Anda mendukung orang yang memberi Anda uang. Itu tidak adil bagi orang lain, tetapi apa yang

bisa kita lakukan? Kita butuh uang. Jadi sampai sekarang pemerintah ini belum memutuskan cara terbaik untuk membiayai politik, tanpa kemungkinan sistem digunakan untuk memengaruhi pemerintah. Jadi kita harus memikirkan jalan kita. Di Amerika tentu saja semua bisnis memberi banyak uang untuk membiayai pemilihan. Akibatnya biasanya pemerintah mendukung bisnis karena mereka mendapat uang dari bisnis. Jadi pekerja miskin yang tidak dapat mendukung pemilu akan kurang diperhatikan.

***Penulis:** Jadi, saya pikir, karena saya juga terlibat dalam komite konsultatif tentang pendanaan politik sebelumnya dan kami sudah keluar dengan proposal yang sebenarnya sudah diajukan kepada Anda, saya kira? Kemudian Anda memutuskan untuk menahan dan mengeluarkan proposal baru karena dalam proposal awal kami, kami tidak mengizinkan dana dari pemerintah. Jadi menurut Anda, mungkin pemerintah harus mendanai partai politik. Jadi menurut Anda apakah sesuai dalam konteks Malaysia untuk mendanai banyak partai politik atau apakah Anda memiliki gagasan berbeda tentang itu?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Masalahnya adalah berapa banyak yang harus kita berikan. Apakah kita memberikan jumlah yang sama untuk semua partai politik? Atau apakah Anda memiliki kriteria tertentu sebagai jumlah yang sesuai yang Anda berikan. Partai besar akan mendapat lebih banyak uang, pesta kecil akan mendapat lebih sedikit uang, tetapi orang-orang akan mengeluh bahwa itu tidak adil bagi partai kecil. Di sisi lain, Anda memberikan jumlah yang sama kepada partai lain, semua orang akan membentuk partai politik, hanya untuk mengumpulkan uang. Jadi tidak mudah bagi pemerintah untuk memutuskan pembiayaan karena kita perlu memiliki kriteria, kriteria yang adil. Kami belum mengidentifikasi cara terbaik untuk membiayai (belum). Jadi pada saat ini, itu menyelubungi dalam pikiran kita kemungkinan pembiayaan pemerintah tetapi kami berusaha mencari tahu, bagaimana kita membiayai tanpa bias dalam mendukung seseorang.

HAK ASASI MANUSIA

Penulis: *Sekarang kita membahas berbagai pertanyaan tentang hak asasi manusia di Malaysia. Apakah ini merupakan masalah (hak asasi manusia) yang besar dalam hal LGBT. Sekarang kita juga berbicara tentang kebebasan berbicara, bahkan saya pikir Yang Di-Pertuan Agong menyebutkan dalam pembukaan parlemen pagi hari ini. Jadi secara umum bagaimana Anda melihat kondisi HAM kita di Malaysia apakah kita benar-benar baik, dibandingkan dengan negara lain atau kita masih harus banyak berbenah?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, banyak orang mengatakan bahwa kita tidak cukup bebas, bahwa kebebasan dibatasi. Tapi tidak ada yang bisa Anda dapatkan secara absolut, tak terbatas, (karenanya) pasti ada batasnya. Walaupun Anda telah diberi kebebasan pers, tetapi pers tidak boleh mencetak atau mengiklankan tentang hal-hal seperti berita palsu misalnya atau menjatuhkan seseorang, karena alasan politik atau karena Anda tidak menyukai orang tersebut. Anda harus adil juga dan sangat berhati-hati tentang kebebasan Anda. Maksud saya Anda tidak bisa mendatangi seorang pria dan mencacinya dan ketika dia bertanya “mengapa Anda mencaci saya?” “Ini kebebasan saya berbicara.” Itu tidak benar. Jadi, Anda harus menerima bahwa dalam masyarakat mana pun akan ada batasan. Seluruh gagasan memiliki undang-undang, untuk membatasi kebebasan Anda. Anda tidak dapat mencuri misalnya, karena hukum akan menghukum Anda jika Anda mencuri. Banyak hal dibatasi oleh hukum karena itu baik untuk masyarakat. Jadi kebebasan yang Anda dapatkan tidak mutlak. Itu dibatasi oleh hukum negara, praktik negara, (dan) nilai-nilai moral negara. Beberapa negara mengerti hal ini. Tetapi di beberapa negara (lainnya) telanjang tidak apa-apa. Di negara kita, kita tidak akan menerimanya. LGBT misalnya, ini adalah ide dari Barat. Itu menghancurkan nilai-nilai moral mereka tetapi mereka meminta kita untuk memiliki hal yang sama. Saya tidak berpikir kita harus menirunya. Mereka ingin bebas, biarkan mereka bebas tetapi ketika datang ke negara kita mereka harus menghormati hukum kita dan nilai-nilai moral kita. Tapi sekarang mereka akan menekan (kita). Jika Anda tidak

menerima LGBT maka kami akan memutuskan perdagangan dengan Anda atau menghancurkan ekonomi Anda, dengan cara tertentu dengan sanksi dan sebagainya. Jadi, itu sendiri adalah penolakan kebebasan. Kita harus memiliki hal yang benar untuk dilakukan dengan cara kita, untuk memiliki nilai kita sendiri. Jadi ini selalu menjadi rebutan karena Barat akan selalu mengatakan kita kekurangan kebebasan. Kita telah memberikan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berbicara dan sebagainya tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kita lakukan. Di Malaysia, yang merupakan populasi multi-agama dan multi-agama, jika Anda mengizinkan seorang pria untuk menghina agama pria lain akan ada kerusuhan, negara itu tidak akan stabil. Seperti baru-baru ini mereka memiliki gambar seorang Nabi dan sebagainya, dan menghina seorang Nabi. Ini hal kecil bagi mereka, tetapi bagi orang Muslim, itu adalah hal besar, Anda tidak boleh melakukan itu. Jadi kita harus serius. Ya, Anda bebas, tetapi ada batasannya, yakni Anda tidak menggunakan kebebasan Anda untuk mengganggu orang lain. Jadi itu sangat penting, karena kepekaan masyarakat harus dihormati, harus dihormati oleh semua orang. Jadi saya akui kita bukan demokrasi liberal. Tapi itu mulai terkikis karena akan selalu ada seseorang yang ingin memiliki kebebasan penuh dan mereka akan mengacau. Mereka akan menulis penentangan mereka dan sebagainya. Namun di Malaysia, saya pikir kita memiliki masyarakat multi-agama, multi-agama dan nilai-nilai moral yang sangat penting bagi kita. Jadi kita tidak bisa mengikuti liberalisme yang Anda temukan di beberapa negara Barat.

***Penulis:** Baru-baru ini, saya pikir kita menyetujui Statuta Roma yang berarti bahwa kita mengakui Pengadilan Kriminal Internasional.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Lihat apakah yang penting adalah kebebasan, dan Anda memiliki sistem yang tidak mengizinkan kebebasan maka itu tidak demokratis. Sekarang Konvensi Roma itu hebat, tetapi kita harus memiliki kebebasan memilih. Ada hal-hal yang mereka setuju untuk dipraktikkan yang tidak bisa kita praktikkan. Jika Anda melarang kami untuk menolak beberapa praktik di sana, Anda menyangkal hak kami atau kebebasan kami. Jadi ketika saya mengatakan kita akan mengikuti

Konvensi Roma, maksudnya adalah ketika itu cocok untuk masyarakat kita. Masyarakat kita berbeda. Semua orang tidak sama. Setiap negara memiliki sistem nilai mereka sendiri dan jika kita tidak diizinkan memiliki sistem nilai kita sendiri, itulah penolakan terhadap kebebasan kita. Jadi itu adalah sesuatu yang kita yakini, bahwa Anda harus memiliki kebebasan tetapi bersikeras bahwa, Anda harus menerima nilai mereka. Ini bahkan bukan nilai-nilai mereka sebelumnya. Maksud saya, agama mereka sendiri melarang mereka melakukan hal-hal tertentu, tetapi sekarang karena kebebasan tanpa batas, mereka telah berevolusi ke titik di mana mereka menolak nilai-nilai mereka sendiri. Jika mereka ingin melakukannya, itu adalah hak mereka tetapi memaksakannya pada kita berarti menyangkal kebebasan kita.

TERORISME VIS-À-VIS RASISME

***Penulis:** Pada tahun 2015, kami melakukan penelitian tentang Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Daesh. Kami melakukan wawancara dengan Datuk Ayob Pitchay, Kepala Cabang Khusus Unit Terorisme. Kami mengajukan pertanyaan kepadanya, "Apakah ISIS ancaman langsung untuk Malaysia?". Dia berkata, "Tidak". Jadi kami bertanya kembali, "lalu apa". Dia mengatakan "Rasisme adalah ancaman langsung untuk Malaysia". Apa pendapat Anda tentang hal ini Tun?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Ya, agama. Semua agama seharusnya membawa hal-hal yang baik terutama agama Islam karena (dalam) Islam kami menyampaikan kepada semua orang dengan sangat bangga bahwa Islam bukan hanya agama tetapi juga jalan hidup. Jadi apa jalan hidup? Sebagian besar Muslim tidak tahu apa jalan hidup. Apa yang mereka lakukan sekarang bukanlah jalan hidup. Misalnya, Islam melarang membunuh, pembunuhan. Anda tidak boleh membunuh seseorang, membunuh sesama Muslim adalah salah, Anda akan dihukum di dalam neraka selamanya. Tapi apa yang kita lakukan? Kita sedang membunuh. Kita membunuh ribuan orang. Lihatlah Daesh, mereka memenggal kepala orang-orang dengan pisau. Anda tahu jika Anda memenggal kepala, mungkin rasa sakitnya hanya sesaat karena mati seketika. Tetapi ketika

Anda melakukannya dengan pisau bayangkan saja penderitaannya. Itu dilarang dalam Islam. Begitu banyak orang melakukan hal-hal atas nama Islam yang benar-benar bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, di negara kita, kita memiliki partai politik ini yang mengklaim bahwa orang-orang yang tidak ada dalam partai bukan Muslim. Jadi sekarang ada persyaratan baru untuk menjadi seorang Muslim. Terlepas dari syahadat "*Lailahailallah Muhammadarrasul*" Anda juga harus mengatakan "Saya anggota partai ini." Maka hanya Anda yang menjadi Islam. Yang benar-benar salah karena seluruh dunia tidak dapat menjadi anggota partai itu, namun mereka dengan bangga mengatakan bahwa mereka adalah Muslim, mereka mempraktikkan Islam, setiap saat mereka berteriak "Allahu Akhbar". Maksud saya Anda melakukan sesuatu yang salah dan kemudian Anda menghubungkannya dengan Islam, itu yang salah. Itulah yang terjadi pada dunia Muslim saat ini karena itu bukan agama. Agama itu sudah sangat baik sempurna. Islam bahkan jenis agama yang sangat moderat, sangat peduli dengan kesejahteraan umat. Setiap kali Anda berbicara Anda mengatakan "*Bismillahirrahmanirrahim*". Atas nama Allah Yang Maha Penyayang, Yang Welas Asih, lalu Anda potong kepalanya. Apakah itu benar? Tidak mungkin benar, Anda tahu, tetapi orang-orang ini mengatakan mereka melakukan hal-hal untuk Islam dan inilah yang dilakukan Daesh. Di mana sebelumnya umat Islam tidak memerangi Muslim. Mereka dengan mudah mengatakan bahwa mereka adalah Islam. Mereka dengan mudah memotong kepala orang-orang. Mereka membunuh. Mereka melakukan aksi teror terhadap Muslim untuk mendirikan Islam. Melakukan semua hal yang dilarang oleh Islam, atas nama Islam. Jadi di situlah kita tersesat sekarang karena kita tidak percaya pada ajaran Islam. Kita percaya pada pemimpin kita di Imam kita dan hal semacam itu. Jika Anda membaca Alquran, Anda akan menemukan bahwa semua perilaku yang dianjurkan oleh Islam sangat baik, sangat jelas. Jika Anda mengikuti, Anda akan berhasil tetapi Anda tidak mengikuti. Itulah masalahnya.

KEBIJAKAN TENTANG PEREMPUAN

Penulis: *Saya benar-benar ingin bertanya kepada Tun sejak dari Sintok sampai di sini, berhubung ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan Anda. Tun, kita tahu bahwa satu kebijakan diperkenalkan sebelumnya untuk perempuan, yaitu kebijakan tiga puluh persen (kuota). Tun, (merujuk pada) wanita di sektor publik serta wanita dalam pengambilan keputusan perusahaan, kita bisa melihat bahwa tiga puluh persen wanita dalam pengambilan keputusan perusahaan telah diimplementasikan dan membuat kesuksesan yang baik. Anda tahu bahwa kita hampir mencapai tiga puluh persen, tetapi sayangnya yang ada di politik, yang diperkenalkan pada 2004, sampai sekarang gagal mencapai angka yang ditargetkan. Tun, kita telah mencapai kemerdekaan selama bertahun-tahun, apa yang salah, Tun? Dan kemudian dalam pemerintahan PH, kita memiliki harapan dan keyakinan yang sangat besar, dapatkah sesuatu dilakukan Tun? Bisakah kita benar-benar mencapai angka tersebut?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Jika Anda melihat jumlah wanita di kabinet misalnya, ada lebih banyak wanita.

Penulis: *Sikit tu (terlalu kecil) ...*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Tetapi lebih dari sebelumnya. Anda harus ingat bahwa tidak ada yang bisa terjadi dalam semalam. Semuanya harus berubah secara bertahap. Orang-orang harus menerimanya dan agar lebih banyak lagi para wanita di pemerintahan, para wanita harus sangat agresif, harus memenangkan popularitas. Jika mereka populer, mereka menang. Tetapi beberapa dari mereka tidak populer. Anda tahu bahkan dalam pelayanan, mereka sepenuhnya memenuhi persyaratan dan kemudian mereka menikah. Dan kemudian mereka memiliki keluarga dan mereka berhenti. Seorang Dokter, yang telah menghabiskan enam tahun untuk belajar menjadi dokter, memutuskan untuk tidak menjadi dokter karena dia menikah. Hal-hal semacam ini, memberi laki-laki lebih banyak peluang, dan perempuan lebih sedikit peluang. Di Malaysia, pilot pesawat tempur adalah wanita. Anda tidak melihat banyak yang seperti ini, Anda

tahu, di negara-negara Muslim mana pun. Kita pergi ke arah itu tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kita harus memiliki wanita, wanita itu juga harus maju dan bersedia. Dan di kepolisian sekarang perwira yang sangat senior adalah perempuan. Kita telah membuat kemajuan itu, yang harus diakui. Tetapi jika Anda, saya pikir bahkan jika Anda gandakan atau tiga kali lipat Anda masih tidak akan mencapai tiga puluh (kuota persentase). Para wanita yang benar-benar agresif, mereka mendapatkan pekerjaan. Anda pergi ke layanan pemerintah, banyak dari KSU (Sekretaris Jenderal di Kementerian) adalah wanita sekarang bukan pria. Dan banyak insinyur juga wanita. Tetapi prosesnya, Anda tidak dapat mengubah semuanya dalam semalam. Ini membutuhkan waktu.

***Penulis:** Butuh lebih dari 60 tahun, Tun.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Enam puluh tahun bukanlah apa-apa. Enam puluh tahun tidak seberapa dibandingkan dengan negara lain. Anda lihat orang-orang di Arab Saudi mengenakan jilbab dan semacamnya, mereka tidak mengizinkan wanita bahkan mengendarai mobil sampai belakangan ini.

***Penulis:** Itu saja Tun. Senang bertemu Anda Tun. Terima kasih banyak atas waktunya.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Dengan senang hati juga. Sama-sama.



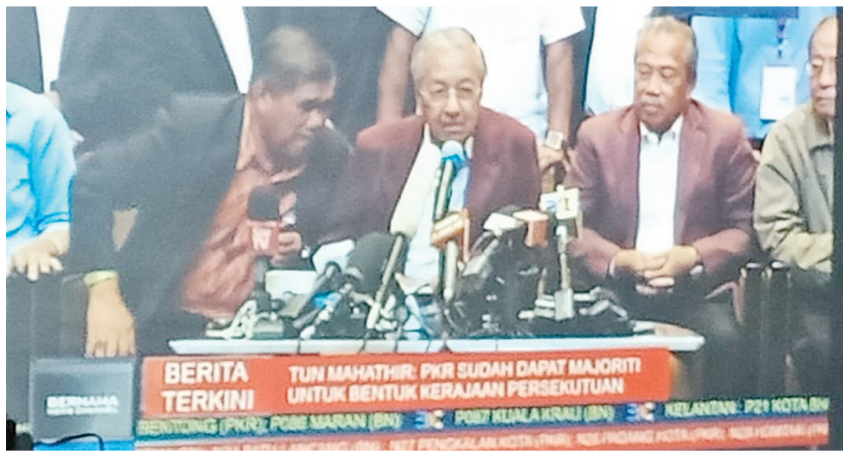












CHAPTER 1

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad ruled Malaysia for the first time in more than two decades, from 1981-2003. This period was known by many scholars as the Mahathirism period. However, since the 14th General Election on 9 May 2018, Mahathir led a coalition party known as the *Pakatan Harapan* (PH) managed to defeat the mighty *Barisan Nasional* (BN). With the victory, Mahathir, was appointed as the Prime Minister of Malaysia for the second time, at the aged of 92 years old. In brief, Mahathir was known as a tough leader who was in the past, perceived that Malaysia's multicultural, multiracial, multireligious and multilingual society as inappropriate context for organising open political debate and discussion about human rights. As Mahathir said in the *Far Eastern Economic Review* of 28 October 1996: "The threat is from inside...So we have to be armed, so to speak. Not with guns, but with the necessary laws to make sure the country remains stable". He implied that racial conflict and political instability are inevitable in a multiracial society unless protected by some necessary laws. Racial conflict is like a time bomb for him and the misuse of race and religious issues for political ends to exploit racial sentiments could spark racial conflict.

DEBATES ON MAHATHIRISM

The idea of Mahathirism exists through the uniqueness of Mahathir's leadership, philosophy and state management that underpin Malaysia's quest to achieve its vision of developed nation status in year 2020. According to two political scholars, R.S. Milne and Diane K. Mauzy, "Mahathirism is not a guide to Mahathir's thoughts or actions. Rather, Mahathir's thoughts and actions are a guide to constructing Mahathirism.

Mahathirism is an exercise in allocating thoughts into logical categories with the aim of achieving intellectual satisfaction and understanding”. Furthermore, the late Ahmad Fawzi Basri, the former Vice Chancellor of Universiti Utara Malaysia (UUM), argued that Mahathirism can be translated into three contexts:

1. public policies created by Mahathir for the government to implement new agendas in building a progress and stable country;
2. Mahathir’s political strategies throughout his leadership in the government and party.
3. style of leadership in managing the party and government.

On the other hand, Khoo Boo Teik, another political scientist, posited that the coherence of Mahathir’s views lies really in the sum total of its paradoxes, ambiguities and inconsistencies. Mahathir in fact has constructed so many ideas with regards to nationalism, capitalism, Islam, and democracy, but these ideas are not well-developed and Mahathirism is merely a coherent ideology for the Malaysian context. Therefore, Mahathirism can be referred to all Mahathir’s views about politics, economy, social, and foreign policy in guiding Malaysia to become a prosperous and well-developed country.

In Malaysia, the idea and thinking of “Asian values” was also developed by Mahathir Mohamad, when he was Prime Minister of Malaysia for the first time. Basically, Mahathir prioritised political stability and economic prosperity. Mahathir elaborated this viewpoint as follows:

For Asians, the community, the majority comes first. The individual and minority must have their rights but not at the unreasonable expense of the majority. The individuals and the majority must conform to the mores of society. A little deviation may be allowed but unrestrained exhibition of personal freedom which disturbs the peace or threatens to undermine society is not what Asians expect from democracy.

Not surprisingly, Mahathir defended Malaysia’s record on the issues related to democratic practice—individual freedom, civil liberties and human rights—not by resorting to the subtleties of political philosophy, but by a pragmatic articulation of two commonsensical strands of

arguments: a rejection of absolute personal freedom and an affirmation of the obligations of elected government. Freedom, liberties and rights, in Mahathir's view, can only be exercised or enjoyed if restrained by sense of personal responsibility, an individual deference to communal considerations, and a respect for stability, law and order. According to Mahathir, the suppression on individual freedom and liberties were "check and balances ... maintained as between individual rights and public good" with "the government of the moment determining what constitutes public good". Thus, "while a citizen is free ... the society must have the right to object to individuals who offend the sensitivities of the society". The freedom of speech was protected but its exercise could not manifest in an unregulated and irresponsible press beholden only to "media tycoons ... who want to control the media worldwide", or "the editor and sub-editor, or the reporters or sometimes the big advertisers, having their own political views and agenda". It was the function of the press to report, to inform, even to criticize, but it was essential to realize that the "democratic principle about the need to know", "the need for transparency" and the "right to information" could just as well be the "invention of those who want to make money for the information industry". Mahathir also noted that the freedom of expression and assembly though respected, they could not extend to racial provocation, incitements to violence, the use of the industrial strike "as a political weapon, quite unconnected with the rights and welfare of workers in order to gain power", or moves "especially by foreigners and other non-governmental organizations" to "agitate and threaten the Government with censure".

DEMOCRACY IN MALAYSIA

Unsurprisingly, Mahathir defended his record on the eve of his final Parliamentary appearance in October 2003 with regard to democracy. He reiterated his position that too much freedom could lead to anarchy and the destruction of Malaysia's multiracial society. Measures such as detention without trial of terrorist suspects and the banning of the

Communist party from participating in the elections have been presented as essential in maintaining democracy and harmony in the country. For Mahathir, the main priority was to ensure that racial sentiment in the country would not be inflamed. He elaborated his argument as follows:

If an individual or a small group tried to incite a (race) riot they are actually rejecting democracy and the right of majority...That is why actions that seem undemocratic towards the individual or the minority need to be taken to protect real democracy...Anarchy can take place because of an obsession with democratic.

Shad Saleem Faruqi, a constitutional expert, acknowledges that Malaysia has achieved high levels of tolerance through the strict policy of prioritising national stability, argues that Malaysia is an excellent example of religious and cultural tolerance. Notably, Chinese and Indian migrant communities were granted citizenship rights at the time of independence. They were allowed to preserve their culture, language and religion, and hate crimes against the minority groups are largely unknown. In essence, Malaysia has created a melting pot, weaved in a rich cultural mosaic. This has resulted in the emergence of an extraordinarily multifaceted society with plural lifestyles. The preservation of inter-racial harmony appears to be the legitimising factor that props up the argument supporting the ruling elite's domination of the government, which gives credence to its idea that political organisations should consent to the larger programmatic mission of the state-representing-the-nation.

PSEUDO-RETIREMENT FOR MAHATHIR

Since Mahathir retired from premiership in 2003, there were many publications that tried to trace and highlight the important and controversial events and policies especially in pre and during Mahathir's administration, and his ideas that transformed the society and political scenes in Malaysia. Three most famous books are *A Doctor in The House: The Memoirs of Tun Dr. Mahathir Mohamad* (2011) by Mahathir himself, *Doctor M: Operation Malaysia* (2010) by Tom Plate and *Malaysian Maverick: Mahathir Mohamad in Turbulent Times* (2010) by Barry Wain.

Between these three books, Wain's book was the most controversial and almost being banned by the Malaysian authorities. *Doctor in the House*, stretching over 800 pages, varies in style. It varies in depth as well, with some subjects studied much more at length and in detail than others. It takes readers on a journey known to very few outside Mahathir's immediate family: from his earliest memories of childhood; through the most important events in the history of Malaya's struggle through the sunset of British colonialism, World War, and Independence; to his life as a doctor; his constant struggles as a politician to improve the lot of his fellow citizen; his single-minded pursuit of his country's goals; his greatest fears; and his most cherished hopes. Mahathir did explain his views regarding issues such as the sacking and imprisonment of Anwar Ibrahim, Internal Security Act (ISA) arrests under the *Operasi Lalang*, and personal view against death penalty.

Meanwhile in *Doctor M: Operation Malaysia* (2010) by Tom Plate was based on a series of conversation between the author and Mahathir. Plate intentionally drafted the chapters according to the titles of James Bond movies such as "Dr No" Became "Dr Yes", "Thunderball!", "Moonraker", and "For Your Eyes Only". In this book, Mahathir revealed his views on governing on Islam, Jews, the West and Malaysia. Nothing much discussion on human rights can be traced in the book. But Mahathir seems very consistent in his view about individual and group rights, arguing that "Think first of the rights and security of the group before the rights of the individual". He also talks about religious freedom must be practiced responsibly when he refers to such as in the issues of Muslim faith have no formal tolerance for homosexuality and blasphemy through the anti-Allah cartoons in the Danish newspaper. He is also skeptical on the notion of democracy by arguing that: "Democracy is a good system, but it has its weaknesses.... You know, there are limitations, and some people seem to think that if you go to war and make such-and-such country a democratic country (US in Iraq), you'll solve all their problems. It's the wrong thing to do. People must understand democracy before they accept democracy, because there is a limit to freedom. There is no absolute freedom for anyone". He also discusses many equally important issues such as the

New Economic Plan (NEP), *Bumiputera* problems, Anwar Ibrahim, Asian Financial Crisis and Americanisation.

One of the most controversial books written about Mahathir is entitled the *Malaysian Maverick: Mahathir Mohamad in Turbulent Times* (2010) authored by Barry Wain. In this biography of Mahathir, Malaysia's longest serving and best known Prime Minister, it shows that the Mahathir regime embraced an export-oriented market strategy, propelling Malaysia into the world's top 20 trading nations and dramatically enhancing the living standards of its people. Moreover, Mahathir created a legacy not just of economic growth but also of authoritarianism, cronyism and money politics. Malaysia under Mahathir moved firmly towards what Fareed Zakaria calls "illiberal democracy" or "semi-democratic", with patriarchs or one-party systems that make their elections ratifications of power rather than genuine contests. Wain does not suggest that Mahathir personally benefited to any great degree from the model of crony capitalism which he allowed to flourish. But his children and other associates also benefited. Wain argues that, Mahathir did systematically undermine the institutions of democracy to ensure his vast political power went unchallenged. As Wain puts it, he had an "authoritarian streak". Mahathir shut down newspapers and tightly controlled licenses for the printing and broadcasting media. Wain's even allegedly claimed that Mahathir had caused loss or squandered RM100 billion (US40 billion at the time) through mismanagement, corruption and financial scandals of gigantic proportions, the accusations which were denied by Mahathir.

Wain's account of the arrest and prosecution of Mahathir's then-deputy, Anwar Ibrahim, for corruption and sodomy episode reflect as a cynical attempt by Mahathir to sideline and disgrace a potential political rival. That he was willing to undermine the judicial system's integrity systematically, as well as publicly humiliating his former ally, causing public opinion to shift against Mahathir for the first time. For Wain, the episode exposed the deeply authoritarian nature of Mahathir's administration and the institutional rot that had set in during his long years at the helm. In this case, Mahathir had obviously disregarded

human rights in the episode of Anwar's black eye and ill treatment during detention.

MAHATHIR IN "NEW MALAYSIA"

It is undisputed that Mahathir was also instrumental in bringing down Abdullah Ahmad Badawi from power in 2009, in the post-12th General Election in 2008. He was responsible to promote Najib Tun Razak in power replacing Abdullah. Not long after his party BN poor performance in the general election, Abdullah faced an onslaught of critics, the most prominent among them were the former Prime Minister Mahathir Mohamad and his son Mukhriz Mahathir, who had openly called Abdullah to step down, not only as the prime minister but also as the president of the United Malay National Organisation (UMNO). This call was made for causing one of the worst election debacle for BN since Malaysia's independence. Mahathir followed by his wife and another son Mokhzani had left UMNO to protest Badawi's refusal to relinquish his position in the government and the party. Beside Mahathir's, there were other dissenting voices among UMNO's leaders and members in Sabah, Perak, Kedah, Penang, Selangor, and Johor who expressed their unhappiness with Badawi and asked him either to resign soon or set a time frame to pass the premiership to his deputy, Najib Tun Razak, who Badawi had appointed as his successor. After persistent pressures from the BN component parties and UMNO's leaders and grassroots, Abdullah finally resigned on 2 April 2009 as the Prime Minister of Malaysia and President of UMNO and handed over power to Najib.

Similar pattern took place when Najib performed poorly in the 13th General Election in 2013. Mahathir, like in the case of Abdullah previously, had asked Najib to step down soon after the general election. Instead of following Abdullah's footsteps to step down, Najib challenged Mahathir which caused Mahathir to quit from UMNO again on 29 February 2016. Najib also fired his Deputy Muhyiddin Yassin and Mahathir's son Mukhriz in 2016 after both criticised Najib in One Malaysia Development Berhad (1MDB) scandal. These circumstances had left Mahathir no choice but to

join force with the opposition against the mighty BN. Malaysia held its 14th general election (GE14) on 9 May 2018 as declared by the Election Commission of Malaysia. This is the first time that three coalition parties, namely *Barisan Nasional* (BN), *Pakatan Harapan* (PH) and *Gagasan Sejahtera* (GS) competed with each other to rule Malaysia for the next five years. Prime Minister Najib Razak, who led BN, aimed for a second mandate since 2009. However, he was challenged by his former mentor and also a longest serving Prime Minister for 22 years in Malaysia, Mahathir Mohamad. Amid the scandal surrounding Najib, such as the 1MDB issue, Mahathir formed the PH and collaborated with his former political foe, Anwar Ibrahim, to run against Najib. It was a comeback for Mahathir after retiring in 2003. Mahathir's political party PH, was formerly called *Pakatan Rakyat* (PR) when it coalesced with the Islamic Party (PAS). However PAS decided to leave the coalition and formed another coalition with smaller parties and a number of non-governmental organisations because of policy disagreements over Shariah law and Malay unity. The PAS-led coalition is named *Gagasan Sejahtera* (GS).

The outcome of GE14, an opposition alliance led by Malaysia's former ruler Mahathir Mohamad, 92 years old, had won a majority in parliament, a shock victory that ended the ruling BN coalition's 60-year grip on power. The PH won 113 seats—one more than required for simple majority—and the BN has 79 in the 222-member parliament. Bridget Welsh, a Southeast Asia expert at John Cabot University in Rome, attributed the opposition's surprising gains to Mahathir. Welsh argued that:

The person who has made this happen is Mahathir. He has been a significant game changer. He made people feel that a transition of power is possible...This is a repudiation of Najib's government from all walks of life from the very rural northern states to the more industrial southern coast.

The opposition was also sweeping state elections, including Johor where the dominant Malay party in the BN was founded. BN's rout was made possible by a "Malaysian tsunami", in which all major ethnic groups turned out to vote against the ruling coalition, it said. John Sifton, Human Rights Watch's Asia advocacy director said in *Aljazeera* that: "Nothing

less than a historic political earthquake is under way in Malaysia right now". The new PH promises to uphold freedom of political speech in Malaysia.

Mahathir has obviously sent a signal that he will uphold free speech in a "New Malaysia" under the PH government. For instance, Mahathir instructed the police not to prosecute a man who insulted him after the police in Langkawi arrested a man on charges of insulting the Prime Minister (Ramzy, 2018). During the campaign period, PH released a manifesto pledging to review and potentially abolish regulations that undermine free speech. These include the Seditious Act 1948, Prevention of Crime Act 1959, Prevention of Terrorism Act 2015, Communications and Multimedia Act 1998, and the Anti-Fake News Act 2018. Deputy Minister Hanipa Maidin, in the Prime Minister's Department, reiterated the commitment of PH to repeal repressive laws but asked for patience as the government prepares for broader reforms in the bureaucracy.

The intention of the government is to remove controversial laws such as the Anti-Fake News Act, the Universities and University Colleges Act (UUCA), and the Security Offences Special Measures Act (SOSMA). Tommy Thomas, who was appointed as Malaysia's new attorney general, said that repealing "oppressive laws" was one of the government's first legal priorities. He specifically named the fake news law and a national goods and services tax, adding that "the list of such laws is pretty long." Thomas also declared his support for free speech by saying that: "I am happy for everybody to criticize me; it's part of free speech....In fact, I'd rather listen to criticism than praises".

The Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) had used broad powers to block websites reporting on the 1MDB corruption scandal, including the UK-based Sarawak Report and regional news outlet The Asia Sentinel. The MCMC decided to unblock Sarawak Report and The Medium on 17 May 2018. In his recent address to the 73rd United Nations General Assembly on 28 September 2018, Mahathir has pledged that Putrajaya will ratify all remaining core United Nations instruments related to the protection of human rights. However, Putrajaya will not accept calls for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

(LGBT) rights and same-sex marriage. Mahathir said that LGBT rights and same-sex marriages would remain unaccepted by Malaysians, despite their acceptance elsewhere. At the same time, the government condemns any harmful attack or discrimination against these groups.

Mahathir gave the statement in the wake of the riots in the vicinity of the Seafeld Sri Maha Mariamman Temple in USJ 25, near Subang Jaya, on Monday 26 November 2018 and Tuesday 27 November 2018. He said that “No one can act as one likes in violation of the law and cause anxiety among the people and chaos in the country”. It is not the intention of the government to punish anyone blindly but democracy has its limits and everyone must understand these boundaries of democracy. Mahathir emphasised again that the incident was not racial or religious in nature but a criminal act which should not be given any room to ruin the inter-racial relations in the country. The government will not hesitate to take firm action against any provocative attempts as well as against those who try to challenge the country’s laws. Mahathir said that his government has pledged not to impose any barriers to news reporting and communication but this freedom must be used with full responsibility and not to exploit circumstances that may lead to inter-racial breakups and disharmony. The riots early Monday and Tuesday near the temple resulted in a firefighter Muhammad Adib Mohd Kassim was killed, several other people also hurt, 23 cars torched and public and private property damaged. The police have arrested 30 people so far to assist in the investigation into the riots. This incident raised a concern of hate speech and how Malaysia could have a tough law to eliminate hate speech.

In July 2018, Minister in the Prime Minister’s Department Mujahid Yusof Rawa proposed three new laws to criminalise hate speech — the Anti-Discrimination Act, National Harmony and Reconciliation Commission Act, and the Religious and Racial Hatred Act. So far, there is no new developments to the proposal yet. In September 2018, Communications and Multimedia Minister Gobind Singh Deo stated that there was a need to push ahead for laws on hate speech. He said such a law must have an “extra-territorial reach” to facilitate the prosecution of persons who reside abroad. Gobind was referring to a “turban remark” by

a London-based blogger against a senior Bukit Aman officer, Datuk Seri Amar Singh, which he regarded as an attack against, not only the officer, but also the entire Sikh community (Salleh, 2019).

Mahathir declared that the media is free to report even if the content is not friendly to the government. Observing media reporting since the GE14, Malaysia press is clearly more open now than before. Coverage has been given to all ruling and opposition parties even though the media prioritised official government statements and messages in the public sphere. The PH government has pledged to protect media freedom in Malaysia. Previously known as politically-linked stakes of BN, the mainstream media such as TV3, RTM, and the New Straits Times are now free to report balanced news across the political spectrum. Astro Awani for instance, has the freedom to dedicate its airtime to broadcast the extremes on both sides of the Malaysian political spectrum, PH leaders and the BN opposition leaders alike. In fact, for the first time, the opposition, UMNO's presidential debate was broadcasted live in July 2018. It is obvious that the mainstream media, the print and broadcast are being more open, unlike before; their freedom was restricted, covering the former government more favourably and giving limited and negative coverage to the opposition at that time, the PH.

The PH government urges the media to play the key role in providing the check and balance. Hence, media can practice an investigative journalism to work on subjects and free to expose flaws to ensure that those in power will not abuse the trust given by the people. In fact, the PH government has promised to implement the freedom/right of expression which includes the protection of whistle-blowers and the freedom to impart information in order to fight graft and abuse of power. As the guardian of the public interest, accountability and integrity are placed at the centre for the good of people. It is clear that media freedom is important in the "New Malaysia". Anwar Ibrahim, President of People Justice Party (PKR) said that one of the challenges for the new PH government was to ensure that there is media freedom in the country. Anwar in a speech at Grand Dorsett Hotel on 2 June 2018 explained that, media must be free to write about issues affecting the country so that

Malaysians can understand the steps taken by the government to resolve them.

With those brief backgrounds of the several significant events in Malaysian politics, the subsequent sections provide two interviews with Mahathir in 2010 and 2019. These interviews will trace Mahathir's opinion on many issues particularly in the pre and post "New Malaysia" starting with the year 2018. Hard and exclusive interviews with Mahathir make this book so relevant in understanding Mahathir's thoughts on issues such as values, leadership, socio-economy, human rights, religion etc. We can definitely understand Malaysia from the eyes of Mahathir as the longest serving leader not only in Malaysia, but the world.

CHAPTER 2

**INTERVIEW 1:
THE 2010 CHAPTER**

Date :	26 January 2010
Venue :	The Tower 1, Kuala Lumpur City Center (Petronas Menara), Kuala Lumpur, Malaysia

HUMAN RIGHTS

Author: My first question to Tun, what is human right in your view?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Human right is of course a new concept because human society had gone through many centuries where those in power considered them as authorized to do anything they like to the citizen and to the people, of course killing them or jailing them for a no real reason. So because of that, the concept of human rights was actually muted by European. Mainly (actually) Jewish people were prosecuted in Europe. So when they were prosecuted of course we force to do this (to accept human rights standard). People do not respect human rights but once they respect human rights then they cannot prosecute people without any reason. The Jews used to be in the ghettos. They used to be massacred by the European not by Asian, but by European, and because of that the Jewish thinkers together with some non-Jews began to think that it's not right and that's all there a certain rights that every human being should have (such as) that it is freedom from prosecution, freedom from injustice and other things and that is consider as human rights. The western thinking is that, it applies even to individual. However, in the West when they give human rights to individual, they forget the rights to societies. So they sometimes in the exercise of human rights by individual, they negate, (and) they destroy the rights of the society. So for them the individual is always right whatever the individual does, it considers as human rights. For us giving the societies also have rights and society is made up of human being also and all human being have rights so even if you want exercise your individual rights, it must not take away the rights

of human society. Our views even the Asians, that it is why we cannot support the Western concept of human rights one hundred percent. We look at the individual, we own the rights of individual but not to such an extent in the exercise of rights, they denied the rights of others.

***Author:** So I think there are arguments that especially right now that 'human rights' is universal so then you come out with the idea of Asian values, I think you popularised the concept, so do you think these two ideas are compatible; universal human rights and Asian values at same time?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Yes, that is their perception of human rights that the right of individual is superior to all other rights. We can't accept that because societies are made up of individuals also, the society, they also have their rights, so as much as the majority society cannot deprive the individual of human rights, his rights. That individual also cannot deprive the society of their rights. Here I give you an example. In America, they are certain very conservatives' people who live in suburban area. Of course, they maintain high moral standard that is also their rights, to maintain high moral standard it's their rights. Now, individual comes and puts up the cinema to show pornographic pictures. Now this undermines the morality of the children of these people. They have a rights to object to this deliberate undermining of their rights by these individuals, but when they went to the court, the court decided that this men's rights is superior to the rights of community so the judgment was that the community right is not important. What is important is (that) the rights of this individual to actually undermine the morality of the children of this community.

***Author:** So back to the point that you mentioned about morality, so probably because we are Muslim, our morality are based on Islam. So human rights see morality based on rationality. Probably our way of thinking about human rights is a bit different, so do you think Islam or culture play a crucial role in our definition of human rights?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Yes, if everybody has rights then the Muslims also have rights. They have the rights to live the way of the Muslim's. And of course the Muslims have got very strict rules regarding modesty. (Such as) that you cannot uncover yourself so because of that we, our morality standards required that women must be properly dressed. Men also must be properly dressed, women must be properly dressed, we (women) have to wear '*tudung*' (scarf), we (women) have to wear '*baju kurung*' (Malay women traditional dress) to cover the whole body except the hand and the face. That is their rights to exercise their own moral standard. But supposing the Europeans say no, you cannot do this. You must allow women to walk around with hardly any clothing, their swimming suit trunks. In fact in some Western society they even walked naked. Then you also see in Western society that they have accepted that marriage is not something that everybody must uphold. That if you don't want to marry but you want to live together, that is all right. They have also decided that the family is not made up of men and women married together, legally married together. You can have a family even if you are not married. You see around with somebody have a baby that is family, and sometimes man living with a man, woman living with a woman. This is their rights but that offends the rights of the Muslims. So you must respect the rights of the Muslims to have their own code of morality. If you say no (that) you shouldn't have this code of morality, you are denying the Muslim to have their rights to maintain their own standards of morality. If you don't allow them you have taken their rights.

Author: *So I think there are many Westerners accused you as anti-imperialist. Do you view that human rights' concept is being used as a tool by the West to further the agenda of imperialism?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: People should be free to live, free from oppression and subjugation by other power. That is their rights. So we find that one race takes over the land of other race, you are denying that race their rights. So imperialism is not in accordance to human rights. If you believe in human rights you should free people. After that, it is their choices what they want to do. Let say, you cannot say well even though

you are free, but you must obey this and that, then we are not giving them freedom. Like now they say well you must have globalization even it damages your economy, 'you must!' you denying his right to determine what he wants. It is against human rights.

Author: *So in overall, how is the condition of human rights in Malaysia right now? Is it better?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: I think we have been very fair right from the beginning. Right on the day when Tunku Abdul Rahman decided that although the non-Malays' residence in this country did not qualify according to the provision of the law to become a citizen (because) you must (have a) command of Malay (language), etc., he threw that out, and said we give the citizenship to one million non-Malays irrespective of their qualifications. You see now that is now beyond human rights. You are disregarding your own law in order to favor the Chinese. So how can you say the Malays are denying the others their rights, you see. These people came here not because we invited them, the British invited them to come here. The Indian is the same because the British brought them here. This is our land *Tanah Melayu* (Malay Land) but we are happy to give to them, one million citizenship. In the process of that we reduced our majority from 80% to less the 60%, you see. '*Siapa yang nak buat macam tu*' (Who want to do this)? And then you say that we are denying their human rights. And in other area, they are denying us our rights in business, in university, in every field they're denying our rights, you see. But Malays are not able to argue about this like, '*tak patut la macam tu*' (it's not fair like that). So I don't know what happen to the Malays, they don't even know what they get and what others got, you see.

ASIAN VALUES

Author: *I want to go back to your idea of Asian values, What is 'Asian values' in your view?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: 'Asian values' is slightly different. We accept human rights, but we meant human rights of everybody not just one individual. Supposedly one individual wants to disrupt the whole country by exploding a bomb, that's takes away the rights of the majority, they want to live in peace and the individual wants to use a bomb to destroy the society, that is not acceptable. But the West seems to think that anybody, anything a man does is right but if the society object then it's wrong because when the man does something that denies the rights of the society. Then of course it is also a denial of human rights.

Author: *Do you think Asian value is still relevant because I think no other leaders in Malaysia talked about Asian values anymore now?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Well, I'm not the only one (laugh), no, Lee Kuan Yew also talked about Asian values. We have certain values that we have to restraint ourselves, you know you cannot just because you're free we have freedom of the press for example, therefore you can say in press nasty things about other people, tell lies in the press. That is not right because you're denying the others person rights. He may not be able to reply because he may not have the access to the press or to the media. So that is a denial of human rights of other people. Although we have freedom of speech, freedom of press, freedom of religion et cetera, we have to respect the rights of others people. (It is) also not only your rights. I mean supposing you say it is my rights I want to walk into the church naked. I mean you're offending, taking away the rights of the church rules. You see that is wrong, that is Asian values. Respect not just one man rights but the rights of every man.

Author: *Okay, back to the Asian values, I think there're arguments or debates that you tended to prioritize certain rights rather than others rights. You*

prioritized economic, social and cultural rights rather than civil & political rights.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: We prioritised because this thing used to benefit directly to the people but when you have the civil society in which the people like the NGOs undermined the rights of others that we cannot allow. You see, you can have your rights, you want to take action you can go somewhere which doesn't impact on other people. That is your rights, but you don't have a right to undermine others people's rights. That is why you want peace and stability, so as to improve the growth of economy that benefits a lot of people. This is their rights, you see, but when we have a few people exploding bombs like you see sometimes on TV they have suicide bombers. I mean they do that thing and they deny the rights of the community to live in peace and doing business for themselves, you see. Remember, this people also may be very poor when you explode the bombs somewhere no more people come to that place to buy things and this people who suffer.

***Author:** Back again to Asian values, one of the principal that you argue is that as multicultural society like Malaysia, we need to have a strong government but for liberals, they argue that government should be limited, so what do you think about these two principals of human rights?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: There must be a balance. We don't want a strong government, so strong that he just can do anything he likes. In other words, he can deny the rule of law. That's not what we want. On the other hand if we have strong government and because of that it establishes much more stable society. That is good but if we have weak government and a lots of people started making demand and demonstrating and breaking the laws and not giving due regard to the rules of law then of course the weak government cannot handle the situations. And when weak government cannot handle these situations, it denies everybody's human rights because now they cannot living in peace. There are tensions. They can't do business. They cannot travel around and they're exposed to all kind of security risks and that is what happened when there is a weak government.

FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF THE MEDIA

Author: *Okay, back to the question about freedom of speech and freedom of the media that you touched just now. Now we're turning to the bloggers. So do you think that we still want to maintain the status right now freedom in the cyberspace. You know, there are many perceptions right now especially from government that bloggers tend to manipulate things and everything? So what do you think?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Yes, here, what is happening with bloggers is that they do not have access to mainstream media. That is denial of their rights. So they go to the Internet where they can express themselves. Even though they can express themselves they must not tell lies to undermine the security of the nation. You know supposing the man writes on their own certain ways; we have information that somebody going to explode a bomb in the market. I mean, that is the denial of human rights of others because it's not true in the first place, so you cannot abuse your rights. We have the rights to tell the truth to argue the case. You don't have rights to say things which are not true in order to create troubles because if we have trouble then other people lose their rights. Even the rights to demonstrate for example, you have rights to do demonstration but you have also to remember that when you demonstrate other people suffer. Ordinary other people (are) suffering. They (are) a lot of people doing business in the streets and you are carrying out daily demonstration. You are taking the rights of the people who are doing business. Now they cannot do business so whose right is more important? You want to do demonstration, you go to the field and demonstrate there then you don't take the rights of other people. But when you demonstrate in the streets especially when you become violent then of course you're denying the rights of other people that (are) trying to make a living in the street.

Author: *But they can argue that they didn't get permit to hold such demonstration so that's why they go to the streets?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: If you don't get permit, the thing to do in democracy is for you to campaign, you can campaign not only by demonstration, campaign another way and try to bring down the government, change it and have another government.

HEADING TOWARDS TWO PARTIES SYSTEM

Author: So now I think since the 2008 general election, there are tendencies among people to demand to have more civil and political rights, even some argue probably we are heading toward two parties systems. So what do you think about the future of or even current Malaysia?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: It is correct of course the rights for them to demand but the effect is for the other party also to make demand and then you create tension. When you create tension of course the stability of the country is undermined and when the stability is undermined, everybody suffers. You lose your rights to live in peace. So if you have a demand, you should negotiate peacefully and not start making an irresponsible accusation. Should we have, in the result, some counter remark by the other party and then there would be confrontation, tension and even violence. I mean, which at that stage of course that you are undermining the whole country and the people cannot live in peace and they cannot do their own business and make a living. To that extent, we cannot let them to have their rights to undermine the whole country.

Author: So do you think we are heading toward the two parties system?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: I don't know whether it is two parties system because this party system is nothing to do with human rights. You see, it's just because we have two parties system it doesn't mean that there will be human rights. We have seen countries using two parties system which do not allow for human rights in many areas. It's not that two parties system which will uphold human rights, it's the quality of leadership that we choose.

REFORMS THE LAW AND NATIONAL SECURITY

***Author:** So the other things that argue by many human rights activists is that as long as we have laws such as the Internal Security Act (ISA), Official Secret Act (OSA), the Printing Presses and Publications Act (PPPA) and so on, we still don't have human rights in Malaysia. So do you think probably we need to abolish, repeal, or amend the law?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: We have a law, so when the government uses the law, means it stills the rule of law. The law allows the government to detain the person before he commits the crime because after he commits a crime, he has caused a lot of troubles. Stopping him is not worth anymore although it may take into the cost but the thing is done already. That is Malaysia. Now compare it to England and America, they have no such law, no ISA, but when they were attacked by terrorists or at least they claimed to be attacked by terrorists, they detained a lots more people without the benefit of the law. They cannot see we're detaining you because the law allows us to detain you. They just detain people without benefit of the law. Therefore, they are not ruling according to the law, and yet they have done this. And so they are worst then us. We (the government) rule(s) according to our laws. They (the Western governments) have no laws yet they detain, not one, two but thousands of people. And not only that their Congress, American Congress, actually legislates to allow torture to be carried out against the prisoners that have been detained. Torture is definitely against human rights. We cannot torture people. We can detain people but cannot torture them. So they (the American) are worse than we are. We have a law and if you don't want a law then parliament is there. Parliament can say we don't want this but as long as the parliament does not abolish the law, the law is there so we act according to the law. We are must better than the Britain or the US because they acted before they had the law to permit them to detain people. So they are breaking, but not really breaking the law because there's no law. They are breaking the principals of the rules of law.

***Author:** So I take back to the ISA. The arguments are that why it's against human rights because there's provision that allows for detention without trial. Is it totally acceptable to the context of universal human rights? Besides, there is also an issue of the power of home minister to detain, so do you think this should be maintained or should be reviewed or else?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: This is preventive law. Preventive law means that you take action before the crime is committed. Now you see a man is about to stab another man but he hasn't stab yet but you know he is going to stab it. Are you saying wait I will only act against you, after you have stabbed me. So really (with the) act the man is dead, but that's not good enough. Soon you must be able to act when he is attempting to kill a person. He is obviously going to kill the person now that is our case. We detain people because we think they are going to create unrest in this country. They are creating security problem in this country. That is our view. Now in the case of America, America wants to invade a country as a preemptive act that is to say before there is any attack on America. America will invade because they think (that) there might be an attack. That is worst (because) they are prepared to kill people because they think that maybe this people are going to attack us. And they have done this to hundreds of thousands people. So pre-emptive war is the worst kind of preemptive actions that can be taken. In our case we have preemptive law that tries to prevent a crime from being committed because they are signs that this crime is going to be committed. That is they are going to undermine the stability of this country. So we have rights to attack them, to detain them. Then they are some cases like a drugs distributions. It's difficult to find enough evidences to convict the person. So if you go to the court, the court says we don't have much evidences but we know that this man is involved in drugs distributions. And we have to put a stop of that so they are detained under the ISA as a preventive action. So that is quite justified you see. Before he commits the crime or if you know he commits the crime that you cannot find the evidences to prove it but everybody knows that this is the persons who have been distributing the drugs. Nobody comes forward to be witness because they are afraid. You know if you become a witness you may be

killed later on. So under such circumstances, we use the preventive laws. We acted before or without enough evidences to take him to the courts. So these are some of the detainees in Malaysia, they're not political detainees. They are security risks so they have to be detained. But of course in the case of the West, they, just because they imagine a small state, very weak state and it's about to attack America which is an absurd, they will already go in and kill people, in order to put stop a war (that) has not yet taken place.

***Author:** Maybe the reason to maintain such law like the ISA is to protect our national security. I think SUHAKAM came out with one report in probably 2002 or 2003, mentioning that we actually favor or give more attention on national security rather than human rights. Then SUHAKAM argue that we need to balance between these two. So do you have any idea how to balance these?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: National security is to protect human rights. You know, these people are going to do something violent and because of that it's an attack on security. When we ensure there is security you are protecting a lot of others people from being deprived, their life and right to live in secure situation, to live at peace because this people are threatening to act violently. So as usual we give priority we live the rights of majority rather than the rights of one individual.

SOCIO-ECONOMY AND THE NEW ECONOMIC POLICY (NEP)

***Author:** Well, now we move to a bit different issue which is about rights to development. So I think we know already that New Economic Policy (NEP) as probably the policy that tried to eradicate poverty and to improve or restructure our society. However, many also argue that for example with the HINDRAF demonstrations that Indians claimed to have been marginalized. Some also argue that there is indication of that, the NEP did not equally distribute the wealth of nation among races.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: You look at this first. You mentioned HINDRAF just now. You see they are being denied their rights because they are marginalized. What is the situation before the NEP, the Malays (and) the indigenous people were marginalized. You want to go into the business you have to deal with the Chinese. Chinese got their own network and they are not going to help you. You see and in fact let see how the Chinese business people would treat the Malay contractors. Supposing they want to build up a building, tend to be a 50 stories building, Malays can never get anything at all from that. The Chinese can. So the government has got to correct the imbalance by giving Malays the chance, so it seems like the government is favoring the Malay but it is because the Chinese are not giving a chance to the Malay. So we have to make corrections that their development will not be so far apart. Today if you make survey you make the total audit of wealth, you will find that the Chinese are far wealthier than the Malays. You see, so we need to have the government to help the Malays to catch up with the Chinese. But if the Chinese of course are willing to employ Malays as their managers, give contracts to the Malays and not consider as (what they have been practiced) now. (Such as) They even advertise in the newspaper, you must be Mandarin speaking (then) therefore they will employ you. That is discrimination against the Malay so how do you correct the discrimination. This is blatant discrimination yet you don't talk about that. You see this is because of this discrimination by the Chinese against the Malay. The government has to discriminate in favor of the Malays. If the government doesn't discriminate in favor of Malays, they don't give the Malay a chance. (If) The private sector is not giving the Malay a chance, they are going down completely. Supposing they take scholarship, well a lots of Malays have got their education are because of scholarships. Supposing we go entirely based on merits, most Malay are qualified to go to university they have minimum of qualifications even more than the minimum qualifications but they are not the best student. We take only the best students and the Malays will never come out. So we discriminate because we want to reduce the disparity in the wealth of the Malays and the Chinese because if we keep on insisting because of merits

for example when you keep on insisting than of course the disparity is a denial of human rights.

***Author:** The argument is that even if we have the development in Malaysia, the targeted group that we suppose to support such as the poor from the rural area, didn't receive development that the government promises. Actually, the development didn't come. The wealth of the nation is dominated by some who have close relation with the elites. Only small number of people who are benefitted from the NEP?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: That is something that has been put in your mind by others but if you look carefully the poor has been benefitted by the NEP. If you go to a kampong in Malaysia you'll see roads, tarred roads. You see water supply. Before this, (there is) no water supply. You see electricity where before there is no electricity in the villages. And you see the children of the kampong people are able to go to the university even university in the US as well. You make a study (that) most of those people who got scholarship are the children from Kampong, Kampong people. How many cronies have got from the government (scholarship)? Not many you see but the number of children who got the scholarship run into thousand every year and mostly they are from poor families. If you look into the background of many educated Malay, you'll find that they come from a poor family and has not connected to any of the prime ministers. And this is something that you have been put in your mind because you without thinking just say the same things. And even look at the numbers of Malays who have succeeded in business. Everybody knows that we give a lot of contracts, a lot of licenses, lots of AP to a lot of people but some of this people do not do business. They sell, so we have to stop giving them. But we give to those (who) genuinely use their contract, the AP, their licenses and genuinely use their licenses and all that to do business. So they become rich. The others wouldn't. They do not become rich because of they are selling for all that you give to them and you want to say these are the cronies? Well, in the first place these people, they deserve to get rich because they have the ability to do this, to make use of it. Secondly, almost in the small community among the Malays almost

all of them would know somebody in the government. The people who got also did not succeed. They are many who know the ministers and the prime ministers but did not succeed. But you don't see them because you focus on the few people who succeeded and say well these are the cronies of the government. In other words, in order for being accused that you are helping only your cronies, you must ensure that every Malay failed. When every Malay failed, one tells this is very good because they are no cronies of the government but then how do you see the NEP becoming successful if the Malays are only in the lower income (group) and the rich are all the Chinese so the disparity is there. So now the NEP wants to equalize not only with the poor but also the rich as well. If the Chinese have billionaire the Malays must have billionaire also, if the Chinese is the shop-owner, then the Malays also must be the shop-owner. You see it is fine for them to become the shop-owner, or become clerk in school. He mustn't be allowed to come up. (If) He comes up, he must be cronies. You see, that's the accusation. I don't know most of the people who have succeeded. I don't know them at all. Of course after they succeeded I get to know them. I don't know the Chinese (business tycoon) also because they were successful that why they become Tan Sri. And whatever you see so why this Malays are so easily taken by this suggestion that they are the cronies of the ministers, it's not, you see. In my family, my own children never had a chance while I am a Prime Minister. Only after I stepped down that they have got a chance to go into politics or doing business, before they were not going (into) business. But (they were) not (going into business) with the government. Even now they are not doing business in the government. But people will still see, he is favoring his children. But what is the truth. Have I ever promoted, I could have promoted my son to become a minister but I didn't, even to (become) the ministers, not even deputy minister or parliamentary secretary. You see, so you have taken up by this people who wanted to attack the NEP as being unfair, it is not achieving its purpose because only the cronies. But the thousands of Malays, doctors, lawyers and engineers, are these people all from rich families.

Author: I was one of the products of NEP actually.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Where was your father work?

Author: My father was a teacher.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Teacher, did he know the prime minister?

Author: Yes.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Hah? Your father knows the Prime Minister. Is that why you got the scholarship?

Author: No.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Nah! That means you have the ability. You see in the examination some people get good marks, some people would failed, some people would pass but not in the top marks. We have to help this people also otherwise we give to the top all the tanks. This people will never get chance to climb up the ladder, and then we wouldn't be improving by this people. Oh yes, NEP is good, it means to help the Malays but it is only happen to the cronies. So when you see a Malay succeeded, then it's a crony, doesn't matter whether he was known to the prime ministers or not. He is succeeded, so he is crony but when the Chinese succeeded who is the friend of prime minister that is not a crony because he's Chinese. You see but I have friends, Tan Sri Vincent Tan, Tan Sri Teh Hong Piow and all of them, they all succeed because they have capacity to succeed. And of course if they can do something we cannot deny them you see. If we can do something which other Malays can't do, they can see all because they are not Malays that is wrong. But we have to help correcting the imbalance (such as) in the university. Early during my role as Prime Minister, there was no private university, only government's university. And of course we want to correct the imbalance, we have to give more scholarships to the Malays but they (the Chinese) also get scholarships. They are not denied but today we have thirty government

universities, thirty private universities. Have you ever examined the private university?

Author: No.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: You should examine (that) ninety percent of them (the students are) non Malays.

Author: Yes, that's correct.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: That is the fact why do you not complain, why do you have 90 percent of non- Malays? You should reduce it and give some places to the Malays. Why is it that '*sini dah banyak, sini yang kita ada pun dia nak ambil*' (there, in private universities, they, the non-Malays, have plenty places, but, here they want also our places, in public universities). So what do we get? What do we get? Nothing. It's the same in business. We give contract to the Malay contractor from the government but that because in private sector that the Malay contractor cannot get anything, cannot get at all. To supply cement (in construction) '*pun dia tak bagi pada Melayu, dia bagi pada Cina*' (is also given to the Chinese, not the Malay). '*Dia takda*' (There is no) transparency, they don't question. Do you know how much Hong Leong gives its contract? Do you know how much Vincent Tan gives his contract, how does he do it? Is there tender? No, even if there is a tender, they favor their own people but why is it we never question that. You see why we don't question that. Why they are discriminating against the Malays. You want to know. Here they will say (that they) don't discriminate us, the Malays. Not capable of that is the different thing but the fact is that Malays don't even bother the tender for Chinese project because they wouldn't get it. Why is that it is not highlighted? What is the government trying to correct is what is happening in the private sector. '*Kalau government pun tak bagi sini pun tak dapat apa jadi*' (If the government didn't give to the Malays, so what will happen)? I'm sorry to say but Malays '*bila dia*' (when they) focus on the government, '*ya, tak patut la, kita dapat 60%*' (it's not fair to get 60%). I mean we made 60% of the populations, we have decided that only

30% of the wealth or corporate wealth should go to the Malays. We ask only for half, they (the Chinese) are now already almost (get) 50%. They were 30% at the beginning, now, they are (getting) 50% of the corporate wealth. So *'kita dah tinggal ke belakang'* (we have left behind), and yet there are Malays say *'tak patutlah kita buat niaya kat Cina'* (we should not discriminate the Chinese). *'Oklah you tak usah ambil lah'* (Okay, you don't have to get the contract or wealth). The people, who say that, are the people who have received the scholarships. You should give up your scholarships. You should give back your *'sijil'* (certificate or degree) and say that sorry I don't want to have this because it is not fair to give this to me in this education. I want to go back to become a laborer like my father. You want to say that.

1 MALAYSIA, EDUCATION AND NATIONAL UNITY

Author: *So now Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak came out with his concept of 1Malaysia. So do you think he could rectify a few things that you mentioned?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Well the first thing to rectify is (that) we should have only one school.

Author: *'Sekolah Wawasan' (vision school)?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: (It is) because we want to bring people together. Once you have three (vernacular) schools, you cannot bring people together. Once you allow three different languages as teaching mediums then you don't speak one national language. In every country in the world including the developed country there is only one school system. In English speaking world they have English speakers and if it is in German then it's German as teaching medium. In America, English is a teaching medium. The (American) government doesn't pay for the schools that teach in other languages. If you are the Chinese there, you say well you must set up the school for me to teach in Mandarin (no way that happens). But in Malaysia we are very generous. We allow not only

the Chinese and Indian as teaching languages, we actually pay money to them to setup the school. So how come you say we deny human rights? You see we are giving beyond what others people have given. You know in Indonesia? No way they can have a Chinese school, even in Thailand no Chinese school, the Philippine no Chinese school. And yet Indonesia has got more Chinese, in terms of number, in terms of percentage is low, and in terms of number they have more than us. The same way (was) to the Philippine, same way (was) to Thailand. Thaksin (Thaksin Shinawatra, former Prime Minister of Thailand) is Chinese but he can't open the Chinese school, but he is Thai, he speaks Thai.

***Author:** So probably that 1Malaysia concept, do you think this concept similar to the other concepts or slogans that we used to have like the Malaysia Boleh and also this concept could bring prosperity to the Malaysia?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Well it can, if it can be implemented as I said, but it cannot be implemented. That is an objective or target maybe ten years for now maybe (or) fifty years from now you might become 1Malaysia. That is the target today. (However) You allow for Chinese schools teach in Chinese, you allow for the Tamil school and of course the children of the people who decide that you should have this three languages. They don't send their children to the 'Sekolah Kebangsaan' (National School).

***Author:** But they also argue that it is their rights to have their own school, Chinese and Indian school?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Why do they have the rights? When the Chinese in Indonesia, Indonesian citizen, don't have a rights, the Chinese in Filipina don't have rights, the Chinese in Australia don't have rights the Chinese in New Zealand don't have rights. Once you become an Australian you speak English, very soon you will forget your own mother tongue. And you go to English school you don't question why you are teaching me in English, I'm Chinese you'd teaching me in Mandarin. Have you ever heard them protesting? In America, have you ever heard them protesting

why the mandarin is not use in the school, government school? Not even as the 2nd language. You know you can't have a right. You don't have teacher to teach you Mandarin, 'takda' (you don't). So why do you say it is their rights because they are here?

Author: *So that's it. Thank you very much Tun for the interview.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: You are welcome.

INTERVIEW 2: THE 2019 CHAPTER

Date :	11 March 2019
Venue :	The Prime Minister's Office, Putrajaya, Malaysia

PRIME MINISTER FOR THE SECOND TIME

***Author:** Tun, we have three types questions that we want to ask you. One is general questions, second is more specific to education and then several extra questions that we want to ask you. First question related to you as a Prime Minister, so now you are second time as a Prime Minister, you have been Prime Minister before. So even though is it not fair for us to ask you how different between the first and second so but of course we need Tun to answer how do you feel managing the country in second time compared to the first time, in terms of challenging and everything?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: The first time when I became Prime Minister, I was from the government of the day. I was a trainee, I was already in the government as deputy and before that as Minister. The administration of the country was in place there were not many problems. So, it was quite easy for me just to take my post and then I was able to promote certain ideas that I had and my ideas as a Prime Minister is to make known to the cabinet, cabinet agrees and then it is implemented. There is no problem. Everything was in place. No major obstruction but this time around is quite different. I come from the opposition party and I replace the existing government of the day and that government has been in place for sixty years. Immediately you have a problem of a change in the power structure in the country. We find that the thing is the civil servants who are used to previous government and find it difficult to accept (the change of government). People who opposed to the previous government and, in a way, opposed to also to the civil service. So their cooperation becomes a problem which we have to win over. Of course

some we have to take action against who are involved in activities that are detrimental to the nation, to get rid of them. So firstly we find that the machinery of the government is not very forthcoming in supporting the government. The machinery of the government has been supporting the previous government for sixty years. Now they are going to support a government that was of the opposition. Although according to democracy the civil servant must remain neutral, must accept the policies and the actions of the current government. But somehow rather it is not easy for them and sometimes of course we found difficulties to carry out our objectives. See (based on that) of course, this time around the country was in a very bad shape. Mainly was because the previous government had borrowed huge sums of money. But having borrowed that if the money is invested we know where the money would be. But the money was also stolen. So we cannot get back the money that was lost by the previous government. So that means because of the debt is very big. The situation (is that) the finance of the government is very weak and we find it difficult to implement project et cetera. And thirdly we find that the previous government had committed many actions which were criminal. And we had to take actions against that, but in taking actions against them and the wrongdoings sometimes innocent people became affected. For example if a project is given to a contractor, at an exorbitant price and some money was stolen. But when we want to stop that project, thousands of workers suffer. It's not our intention to make them suffer because the mistake was done not by them but by the government. But unbearably if you delay projects or you cancel projects, they suffer. And sometimes the contract is so huge that we want to stop the contract. But to stop the contract unilaterally results in our having to pay a lot of compensation. Yet if we don't stop the project we have no money to carry on. So these are many difficult problems and this time around of course I wouldn't be around for a long time. I have to do things quickly. So now I have to work extra hard in order to manage all these problems.

THE CIVIL SERVANTS

Author: *Actually I am interested more to understand when comes to your first point, civil servant. So they were, you know what they believe in the government and the party. Actually, (there are) not differentiate between the government and the party. When there is a change of government, then suddenly they still hold their loyalty to the previous parties. So, do you have any plan to overcome this problem, change their mind-sets of the civil servant or etcetera?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: We have to take action because I guess those who actually did wrong (things). But on the other hand, the others before they can commit themselves to supporting this government, they want to know also whether this government will do things that are good for the country. Sometimes their loyalties to the previous government make them critical of the present government. So what we do is we try to explain to them, why we are doing certain things which are caused by the previous government. On the other hand, when we try to stop contract services (were) unfairly priced, many workers lose the jobs. So we have a dilemma here. If we don't stop then the government lose their money. If we stop then people suffer.

ON MAHATHIRISM

Author: *I want to continue the question with regards to Mahathirism. You have been known (that) you have your own types or styles of leadership (during) your first time as Prime Minister. So now we want to know actually, straight coming from you, whether you believe in Mahathirism or not.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: No, I never gave that name to what I do. I do what I think is right, that is good for the country. I see when I became Prime Minister, the country was still very dependent upon rubber, upon palm oil, upon tin but lots of people were unemployed. So we had to stop the problem and to do that we have to go into industries because industries employ more people. So in the process of course, we find that

we are the country (that) has become richer. And when the country is richer, we have to attend to infrastructure. So what I did was what is normal, is nothing unusual. I don't know why people should call it Mahathirism. The only thing is I am, I believe in looking into the details. If I make a decision, I want to follow that decision until it is implemented. So I go around to see even construction sites. I asked (that) all projects must be reported to me, the progress through pictures, dated pictures, so that I know that, what we decide, is being carried out. Of course I don't tolerate people, who are sloppy in doing things. They must apply and implement the policies of the government. So that's only different, I like to micromanage decision of the government and of course in foreign affairs I am I feel that when something wrong is done, I don't care who did- who did the wrong things, I will voice out my opinion of that.

ASIAN VALUES

***Author:** And another question when it comes to values, I think you are also propagating positive values to strengthen the society. During your first period as a Prime Minister, you were propagating Asian Values. So, do you think that Asian Values are still relevant today because I think recently Pak Jusuf Kalla, former Vice President of Indonesia even asking Indonesian to go back, to the idea of Asian values. You know that the Asian values are not only propagating by you. Lee Kuan Yew (and) Suharto (also propagated the Asian Values) before. So what do you think in the way forward for us, do we still need to uphold to this idea of Asian Values?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: What we see is that Asians like to copy the West. They copy even the wrong things. The morality of the West for example, when their morality deteriorate, we follow, we accept, what they see as the thing to do. But I find that the Asian Values are in themselves very good for the wellbeing of a person, of a community, of a nation. For example, Asian Values believe that you should be loyal to the country. Although you may criticise, you must be loyal. Of course sometimes loyalty involves loyalty to a bad government and that is bad. But it is still good to have a good more stable nation than to have a nation in turmoil

with many action been taken to disrupt the stability of the country. So as compared with Western values I think Asians (Values are) very superior. I will give you one example, we all wear clothing, every one of us wears. We like to wear normal clothing but the West decided that it is very modern to wear torn clothing- 'baju koyak' you know. And so they tear the trousers and all that and they wear that and they think this is great. We (think), it is not Asian, it is Western. We Asians are very concerned about our behaviour, about feeling ashamed of doing certain things. But today we see in the West, ideas like LGBT where freedom is translated into a discarding all moral values. See the West, I am notice this over the years. First in the West, people used to wear gown which reach the floor covering the leg and then become shorter and shorter until now it almost not wearing any clothing. But Asians like to follow that. They shouldn't. Our value is our value. We still believe in marriage for example. Marriage is sacred to us. For them (the Westerners) is no longer. I mean you want to live with someone, you live someone and then you want to separate, you separate because you must be free. But Asians values still believe in institution of marriage of family. A family is a married couple with children but now in the West, people have children without being married and without having setting out a family. Sometimes man and man get married and then they adopt a child and they called that a family. So, Asian values are in many ways superior to Western values. So, that is why I feel that we should be proud of our values. Why do we want to wear torn clothing? I can't understand it at all but I find that the young people do that. I am afraid my grandchildren are doing that.

EDUCATIONAL REFORMS

***Author:** Okay Tun, now we post you a question which is more related to education. As we all know that your intention at the beginning was to hold the portfolio of education- as the education minister- after you won the election. Because of the manifesto forbid you to hold that position, so, what we are curious to know about what exactly that you had in mind when you wanted that position. What reforms do you actually want to do for*

education? We know that now the ministry (of education) tries to do many things. But actually we want to know, what your idea (about reform) is? Can you go specific about it?

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Education is about giving knowledge to the people, so that they are better qualified to deal with the problem facing them when they grow older. When they grow older of course they need to have an income. With education, there are much more likely to get a good income. If they are totally uneducated, the income will be very small, because the capability is very much lessened. So I believe that if you give people the right kind of education then they will be successful in life. And when an individual is successful in life then, it then the whole community will be successful, whole nation will be successful. So if you want to improve and grow the country, you have to have good education relevant to the demands of society. If the society demands that there should be more engineers then we should train engineers. But sometimes people say, well, education is about the arts. You have to know about history and geography and literature. But sometimes those knowledge are not useful to you in later life. So education has changed from merely being able to read and write. In the old days not many people could read and write partly because they want to understand the religion. But today education is about preparing a person so that his knowledge can help him achieve a better life. He can work and do things which he would not be able to do without education.

***Author:** So, by looking into our current situation on our policy of education, so what actually reform that you plan to do for education?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Today we have the advances made by science. Advances which have led to new technologies, these new technologies are fantastic. What we couldn't do before we can do now. I always point out that in the past you have a broad, big house for a broadcasting station to broadcast all the news and whatever. But today that broadcast house, full of equipment of broadcasting is now in your pocket. From with your telephone you can broadcast to the whole world.

Everybody can hear you, everybody can see you even. So, if we are still talking about how to make baskets, to then of course the person will not able to improve his life. But education today must be concentrated on the sciences because it is scientific research that enables us to do, to identify electronic capabilities, radio capabilities, et cetera. And these also mean that, you are ready to be employed because you have this knowledge. So today education must focus on the new knowledge, the new technologies, the new sciences and the new research that has to be done, to continuously come up with new ideas and new product that will help to make life easier for us.

***Author:** The ideas of you venturing into new technologies I think require funding. For example in university, the problem for us is always about funding and university is depending too much on the government to support. Very small number of industries that give support. So your role as a Prime Minister, how you can really encourage or even to ensure the universities for example, are well funded and receive assistance from the industries including the endowment. So how you can play your role in helping this?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Well, that will never be enough money for research. You always want more money because money will finance the equipment you have to use, the number of people et cetera and the highly trained researchers, all cost money. But we are very much afraid that if you allow the universities to go into a business, then they will neglect the academic part of their work. But in many countries now research results by the universities, can be put into IP- Intellectual Property and registered, and it can be sold, and that university will gain money and that money can be again used for research. In many countries that has already been done but here (in Malaysia) it has not been done it properly. It should allow research result and researchers, the department and the university, to gain financially from the result of their research. Then there will be a contract research that universities and other research institutes should accept contracts to carry out research in certain areas as required by the private sector or by industries. So that we (believe) the financing on research would be easier, and more money would be available. But

as long as you do research just in order to acquire knowledge, without focusing on the application, then of course they would never be enough money.

***Author:** So, what about the universities in Malaysia, do you think all of them for example public universities, are they performing very well right now compared to other university around the world, the best universities?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Most universities in Malaysia are not adequately finance for good research, but I think over time the idea will be accepted that research is important. That it is a duty of government and society to finance research. When you have that kind of mind-set in the society then more money will be channelled towards research. And we will enrich ourselves because of like discovery of transistor. First you have the valve, and that enables us to have radios and the like. And then we discovered the transistor, for in that we discovered that the transistor too can be reduced to a small size until thousands of transistors can be printed on a small chip. All these are the result of researches. Without research we cannot do what we are doing today. We can for example, sense, what is around us. A car can sense that there are some obstructions, the line on the road. The car can see and tell the driver that this is the line on the road. You just have crossed the line. You are now in the different lane. All these things are the result of research and also research on application; the power of the microchip is great. But just looking at the microchip, you wouldn't know what it can do, but if you understand what the microchip can do then you use that knowledge in order to apply for certain kinds of work. Maybe in order to recognise faces. Now facial recognition is one way of identification and they are motorcars now which are without drivers. (Can you) see? Simply because the car is always reading what is around it. If there is an obstruction, the car tells itself to slow down or to stop. So these are the result of research. And once you discover research, discover something, you now have to think about the application. You have laser for example. Well, laser can be used to point at something but now laser can be used to guide missile.

So all that comes along when you understand the power of the discovery you have made.

***Author:** Tun, you know that we are from the Universiti Utara Malaysia and you are the one who established the university- the founder of the university. So, how do you see UUM so far? Has it managing well right now? Or as you know that we are Management University. Just now you talk a lot about technologies, so how you can see UUM in the future as Management University?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Well everything can be achieved if you know how to manage. Management is the most important thing in achieving any project, any plan or any industrial business. Whether you are in a government or in a private sector is how you manage things that produce the result. Everybody knows that, well, maybe car engine is an internal component, but how do you manage (to produce engine in) the manufacturing? To reduce the cost and everything, how do you market it, how do you promote it, how do you sell it, how do you ensure that the cost is not too high, the value is enhanced, all these things require research. Multifaceted technology. So you have to arrange yours, not research, I mean management. You have to arrange the management system, have to have a head, you have to have supporting staffs, you have to have ground staffs, all these required the ability to put (management) in place. In the correct place that people who will do certain thing. So that what you want (them) to do, is achieve. So that is the management whether in the government or in the private sector. What we see is that very predictive kind of management that you see people try. They see for example, someone going into what this calls due diligence. You go into the selling of a watermelon. You don't know the price. You don't know what the price should be. How much it should be for the supply? What is the cost of transport? And all these things must be put together and manage before you get the result.

POLITICAL FINANCING

***Author:** Okay Tun, now we move to some extra questions. We want to ask you related to our different research. First is about political financing. As you know, Malaysia doesn't have a law catering on the issue of political financing. In fact, we actually want to introduce a new law on this. So how do you see, what kind of political financing's law that we want to introduce. There are many models that we are observed practising around the world. We observe that German's model is perhaps the model that Malaysia wants to follow. So what kind of Malaysian models that we should produce when it comes to this reform of political financing?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: This is very complex. We started off without any particular guidance on how politics should be financed. I remember when I was contesting in 1964, the party gave me RM10,000. I had to divide the RM10,000 into RM4,000 for me as member of parliament and RM3,000 each for the two state assemblymen (under my constituency). A small sum but it was completely and quite sufficient for our use. But now this runs into millions (of ringgit) because people are more sophisticated. We have to counter the attacks against us. We had to spend money to employ people, set out cyber troopers, all kind of things have to be done, in order to promote ourselves. We (thus) need a lot of money. Sometimes running into millions, but how do we get the money? Well, we depend upon the supporters. People will support us. People will donate money because they believe in our struggle. They believe in the right things we are doing so they gave us money. Now when they gave us money, it influences our thinking then that donation becomes a bribe. You see, later on (when) you form the government, you favour the person who gives you the money. That is unfair to other people, but what can we do? We need the money. So until now this government has not yet decided on the best way to finance politics, without the possibility of the system be used, to influence the government. So we have to think our way. In America of course all business gives a lot of money to finance election. As result usually the government who support business because they get money

from the business. So the poor workers who cannot support the election will get less attention.

***Author:** So, I think, because I also involve in the consultative committee on political financing before and we already come out with the proposal actually already submitted to you, I think? Then you decided to hold and to come out with a new proposal because in our original proposal, we don't allow funding from the government. So do you think that probably the government should fund political parties? So do you think it is suitable in the context of Malaysia to fund many political parties or do you have any different ideas on that?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: The problem is how much we have to give. Do we give the same amount to all political parties? Or do you have a certain criteria as suitable amount you give. A big party will get more money, a small party will get less money but the people will complaint that it is not fair to the small party. On the other hand, you give the same amount to the other parties, everybody will be forming political parties, just to collect the money. So it is not easy to decide for the government to pay because we need to have criteria, fair criteria. We haven't identified the best way to finance (yet). So at the moment, it seals into our minds the possibility of the government financing but we are trying to figure out, how do we finance without being bias in favour of somebody.

HUMAN RIGHTS

***Author:** Now we go to different questions about human rights in Malaysia. Is it becoming a big (human rights) issue when it comes to LGBT. Now we also talk about freedom of speech, even I think Yang Dipertuan Agong mentioning in today's morning parliamentary opening. So in general how do you see our human rights' condition in Malaysia whether we are really good, compared to other countries or we still have a lot to improve?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Well, lots of people say that we are not free enough, that freedom is restricted. But nothing that can you get, can be

absolute, can be limitless, (hence) there must be a limit. Even you have been given a freedom of a press, but the press must not print or advertise about anything like fake news for example or run down somebody, for political reason or because you dislike the person. You have to be fair also and very careful about, you see, your freedom. I mean you can't go up to a man and curse him and when he asks "why do you curse me?" "It's my freedom of speech." That's not right. So you have to accept that in any society there will be limitation. The whole idea of having laws, is to limit some of your freedoms. You cannot steal for example, because law will punish you if you steal. Many things are restricted by law because it is good for the society. So the freedom you get is not absolute. It is limited by the laws of the country, the practices of the country, (and) the moral values of the country. Some countries are able to see this. But in some (other) countries being naked is alright. In our country, we won't accept that. LGBT for example, this is an idea from the West. It destroys their moral values but they are asking us to have the same. I don't think we should copy. They want to be free, let them be free but when it comes to our country they must respect to our laws and our moral values. But now they are going to pressure (us). If you don't accept LGBT then we will cut off trade with you or destroy your economy, in some way by sanctions et cetera. So, that in itself is denial of freedom. We have to have a right thing to do in our way, to have our own values. So this is always a bone of contention because the West will always say we lack freedom. We have given freedom to vote, freedom to make speeches and all those but there are certain things that we cannot do. In Malaysia, which is a multiracial, multi-religious population, if you allow a man to insult the religion of another man there will be riot, the country will not be stable. Like recently they had a picture of a Prophet and all that, and insulted a Prophet. It is a small thing for them, but for the Muslim, it is a big thing, you can't do that. So we have to take serious. Yes you are free, but the limit is that, you don't exercise your freedom at that expense of other people. So that is very important, because the sensitivity of the community must be honoured, must be respected by everyone. So I admit we are not liberal democracy. We are not but we find that it is being eroded

because there will always be someone who wants to have full freedom and they will agitate. They will write against those things and all those. But in Malaysia, I think we have multiracial, multi-religious society and moral values are very important to us. So we cannot follow liberalism that you find in some Western countries.

***Author:** Recently, I think we accede to the Rome Statute meaning that we recognise the International Criminal Court.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: See if the important thing is freedom, and you have a system that does not allow freedom then it is not democratic. Now the Rome Convention is great, but we must have the freedom of choice. There are things that they agree they practice which we cannot practice. If you deny us to reject some of the practices there you are denying our rights or our freedom. So when I said we will follow the Rome Convention, we mean that when they are suitable for our society. Our society is different. All people are not the same. Every country got their own value system and if we are not allow to have our own value system, it is denial of our freedom. So that is something that we believe in, that you must take away of our freedom but insisting that, you must accept their value. These are not even their values before. I mean that their own religion forbids them from doing certain things but now because of the freedom without limit they have evolved to the point where they reject their own values. If they want to do it that is their right but imposing it on us means denying us our freedom.

TERRORISM VIS-À-VIS RACISM

***Author:** In 2015, we had a research about the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) or Daesh. We had an interview with Datuk Ayob Pitchay, Head of Terrorism Unit of the Special Branch. We asked him a question, "Is ISIS an immediate threat to Malaysia?" He said, "No". So we asked back, "what then". He said "Racism is the immediate threat to Malaysia". What do you think about this Tun?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Well, the religion. All the religions are supposed to bring about good things especially the Islamic religion because (in) Islam we tell everybody very proudly. Islam is not only a religion it is also a way of life. So what is the way of life? Most Muslims don't know what the way of life is. What they are doing now is not the way of life. For example, Islam forbids killing, murder. You cannot murder a person that's wrong if you kill a fellow Muslim you will be sentence to hell forever. But what are we doing? We are murdering. We are killing people by the thousands. We are, I mean you can see *Daesh*, cutting off the head of people with a short knife. You know if you chop the head, maybe the pain will be only instantaneously dead. But when you give a short knife and they do that just imagine the suffering. That is forbidden in Islam. So many people are doing things in the name of Islam which is totally against the teaching of Islam. For example, in our country, we have this political party which claims that the people who are not in the party are not Muslim. So then there is now a new condition attach to becoming a Muslim. Apart from your enunciation of the declaration of faith "*Lailahailallah Muhammadarrasul*" you must also say "I am member of this party." then only you become Islam. Which is totally wrong because the whole world cannot be a member of that party and yet they are very proudly to say they are Muslim, they are practising Islam, every now and again they shout "*Allahu Akhbar*". I mean you are doing something wrong and then you link it with Islam that is wrong. That is what is happening to the Muslim world today because it is not the religion. The religion is perfectly good. It is even very moderate kind of religion, very concern about the welfare of the *Ummah*. Every time you talk you say "*Bismillahirrahmanirrahim*". In the name of Allah The Merciful, The Compassionate and then you cut off his head. Is that right? Cannot be right, you see, but these are people say they are doing things for Islam and this is what *Daesh* is doing, you know. Where before Muslims were not fighting Muslims. They simply say that they are Islam. They simply cut off people head. They kill people. They commit acts of terror against Muslim in order to set up Islam. Doing all these things (are) forbidden by Islam, in the name of Islam. So that is where we are lost now because we

don't believe the teaching of Islam. We believe in our leader in our Imam and that kind of thing. If you read the Quran, you will find that all the behaviours promoted by Islam are very good, very clear. If you follow, you will succeed but you don't follow. That is the problem.

POLICY ON WOMEN

***Author:** I really want to ask Tun since from Sintok until here, taking the opportunity of meeting you in person. Tun, we know that one policy was introduced before for women, which is the thirty percent (quota) policy. Tun, (referring to) woman in public sector as well as woman in corporate decision making, we could see that the thirty percent of woman in corporate decision making has been implemented and making a good success. You know that we are almost reaching thirty percent but unfortunately the one in the politics, which introduce in 2004, until now failed to reach the targeted number. Tun, we have achieved independence for so many years, what went wrong Tun? And then in the PH government, we have this huge hope and faith, can something be done Tun? Can we really break the number?*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: If you look at the number of woman in the cabinet for example, there are more women.

***Author:** Sikit tu (too small)...*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: But more than before. You must remember that nothing can happen overnight. Everything has to change gradually. People has to accept and for the women to be more in the government, the women must be very aggressive, must win the popularity. If they are popular, they win. But some of them are not popular. You know even in service, they are fully qualified and then they have married. And then they have a family and they stop. Doctors, who have taken six years to study to become a doctor, decide not to be a doctor because she married. These kinds of thing, give the men more opportunities, and the women less opportunities. In Malaysia, fighter pilots are women. You don't see many of these, you know, in any Muslim countries. We are going in that

direction but beyond saying that we must have women, the woman also must come forward and be willing. And in the police force now very senior officers are women. We have made that progress that has to be acknowledged. But if you, I think even if you double or treble you still won't reach thirty (percentage quota). The women who are really aggressive, they have been given the jobs. You go to the government service, many of the KSUs (Secretary General in the Ministries) are women now not men. And many of the engineers are also women. But the process, you can't have things change overnight. It takes time.

***Author:** It takes more than sixty years, Tun.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: Sixty years is nothing. Sixty years is nothing compared to other country. You know you look at the people in Saudi Arabia wearing the hijab and things like that, they don't allow woman to even drive a car until lately.

***Author:** That is all Tun. It was pleasure to have you Tun. Thank you very much for your time.*

Tun Dr. Mahathir Mohamad: My pleasure too. You are welcome.

INDEX

A

Abdullah Ahmad Badawi A7
Anti-Fake News Act A9
Anwar Ibrahim A5, A6, A8, A11
Asian values A2, A14, A17, A18, A35,
A36

B

Bridget Welsh A8
Bumiputera problems A6

C

Communist party A4

D

Democracy is a good system A5
Doctor in the House A5

E

Election Commission of Malaysia A8
European not by Asian A13

F

Far Eastern Economic Review A1

G

Gagasan Sejahtera A8
Grand Dorsett Hotel A11

H

Hard and exclusive interviews A12
Human right A13

I

If you believe in human rights A15
Indonesian citizen A30
Internal Security Act A5, A21
Islam forbids killing A45

J

John Cabot University A8

L

LGBT rights A10

M

Mahathirism A1, A2, A34, A35
Malay contractor A28
Malay women traditional dress A15
Management is the most
important A40
Mukhriz Mahathir A7

N

National Harmony and Reconciliation
Commission Act A10
New Economic Policy A23
No major obstruction A32
Now facial recognition A39

O

One Malaysia Development
Berhad A7
Only small number of people A25
Ordinary other people A19

P

People Justice Party A11
Preventive law A22
Prime Minister A1, A2, A6-A10, A26,
A27, A29, A30, A32, A34, A35,
A38

R

Racial conflict A1

S

Sarawak Report A9
Secretary General in the
Ministries A47
Security Offences Special Measures
Act A9
Shad Saleem Faruqi A4
Similar pattern A7

T

Tanah Melayu A16
Thaksin Shinawatra A30
They kill people A45
Three most famous books A4
Tunku Abdul Rahman A16

U

United Malay National
Organisation A7

V

Vice Chancellor A2

W

Western concept A14
Western countries A44

Y

Yang Dipertuan Agong A42

Tentang Penulis | The Authors

Profesor Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani berspesialisasi dalam bidang politik dan hubungan internasional. Ia dikenal sebagai pakar dalam teori dan filosofi politik, hak asasi manusia, kebebasan sipil, politik media, demokratisasi dan politik Malaysia. Dia lulus dengan gelar Doctor of Philosophy (PhD) dalam bidang Politik dan Hubungan Internasional dari Keele University, Inggris pada tahun 2007. Mengenai karirnya sebagai akademisi di UUM, Prof. Azizuddin dipromosikan menjadi Guru Besar di Fakultas Studi Internasional (SOIS), Kampus Hukum, Pemerintah dan Studi Internasional (COLGIS) pada tahun 2016 pada usia 41 tahun.

Prof. Azizuddin telah menyumbangkan keahliannya sebagai intelektual publik lokal dan internasional. Dia terlibat dalam advokasi publik dan diwawancarai oleh banyak lembaga media tentang urusan Malaysia dan internasional, seperti RTM, TV3, Astro Awani, NTV7, TV9, Channel News Asia, Media Indonesia, Wall Street Journal dan Bloomberg. Pendapatnya digunakan dalam liputan banyak media *mainstream*, seperti Bernama, Berita Harian, Utusan Malaysia, New Straits Times, The Malay Mail, Sin Chew Jit Poh, dan Sinar Harian. Bahkan, dia adalah kolumnis untuk



**Prof. Dr.
Mohd Azizuddin
Mohd Sani**

School of International
Studies, Universiti Utara
Malaysia

Email: azizuddin@uum.edu.my

Professor Dr. Mohd Azizuddin Mohd Sani specialises in the fields of politics and international relations. He is known as an expert in political theory and philosophy, human rights, civil liberties, media politics, democratisation and Malaysian politics. He was graduated with Doctor of Philosophy (PhD) in Politics and International Relations from Keele University, United Kingdom in 2007. Regarding his career as academic in UUM, Prof. Azizuddin was promoted to Professorship attached with School of International Studies (SOIS), College of Law, Government and International Studies (COLGIS) in 2016 at his aged of 41 years old.

Prof. Azizuddin has contributed his expertise as *public intellectual* locally and internationally. He involved in public advocacy and interviewed by many media agencies on Malaysian and international affairs such as the RTM, TV3, Astro Awani, NTV7, TV9, Channel News Asia, Media Indonesia, Wall Street Journal and Bloomberg. His opinion was used in the coverage of many mainstream presses such as the Bernama, Berita Harian, Utusan Malaysia, New Straits Times, The Malay Mail, Sin Chew Jit Poh, and Sinar Harian.

Berita Harian sejak 2012 dan telah menerbitkan lebih dari 150 artikel. Artikel-artikelnya yang diterbitkan di Berita Harian dari tahun 2009 hingga 2015 dicetak ulang oleh University of Malaya Press dalam sebuah publikasi buku berjudul “Dinamika Wacana Politik Malaysia dan Antarabangsa” (2017). Dia juga kolumnis untuk Sin Chew Jit Poh.

Azizuddin diundang oleh pemerintah Malaysia untuk merumuskan dan memantau beberapa kebijakan nasional dan negara. Dia dulu ditunjuk oleh Kantor Perdana Menteri sebagai Anggota Komite Konsultasi Nasional tentang Pendanaan Politik dari tahun 2015 hingga 2016, dan masih menjadi Anggota Dewan Penasihat untuk Lembaga Penelitian dan Pelatihan untuk Integritas Nasional (IKLIN) (2017-2019). Dia adalah Anggota Dewan Penasihat untuk Fakultas Hukum dan Hubungan Internasional, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) dan merupakan Penulis Tamu (Karyawan Tamu) untuk Departemen Pendidikan Tinggi (MOHE) Malaysia pada tahun 2011. Prof Azizuddin juga diundang oleh Divisi Urusan Hukum, Kantor Perdana Menteri pada tahun 2012 untuk berpartisipasi dalam perumusan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional. Dia diangkat sebagai Anggota Dewan Profesi Nasional pada 2017. Dia berpartisipasi dalam banyak diskusi dengan banyak lembaga dan LSM mengenai masalah politik, sosial ekonomi dan pengembangan pemuda seperti Institut Integriti Malaysia (IIM), Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), dan Institut Darul Ridzuan (IDR).

Di UUM, dia adalah Direktur Pusat Penelitian dan Manajemen Inovasi (RIMC) dari 2017 hingga 2018. Dia adalah Dekan Fakultas Studi Internasional (SOIS) dari

In fact, he is the columnist for Berita Harian since 2012 and has published more than 150 articles. His articles published in Berita Harian from 2009 till 2015 were reprinted by University of Malaya Press in a book publication entitled “Dinamika Wacana Politik Malaysia dan Antarabangsa” (2017). He is also the columnist for Sin Chew Jit Poh.

Prof. Azizuddin was invited by Malaysian government to formulate and monitor some national and state policies. He used to be appointed by the Prime Minister Office as Member of National Consultative Committee on Political Financing from 2015 till 2016, and is still a Member of Advisory Board for Research and Training Institute for National Integrity (IKLIN) (2017-2019). He is a Member of Advisory Board for the Faculty of Law and International Relations, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) and was a Guest Writer (Karyawan Tamu) for the Ministry of Higher Education (MOHE) Malaysia in 2011. Prof Azizuddin was also invited by the Division of Legal Affairs, Prime Minister Office in 2012 to participate in the formulation of National Human Rights Action Plan. He was appointed as Member of National Professorial Council in 2017. He was participated in many discussions with many agencies and NGOs regarding issues of politics, socio-economy and youth development such as Institut Integriti Malaysia (IIM), Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), and Institut Darul Ridzuan (IDR).

In UUM, he was the Director of Research and Innovation Management Centre (RIMC) from 2017 till 2018. He was the Dean of School of International Studies (SOIS)

2011 hingga 2013. Dia adalah Anggota Senat untuk tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017. Selain posisi-posisi itu, ia adalah Ketua Program Urusan Internasional di Sekolah Tinggi Hukum, Pemerintahan dan Studi Internasional (COLGIS), UUM dan Ketua Studi Ketahanan Nasional di Institut Tun Dr, Mahathir's Thoughts (IPDM), UUM.

Di tingkat internasional, Prof. Azizuddin dianugerahi *Fellowship Grants* (dua hibah penelitian) dan ditunjuk sebagai *Visiting Fellow* di Institut Studi Asia Tenggara (ISEAS), Singapura pada 2014. Juga pada 2014, ia diangkat sebagai *Visiting Professor* di National Institut Pengembangan dan Administrasi (NIDA), Bangkok, Thailand. Pada tahun 2016, Prof. Azizuddin diundang oleh Kantor Luar Negeri Jerman sebagai salah satu ahli untuk memfasilitasi pembentukan kebijakan Deradikalisasi (Deradikalisasi) untuk Pemerintah Jerman. Dia sebelumnya telah berhubungan dengan banyak kedutaan asing di Malaysia terutama Turki, Jerman, Qatar, Belanda, dan Indonesia.

Azizuddin telah menerbitkan artikelnya di banyak jurnal lokal dan internasional di mana 34 artikelnya diindeks oleh ISI, SCOPUS dan ERA seperti dalam Jurnal Ilmu Politik Jepang, Jurnal Kontemporer Asia, Jurnal Ilmu Politik Asia, Politik dan Kebijakan Asia, dan Pendidik Media Asia Pasifik. Dia dulunya diundang sebagai Dewan Editorial Penasihat untuk jurnal Manusia dan Masyarakat dari Universitas Malaya dan Jurnal Studi Internasional dari UUM. Prof. Azizuddin telah menghasilkan 13 buku akademik/penelitian dan dua di antaranya diterbitkan oleh ISEAS Singapura.

from 2011 till 2013. He was Senate Member for year 2011, 2012, 2013 and 2017. Besides those positions, he was the Chairman for the Programme of International Affairs in College of Law, Government and International Studies (COLGIS), UUM and Chairman of National Resilience Studies at the Institute of Tun Dr, Mahathir's Thoughts (IPDM), UUM.

In international level, Prof. Azizuddin was awarded with Fellowship Grants (two research grants) and appointed as Visiting Fellow in the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore in 2014. Also in 2014, he was appointed as Visiting Professor at the National Institute of Development and Administration (NIDA), Bangkok, Thailand. In 2016, Prof. Azizuddin was invited by the Federal Foreign Office of Germany as one of the experts to facilitate the establishment of *Deradikalisierung* (Deradicalisation) policy for the Federal Government of Germany. He was engaged previously with many foreign embassies in Malaysia particularly Turkey, Germany, Qatar, the Netherland, and Indonesia.

Prof. Azizuddin has published his articles in many journals locally and internationally where 34 of his articles were indexed by ISI, SCOPUS and ERA such as in Japanese Journal of Political Science, Journal of Contemporary Asia, Asian Journal of Political Science, Asian Politics and Policy and Asia Pacific Media Educator. He used to be invited as Advisory Editorial Board for journal Manusia dan Masyarakat (Man and Society) from University of Malaya and Journal of International Studies from UUM. Prof. Azizuddin has produced 13 academic/research books and two of them were published by the ISEAS Singapura.

Dalam hal penelitian, ia berhasil menyelesaikan 3 hibah internasional (2 disponsori oleh ISEAS dan satu oleh Jaringan Studi Hak Asasi Manusia Asia Tenggara dan Jaringan Universitas Asean). Azizuddin juga berhasil menyelesaikan beberapa hibah nasional seperti 5 FRGS, 2 ERGS, 1 LRGS dan 1 masing-masing untuk hibah yang ditawarkan oleh Institute for Youth Research Malaysia (IYRES), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Gerakan Global Moderat (GMM)), ditambah beberapa hibah UUM atau universitas. Pada 2016, ia ditunjuk oleh MOHE sebagai Panel Assessor untuk hibah nasional yang ditawarkan oleh MOHE. Dalam hal pengawasan, ia berhasil mengawasi dan menghasilkan 16 lulusan PhD. Selain itu, ia secara teratur diundang sebagai Penilai untuk 31 tesis PhD dan 17 tesis Master/disertasi dari banyak universitas.

In term of research, he managed to complete 3 international grants (2 sponsored by ISEAS and one by Southeast Asian Human Rights Studies Network and Asean University Network). Prof. Azizuddin managed also to complete several national grants such as 5 FRGS, 2 ERGS, 1 LRGS and 1 each for the grant offered by the Institute For Youth Research Malaysia (IYRES), Ministry of Youth and Sport and Global Movement of Moderates (GMM), plus many UUM or university grants. In 2016, he was appointed by MOHE as Panel Assessor for national grants offered by MOHE. In term of supervision, he successfully supervised and produced 16 PhD graduates. Moreover, he was regularly invited as Assessor for 31 PhD theses and 17 Master theses/dissertations from many universities.



Azahar Kasim saat ini adalah Dosen Senior/Ketua Komite Internasionalisasi/Direktur Pelaksana Ruang Berita Digital Terpadu di Sekolah Teknologi dan Komunikasi Multimedia, Sekolah Tinggi Seni dan Ilmu Pengetahuan, Universiti Utara Malaysia yang berspesialisasi dalam bidang Teknologi Komunikasi dan Media (Jurnalisme). Dia petugas khusus (media) untuk Wakil Kanselir UUM, Prof Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak, mantan Direktur Komunikasi Perusahaan UUM. Dia juga mantan Petugas Khusus untuk mantan Wakil Rektor UUM, Tan Sri Nordin Kardi. Masa jabatannya bersama Universiti Utara Malaysia baru memasuki sebelas tahun, tetapi kontribusinya terutama untuk Media & Teknologi, Penyiaran dan Jurnalisme sangat terasa, dan disiplin mata kuliah itu telah pindah ke tonggak baru kemajuan dan pencapaian. Hari ini, di bawah kepemimpinan dan komitmen akademisnya, Sekolah Tinggi Seni dan Ilmu Pengetahuan telah mendirikan IPTV sendiri untuk televisi, portal berita, radio *online*, surat kabar, majalah, dan berbagai publikasi untuk pembaca internal dan eksternal.

Keberhasilan yang dicapai sejauh ini, adalah atribusi pengalaman Azahar delapan belas (18) tahun sebagai editor senior dan eksekutif, dan reporter dengan berbagai media seperti Harian Metro, Watan, dan organisasi media lainnya.



Azahar Bin Kasim

School of Multimedia
Technology and
Communication,
Universiti Utara Malaysia
Email: w_azahar@uum.
edu.my

Azahar Kasim is presently a Senior Lecturer/Chairman of Internationalization Committee/Managing Director of Digital Integrated Newsroom at School of Multimedia Technology and Communication, College of Arts and Sciences, Universiti Utara Malaysia specializing in the area of **Communication and Media Technology (Journalism)**. He special officer (media) for Vice Chancellor UUM, Prof Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak, former Director Corporate Communication UUM. He also former Special Officer for former Vice Chancellor UUM, Tan Sri Nordin Kardi. His tenure with Universiti Utara Malaysia is only getting into his eleven year, but, his contribution particularly to Media & Technology, Broadcasting and Journalism is greatly felt, and the discipline has moved to a new milestone of progress and achievements. Today, under his academic leadership and commitment, College of Arts and Sciences has established its own IPTV for television, news portal, online radio, newspaper, magazine and various publications for internal and external readers.

The success achieved thus far, is an attribution of Azahar eighteen (18) years of experience as senior and executive editor, and reporter with various media like Harian Metro, Watan, and other media organizations. Capitalising on his diverse experiences

Memfaatkan beragam pengalamannya dalam pelaporan berita dan pekerjaan editorial, Azahar juga seorang peneliti, konsultan, dan pelatih aktif di bidang minatnya lintas institusi publik dan swasta di Malaysia. Penelitiannya seperti Politik Media Tradisional vis-a-vis Media Baru di Ruang Publik: Studi Model Media Malaysia Dari Perspektif Teori Habermasian; Implikasi Media Sosial pada Industri Media di Malaysia; Cakupan Portal Baru Online Pada Pemilu 2013 di Malaysia dan banyak lagi. Juga artikelnya di dalam buku seperti Demokrasi di tempat kerja di Malaysia; Pemilihan Umum 13: Refleksi dan Perubahan Politik; Pemasaran Politik di Malaysia dan banyak lagi. Dia juga menjadi Juri Anggota untuk lebih dari enam Penghargaan Pers Malaysia dari negara bagian yang berbeda setiap tahun dan Penghargaan Reporter Kesehatan, di tingkat nasional dan negara bagian.

Dia juga anggota aktif dari berbagai lembaga non-pemerintah seperti Asosiasi Nasional Jurnalis dan Penulis Melayu Malaysia (PKWPMM) dan Perhimpunan Sarjana Komunikasi Malaysia (PERSKOM) dan banyak lagi. Azahar saat ini terlibat dengan berbagai pekerjaan penelitian, konsultasi dan pelatihan tidak hanya dengan sektor publik dan swasta Malaysia, tetapi di tingkat internasional. Pekerjaan konsultasi terbaru Azahar adalah Ketua iCOMTOUR yaitu Pengembangan Profesional Berkelanjutan UNESCO 2009 untuk Pelatih Guru Bangladesh; Kunjungan Belajar Universitas Amerika di Kairo 2009; Bahasa Inggris untuk Komunikasi di berbagai universitas di Thailand seperti Universitas Bansomdej Chaopraya Rajabaht, Bangkok, Universitas Nakhom Pathom Rajabaht, Kanchanaburi, Bangkok dan Tepsetry University Bangkok,

in news reporting and editorial jobs, Azahar is also an active researcher, consultant and trainer in his area of interest cutting across public and private institutions in Malaysia. His research such as *The Politics of Traditional Media vis-a-vis New Media in the Public Sphere: A Study on the Model of Malaysian Media From The Perspective of Habermasian Theory*; *Implications of Social Media on Media Industry in Malaysia*; *The Online New Portal's Coverage On 2013 General Election in Malaysia* and more. His also article inside the book such as *Democracy at work in Malaysia*; *General Election 13: Political Reflections and Change*; *Political Marketing in Malaysia* and more. His also member jury for more than six Malaysia Press Award from different state every years and Health Reporter Awards, at national and state level.

He is also an active member of various non-governmental agencies like Journalist and Malay Writer National Association of Malaysia (PKWPMM) and Communication Scholar Association of Malaysia (PERSKOM) various a like. Azahar is presently involved with various research, consultation and training jobs not only with the Malaysia public and private sectors, but at international level. Most recent consultation work that Azahar is Chairman i-COMTOUR are the 2009 UNESCO Continuous Professional Development for Bangladeshi Teacher Trainers; 2009 American University in Cairo Learning Visits; English For Communication for various university at Thailand such as Bansomdej Chaopraya Rajabaht University, Bangkok, Nakhom Pathom Rajabaht

dan lain-lain. Singkatnya, latar belakang profesionalnya, pengalaman dan pelatihan kemudian dan keahlian dalam media dan teknologi serta penyiaran dan jurnalisme telah membantunya untuk memberikan dan menyesuaikan pelatihan kebutuhan media untuk organisasi yang berbeda, badan-badan perusahaan, dan kelompok-kelompok kepentingan lain di Malaysia.

University, Kanchanaburi, Bangkok and Tepsetry University Bangkok, and others to name a few. In short, his professional background, experiences and later training and expertise in media & technology, broadcasting and journalism have helped him to deliver and customize media needs training to different organization, corporate bodies, and other groups of interest in Malaysia.



Dr. Ummu Atiyah Ahmad Zakuan adalah dosen senior di School of International Studies (SOIS). Dia adalah Koordinator untuk Sarjana Manajemen Urusan Internasional (BIAM) dari 2016 hingga 2018. Saat ini, dia adalah Kepala Unit Penelitian Negara, Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi, SOIS UUM. Bidang keahliannya adalah ilmu politik, demokrasi dan gender, dan hak asasi manusia. Dia memperoleh gelar pertamanya dalam Ilmu Politik dari International Islamic University Malaysia (IIUM), Magister Hukum (*International Law*) dari University of Hull, Inggris dan Doktor Filsafat (Ilmu Politik) dari International Islamic University Malaysia. Dia aktif dalam masyarakat sipil melalui partisipasinya dalam LSM perempuan di Kedah,



**Dr. Ummu Atiyah
Ahmad Zakuan**

School of International
Studies, Universiti Utara
Malaysia

Email: [atiyah@uum.edu.
my](mailto:atiyah@uum.edu.my)

Dr Ummu Atiyah Ahmad Zakuan is a Senior lecturer at the School of International Studies (SOIS). She was the Undergraduate Coordinator for Bachelor of International Affairs Management (BIAM) from 2016 until 2018. At present, she is the Head for the State, Human Rights and Democratization Studies Research Unit, SOIS UUM. Her area of expertise are political science, democracy and gender, and human rights. She obtained her first degree in Political Science from International Islamic University Malaysia (IIUM), Master of Law (International Law) from the University of Hull, UK and Doctoral of Philosophy (Political

Pusat Wanita untuk Perubahan (PKWK), pada saat yang sama, terus terlibat secara aktif dengan masyarakat dalam isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap anak-anak, pelaku intimidasi, narkoba dan kepemimpinan di antara anak-anak sekolah.

Dia telah menerbitkan sebuah buku berjudul “Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Malaysia”, IIUM Press (2019), dan ikut menulis buku dengan Mohd Azizuddin Mohd Sani, berjudul “*Democracy at Work*” dan memenangkan penghargaan oleh UUM sebagai Best Edited Book pada 2017. Dia juga ikut menulis beberapa bab buku seperti “Kepemimpinan Wanita Dalam Parlemen Malaysia: Keperluan, Cabaran dan Halatuju” Penerbit UMK (2017), “Pemberdayaan Ekonomi Wanita di Negara Berkembang: Reengineering Patriarchy?”, IGI Global (2016), “Pengungsi Perempuan dalam Konflik Bersenjata: Perempuan Sekarang dan Masa Depan dalam Ekonomi dan Sosial” UUM Press (2015), dan “Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dari Perspektif Islam dan Barat”, Penerbit Universiti Malaya (2007). Dia juga menerbitkan artikel yang diindeks dan Scopus. Dia juga terlibat dalam beberapa penelitian, yang terbaru termasuk Profiling Perempuan di dalam ISIS dan Radikalisasi Mereka di Malaysia (2019), Perilaku Memilih Perempuan di Malaysia (2019) dan Model Politico-Legal Pembiayaan Politik (2019).

Dia juga diundang sebagai pembicara utama di beberapa konferensi internasional di luar negeri dan diundang sebagai pembicara dan pelatih oleh konferensi dan agensi

Science) from International Islamic University Malaysia. She is active in civil society through her participation in a woman NGO in Kedah, Women Center for Change (PKWK), at the same time, continuously engaging closely with the community on issues like domestic violence, sexual violence against children, bully, drugs and leadership among school children.

She has published a book entitled “Women in the House Leadership in the Malaysian Parliament”, IIUM Press (2019), and co-authored a book with Mohd Azizuddin Mohd Sani, entitled “Democracy At Work” and won an award by UUM as the Best Edited Book in 2017. She also co-authored several book chapters such as “Kepimpinan Wanita Dalam Parlimen Malaysia : Keperluan, Cabaran dan Halatuju” Penerbit UMK (2017), “Women’s Economic Empowerment in Developing Countries : Reengineering Patriarchy?”, IGI Global (2016), “Internally Displaced Women in Armed Conflicts : The Present and the Future Women in Economic and Social” UUM Press (2015) dan “ Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dari Perspektif Islam dan Barat”, Penerbit Universiti Malaya (2007). She also published indexed and Scopus articles. She also involved in several studies, the latest include Profiling Women in ISIS and Their Radicalization in Malaysia (2019), Female Voting Behaviour in Malaysia (2019) and Politico-Legal Model of Political Financing (2019).

She was also invited as keynote speakers in several international conferences abroad and invited as speaker and trainer by local conference and agencies. She had

lokal. Dia telah memberikan pelatihan kepada staf Kementerian Wanita, Pengembangan Keluarga dan Masyarakat tentang *Gender Mainstreaming* pada tahun 2018 dan kepada delegasi dari Kementerian Wanita Bangladesh pada tahun 2017 tentang berbagai kebijakan tentang pemberdayaan perempuan di Malaysia. Dia juga terlibat dalam proyek konsultasi dan penelitian tentang pengungsi dan imigran ilegal di Malaysia dengan IPSOM, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018. Dia juga muncul di TV dan Radio negara bagian mendiskusikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pemilihan, perempuan di parlemen dan anggaran nasional.

given training to staffs of the Ministry of Women, Family and Community Development on Gender Mainstreaming in 2018 and to a delegation from Bangladesh Ministry of Women in 2017 on various policies on women empowerment in Malaysia. She also engaged in consultation and research project on refugees and illegal immigrants in Malaysia with IPSOM, Ministry of Internal Affairs in 2018. She also appeared on TV and state Radio discussing various issues relating to election, women in parliament and national budget.